

STRATEGI RESOLUSI KONFLIK ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)

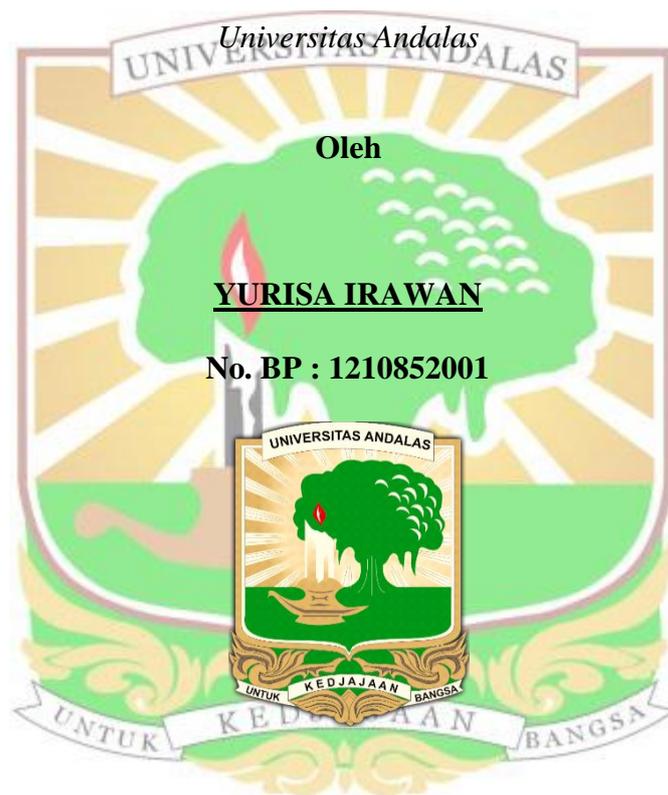
DALAM KONFLIK THAILAND SELATAN

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik



JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa/~~dosen/tenaga kependidikan~~* Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Yurisa Irawan
No. BP/NIM/NIDN : 1210852001
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:

Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Konflik Thailand Selatan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padang
Pada tanggal 12 Mei 2016
Yang menyatakan,

(Yurisa Irawan)

* pilih sesuai kondisi

** termasuk laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan magang, dll

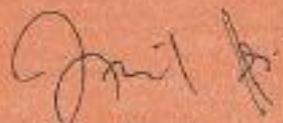
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

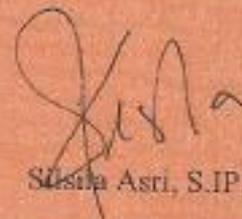
Nama : Yurisa Irawan
BP : 1210852001
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional (S1)
Judul Skripsi : Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam
(OKI) dalam Konflik Thailand Selatan

Pembimbing I



Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si
NIP. 198204132008122000

Pembimbing II



Susna Astri, S.IP, M.A

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



Agriawan, S.Sos, MA
NIP. 19810420202005011009

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji serta diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada:

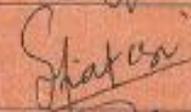
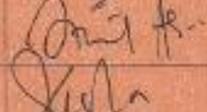
Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2016

Pukul : 10.00 - selesai

Tempat : Ruang Sidang Jurusan, Gedung Jurusan Lantai 2

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas

Tim Penguji:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Poppy Irawan, S.IP, MA, IR NIP. 198404202008121004	Ketua	
2	Sofia Trisni, S.IP, MA(IntRel) NIP. 198210182015042002	Sekretaris	
3	Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si NIP. 198005202008011008	Anggota	
4	Anita Afriani Simulingga, S.IP, M.Si NIP. 198204132008122000	Anggota	
5	Silsila Asri, S.IP, M.A	Anggota	



Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Andalas

Prof. Dr. rer. soz Nursyirwan Effendi
NIP. 196406241990011002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul “Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam konflik Thailand Selatan” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya ini murni gagasan, penilaian dan perumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai bahan acuan dalam skripsi saya dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Padang, 27 April 2016



Yurisa Irawan

1210852001

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillāhirrahmānirrahīm, penulis mengucapkan syukur kepada Allah; Al-Karīm yang telah mengajarkan penulis melalui perantara tulisan; Al-Hādī yang telah memberikan petunjuk ketika penulis menemukan jalan buntu –semoga senantiasa demikian; Ash-Shamad tempat penulis menggantungkan segala urusan, ketika realitas tak sejalan dengan harapan. Akhirnya, satu capaian telah diselesaikan, satu tanggung jawab sudah dituntaskan. Semoga rasa syukur kepada Tuhan ini memberi manfaat terhadap diri penulis, sebagaimana hikmah yang disampaikan Luqmān. *Allāhumma shalli wa sallim ‘ala Muḥammad*, yang perjuangannya dalam memperbaiki kehidupan manusia dengan mendorong keadilan, kesetaraan, dan penghormatan atas ilmu pengetahuan telah menginspirasi banyak orang untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Skripsi yang sederhana ini adalah persembahan penuh cinta yang dapat penulis berikan kepada kedua orang tua yang tercinta, Ibunda Zulni Endrita dan Ayahanda Irwan yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik bagi penulis di setiap munajat mereka. Jika suatu saat anakmu ini tidak bisa memberikan apa-apa, ingatlah bahwa skripsi ini pernah ditulis bersama mimpi untuk membahagiakan kalian. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara penulis, Hendrio Irawan.

Untuk Naldo Helmys, orang yang muncul disaat yang tepat. Terima kasih sudah membantu memberikan semangat, dan menjadi tempat berdiskusi yang menyenangkan. Terimakasih sudah menjadi yang terbaik. Semoga ini menjadi pembuka mimpi besar kedua kita.

Untuk Ibunda Misliati dan Ayahanda Helmizar, terimakasih sudah membantu memberikan semangat dan doa. Dan juga untuk Erlan Farjun dan Yazid Al-Kautsar terimakasih atas semangat dan kepercayaan yang kalian berikan kepada penulis.

Terimakasih untuk sahabat-sahabat terdekat penulis; Witra Efroza, Syifa Faisal, kak Liza Fidelia, Ajeng Trio Pratiwi, Sisca Yuliet, Arisha Yovita, Rafika Surya Bono, dan Rahmi Devita Sari atas dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Untuk sahabat-sahabat yang dari semester awal sudah berbaik hati menerima saya sebagai teman; Anita Nova Puspita, Rita Mega Sari, Syafri Ayu

Putri, Gilang Agung Septiadi, Edwin Martines, Fenny Martasari, Al-Hafizh Ibnu Qoyyim, Ihsan Kurnia, Putri Yazid, Gebby Septia Akhdev, Gilang Ramadhan, Miftahurrahman, Aulia Ul-Khair, Merdian Lisa, Alvino Oktoriawan, dan Nelfi Nurhariyanti. Berbicara dengan kalian sungguh menyenangkan. Maaf jika belum mampu membalas kebaikan-kebaikan kalian. Juga terimakasih kepada Junior dan senior yang mendukung saya; Teguh Mormo, bang Hengky Ramadhani, bang Budhi Oetama, kak Zakiyah Thoyyibah, kak Melisa Aprianti, kak Ipit, kak Maryam Jamilah, kak Sinta Kurnia, kak Nia, kak Gita Amelia, bang Ryan Ahmadi, bang Dicky W. Alda, bang Bobby Hermanda, bang Rayhan, bang Indo, kak Liza, dan kak Ibeth.

Terima Hubungan Internasional 2012, sungguh menyenangkan sempat bersama kalian; Rigo, Aditya Intan Bodiman, Uci, Nurul, Mia, Nessa, Vanny, Ola, Lia, Fajri, Fajar Mentari, Wanda, Stip, Ruri, Widi, Adha, Ines, beserta angkatan 2012 lainnya.

Dan terakhir, terima kasih kepada Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, dan Hugh Miall yang telah mengajarkan ilmunya melalui tulisannya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kemudahan, petunjuk, berkah dan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Konflik Thailand Selatan**”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan serta penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

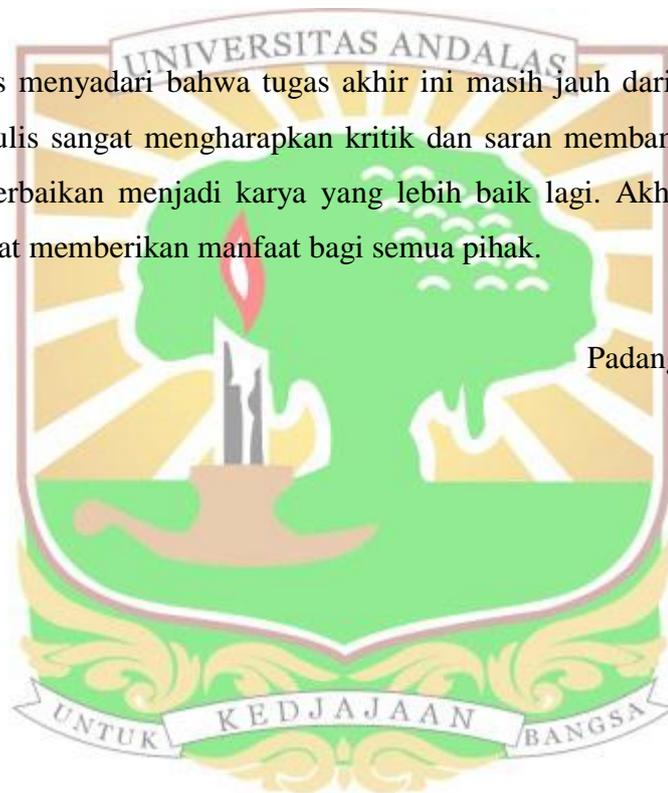
1. Ibu Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si Dosen Pembimbing I, dan Ibu Silsila Asri S.IP, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan tidak bosan-bosannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis. Dua pembimbing luar biasa yang dengan sabar menanggapi setiap kesalahan-kesalahan yang penulis buat dan mengarahkan proses berpikir penulis selama bimbingan berlangsung.
2. Bapak Poppy Irawan, S.IP, MA.IR, Bapak Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si, dan Ibu Trisni, S.IP.,MA(IntRel) selaku tim penguji yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Putiola Elian Nasir, SS, MA yang secara khusus telah mempengaruhi penulis untuk tertarik dengan pembahasan Islam dalam Hubungan Internasional.
4. Segenap *Civitas Academica* Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Alm Bapak Yopi Fetrian, S.IP, M.Si, M.PP, Dra. Ranny Emilia, M.Phil, Bapak Apriwan, S.Sos, MA, Bapak Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si, Ibu Witri Elvianti, S.IP.,MA, Bapak Edward Kemal, Bapak Iwan Sulisty, S.Sos, M.A., Bapak Muhammad Yusra, S.IP, M.A, dan Ibu Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, S.IP, M.Si, BapakHendri, dan Reza Resita, serta semua tim pengajar yang sudah sangat banyak membagi ilmunya kepada penulis selama masa studi penulis di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas.

5. Kedua orang tua tercinta, Irwan dan Zulni Endrita yang senantiasa mendoakan, mencintai dan mendukung penulis. Kepada saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan.
6. Naldo Helmys, S.IP yang banyak membantu penulisan skripsi penulis lewat diskusi yang menyenangkan.
7. Rekan-rekan seperjuangan HI angkatan 2012, suatu kebanggaan, penulis bisa mengenal kalian.
8. Untuk seluruh keluarga besar HI Universitas Andalas
9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak guna perbaikan menjadi karya yang lebih baik lagi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Padang, 27 April 2016

Penulis



ABSTRAK

“Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Konflik Thailand Selatan”

Pada tahun 2004, terjadi konflik kekerasan di Thailand Selatan antara Pemerintah Thailand dengan kelompok pemberontak yang mewakili masyarakat Muslim Melayu Patani. Secara historis, konflik berakar dari penguasaan Kesultanan Melayu Pattani oleh Kerajaan Siam Thailand lewat Traktat Anglo-Siam pada tahun 1902. Diskriminasi terhadap budaya, berupa bahasa dan agama, masyarakat Patani menjadi penyebab konflik. Kondisi ini mengundang perhatian Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk terlibat dalam penyelesaian masalah sebagai pihak ketiga. Dianalisis dengan menggunakan Model Hourglass oleh Ramsbotham, dkk., penelitian ini menyimpulkan bahwa OKI dalam kurun waktu 2005-2015 melakukan bentuk resolusi konflik berupa transformasi konflik, penyelesaian konflik, dan pengurangan konflik. Tujuannya adalah mencegah agar konflik serupa seperti tahun 2004 tidak terulang kembali.

Kata kunci: konflik Thailand Selatan, OKI, Model Hourglass, Preventing Violent Conflict

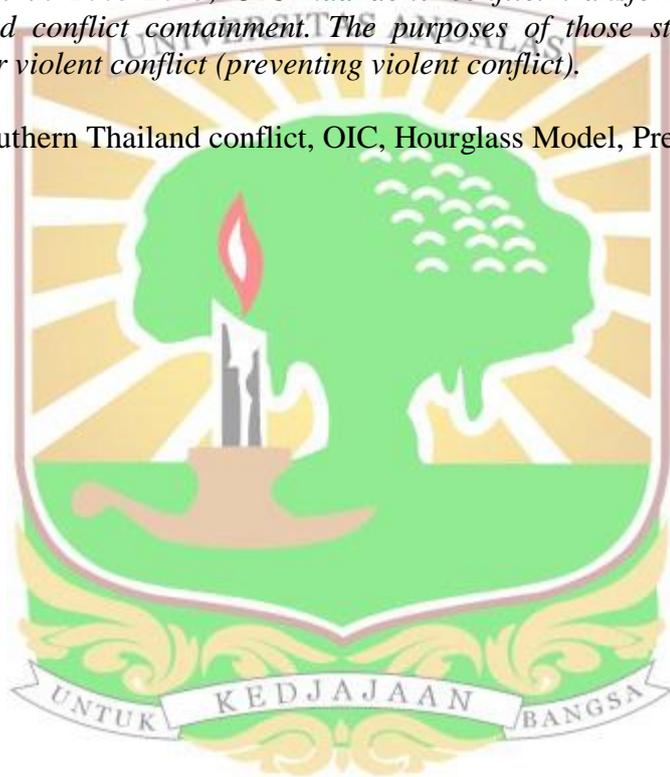


ABSTRACT

“The Conflict Resolution Strategy of Organization of the Islamic Cooperation (OIC) in Southern Thailand Conflict”

In 2004, the Southern Thailand violent conflict between the Thai Government and the Pattani Malay Muslim represented insurgent groups has been occurred. Historically, the root causes of conflict could be traced when Kingdom of Siam occupied Sultanate of Pattani through Anglo-Siamese Treaty of 1902. Socially, it is caused by culture–language and religion–discrimination. In 2005 the Organization of the Islamic Cooperation (OIC) has begun to intervene in this conflict to find conflict resolution. This research analyzed OIC conflict resolution strategy by using Hourglass Model coined by Oliver Ramsbotham et al.,. It can be concluded that in 2005-2015, OIC had done conflict transformation, conflict settlement, and conflict containment. The purposes of those strategies are to prevent further violent conflict (preventing violent conflict).

Keywords: Southern Thailand conflict, OIC, Hourglass Model, Preventing violent conflict



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Pertanyaan Penelitian	12
1.4. Tujuan Penelitian	13
1.5. Manfaat Penelitian	13
1.6. Studi Pustaka	13
1.7. Kerangka Konseptual	20
1.7.1. Definisi Konflik dan Resolusi Konflik	20
1.7.2. Model Resolusi Konflik Hourglass	22
1.7.3. <i>Preventing Violence Conflict</i>	29
a. <i>Deep Prevention</i>	30
b. <i>Light Prevention</i>	33
1.8 Metodologi Penelitian.....	34

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
1.8.2 Batasan Masalah	34
1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis.....	35
1.8.4 Teknik Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data	35
1.9 Sistematika Penulisan	37
BAB II PEMETAAN DAN ANALISIS FASE KONFLIK THAILAND SELATAN	39
2.1. Pentingnya Resolusi Konflik di Thailand Selatan.....	39
2.2. Latar Belakang Konflik Thailand Selatan.....	40
2.2.1. Deskripsi Mengenai Thailand Selatan	41
2.2.2. Akar Historis Konflik Thailand Selatan.....	42
2.3. Fase Perbedaan: Siamisasi Pasca Traktat Anglo-Siam	46
2.4. Fase Kontradiksi: Siamisasi Pasca Revolusi Siam 1932	49
2.5. Fase Polarisasi: Kelompok Pemberontak Pattani	55
2.5.1. Pemberontakan Haji Sulong.....	55
2.5.2. Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP)	58
2.5.3. Barisan Revolusi Nasional (BRN)	59
2.5.4. The Pattani United Liberation Organization (PULO)	61
2.6. Fase Kekerasan: Konflik Kekerasan Thailand 2004-2015	63
2.6.1. Aksi Kekerasan di Masjid Krue Se dan Tak Bai tahun 2004.....	64
2.6.2. Keberlanjutan Aksi Kekerasan Pasca 2004	70
BAB III KERANGKA KERJA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)	
DALAM RESOLUSI KONFLIK THAILAND SELATAN	72
3.1 Profil Organisasi Kerjasama Islam	73

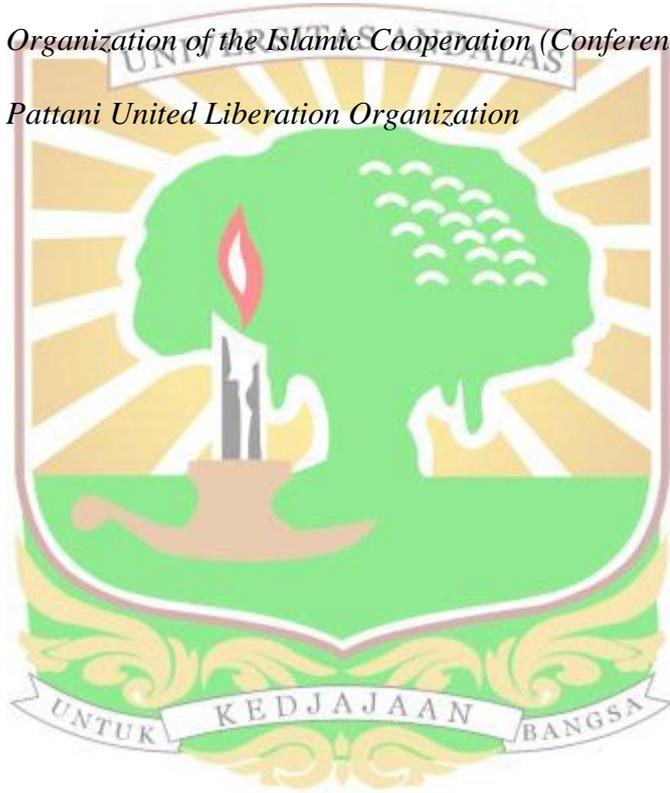
3.1.1. Tujuan dan Prinsip OKI	76
3.1.2. Struktur OKI.....	79
3.1.3. Program Aksi Sepuluh Tahun OKI	82
3.2 Perhatian OKI Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam: Deklarasi Kairo.....	84
3.3. OKI dan Minoritas Muslim.....	85
3.4. OKI dan Resolusi Konflik	89
BAB IV ANALISIS STRATEGI RESOLUSI KONFLIK ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM KONFLIK THAILAND SELATAN	95
4.1. Tindakan OKI Terkait Konflik Thailand Selatan	95
4.1.1. Fase I: Membuka Dialog dengan Thailand (2005-2009)	96
4.1.2. Fase II: Membuka Dialog dengan Pemberontak (2009)	104
4.1.3. Fase III: Pemantauan Dengan Resolusi Berkelanjutan	109
4.2. Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Berdasarkan Model Hourglass.....	115
4.2.1. <i>Conflict Transformation</i>	116
a) Respons Strategis <i>Cultural Peacebuilding</i> untuk mewujudkan <i>Deep Prevention</i>	118
b) Respons Strategis <i>Structural Peacebuilding</i> dalam mewujudkan <i>Deep Prevention</i>	121
4.2.2. <i>Conflict Settlement</i>	126
4.2.3. <i>Conflict Containment</i>	130

PENUTUP	133
5.1. Kesimpulan	133
5.1. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	



DAFTAR SINGKATAN

BNPP	<i>Barisan Nasional Pembebasan Pattani (the National Liberation Front of Pattani)</i>
BRN	<i>Barisan Revolusi Nasional (the National Revolutionary Front)</i>
CDHRI	<i>Cairo Declaration on Human Rights in Islam</i>
IPHRC	<i>Independent Permanent Human Rights Commission</i>
OIC	<i>Organization of the Islamic Cooperation (Conference)</i>
PULO	<i>Pattani United Liberation Organization</i>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik merupakan salah satu karakteristik universal yang dimiliki oleh masyarakat manusia. Konflik dapat terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi, perubahan sosial, pembentukan budaya, perkembangan psikologis, serta pembentukan organisasi-organisasi dari kelompok-kelompok yang berkonflik. Dalam perkembangannya, konflik bersifat dinamis. Sebab, konflik mengalami peningkatan (eskalasi) dan penurunan (de-eskalasi).¹

Salah satu bentuk konflik yang sering tampak pada saat ini adalah konflik internal atau konflik yang terjadi di dalam sebuah negara. Pada umumnya, konflik internal dipicu oleh konflik etnis, disebabkan oleh perbedaan etnis, budaya, yang nilai-nilai antara satu etnis dianggap berbenturan dengan nilai etnis lain. Berdasarkan bentuknya, konflik etnis ini bisa berbentuk horizontal, terjadi antar etnis atau agama di dalam sebuah negara; dan berbentuk vertikal, terjadi antara negara dengan kelompok etnis yang ada di dalamnya.² Di dalam kedua bentuk konflik etnis ini, pihak ketiga dapat dilibatkan. Keterlibatan pihak ketiga akan mempengaruhi perkembangan konflik itu sendiri dan memungkinkan konflik itu semakin memanas.³

¹ Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, and Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts* (Cambridge: Polity Press, 2011), 7-8.

² Baiq L.S. Wardhani, "Kajian Etnis dalam Kajian Politik Global," Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga. https://www.academia.edu/902452/Konflik_Etnis_dalam_Kajian_Politik_Global, (diakses pada 18 Mei 2015), 1.

³ Ramsbotham et al., 8.

Pada beberapa konflik etnis, sering kali kedua kelompok memiliki perbedaan agama yang diikutsertakan menjadi salah satu penyebab konflik. Hal tersebut biasanya menimbulkan konflik etnoreligius. Jonathan Fox menjelaskan bahwa konflik etnoreligius adalah konflik antara kelompok etnis yang memiliki perbedaan agama.⁴ Sementara itu menurut S. Ayse Kadayifci-Orellana, konflik etnoreligius merujuk kepada setiap konflik yang melibatkan pihak-pihak yang ditentukan oleh batas-batas agama, masyarakat dengan agama sebagai aspek yang sudah terintegrasi dengan kehidupan sosial dan budayanya, dan institusi agama yang mewakili secara signifikan suatu komunitas masyarakat dan memiliki legitimasi moral serta kapasitas untuk memobilisasi pengikutnya.⁵

Konflik etnoreligius bisa melanda kawasan mana saja. Namun, sering kali terjadi di dalam sebuah negara (*intra-state*) di mana terdapat masyarakat dengan agama dan budaya yang berbeda yang hidup di tempat yang sama.⁶ Tidak terkecuali di negara-negara Asia Tenggara, kawasan yang selama ini dianggap relatif stabil, konflik etnoreligius pun terjadi. Bahkan konflik etnoreligius di Asia Tenggara ini rawan memunculkan gerakan pemisahan diri atau separatis dalam setiap negara. Beberapa negara yang terlibat dalam konflik etnoreligius ini, diantaranya: Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Gerakan pemisahan diri ini menjelma dalam berbagai bentuk organisasi, mulai dari gerakan pemisahan diri, gerakan massa, maupun partai politik. Beberapa kelompok berbasis etnis dan agama di Asia Tenggara, diantaranya adalah: The Pattani United Liberation

⁴Jonathan Fox, *Ethnoreligious Conflict in The Late Twentieth Century: A General Theory* (Lanham: Lexington Books, 2002), 143.

⁵ S. Ayse Kadayifci-Orellana, "Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution," in *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, ed. Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, and Ira William Zartman (London: SAGE Publishing, 2009), 265.

⁶Ibid. 265.

Organization (PULO) di Thailand dan Moro Islam Liberation Front (MILF) di Filipina.⁷ Mereka dibedakan dengan kelompok berbasis etnis yang seagama dengan agama kelompok mayoritas seperti: Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia dan Partai Islam se-Malaysia (PAS) di Malaysia. Namun pada umumnya, perjuangan dari kelompok pemisah diri ini sama-sama dianggap mengganggu stabilitas keamanan nasional dan regional. Munculnya gerakan pemisah diri ini menimbulkan paradoks sebuah negara dimana pada satu sisi pemerintah negara berusaha untuk menyatukan perbedaan dalam satu kenegaraan, namun pada sisi lain kelompok-kelompok tertentu ingin membentuk sebuah pemerintahan sendiri.⁸

Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada konflik etnoreligius yang terjadi di Thailand. Masyarakat Thailand tergolong heterogen dari segi etnis dan agama. Mayoritas 70% penduduk Thailand adalah etnis Thai yang beragama Budha Therevada (sekitar 54 juta jiwa). Sedangkan sekitar 6 juta jiwa penduduk minoritas Thailand berasal dari etnis Melayu yang beragama Islam. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di Thailand. Pada umumnya, penduduk Muslim ini menghuni wilayah Thailand bagian selatan. Masyarakat Muslim-Melayu inilah yang menjadi subjek utama dalam konflik Thailand Selatan. Konflik tersebut berkaitan dengan persengketaan wilayah dengan perbedaan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan.⁹

⁷ Baiq L.S. Wardhani, "Iredentisme Islamis di Asia Tenggara Pasca 9/11: Identifikasi, Karakteristik dan respon pemerintah," Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, http://baiq-wardhani-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-64327-Umum-Iredentisme%20Islam%20di%20Asia%20Tenggra.html (accessed Mei 19, 2015), 7.

⁸ Ibid., 8.

⁹ Ibid., 10.

Muslim di Thailand sebetulnya terdiri atas dua golongan besar, yaitu kaum Muslim Melayu yang bermukim di wilayah Thailand Selatan dan Muslim Thai yang bermukim di Thailand Tengah dan Thailand Utara. Antara Muslim Thai dan Muslim Melayu ini terdapat perbedaan yang signifikan. Masyarakat Muslim Thai lebih majemuk dibandingkan dengan Muslim Melayu. Mereka telah mengalami proses sosialisasi yang seragam melalui pendidikan, pasar, media, serta institusi-institusi politik dan sosial yang ada di Thailand. Muslim Thai juga telah banyak yang menerapkan kebudayaan Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bahkan biasa menikah dengan orang-orang Thailand yang beragama Buddha.¹⁰

Secara administratif Muslim Melayu di Thailand terkonsentrasi di Thailand Selatan yang terdiri dari empat provinsi: Pattani, Narathiwat, Yala, dan Songkhala. Sedangkan secara sosiologis-kultural masyarakat Muslim Melayu di Thailand merupakan kelompok minoritas yang berbeda dengan kelompok Thai pada umumnya. Adanya keterikatan sejarah yang kuat dengan Kelantan dan Kedah (Malaysia) menjadikan masyarakat Muslim Melayu di Thailand tetap menggunakan bahasa Melayu. Pada awal perkembangannya, Thailand dan Thailand Selatan memiliki hubungan yang baik yang ditunjukkan dengan adanya sikap saling menghargai dan menghormati antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Namun, dalam proses asimilasi etnis Melayu Muslim ke dalam masyarakat Thailand yang dibentuk oleh pemerintah telah menciptakan kesenjangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kondisi yang seperti ini semakin diperburuk dengan keputusan pemerintah Thailand untuk menciptakan negara modern dengan ideologi Buddhisme dan Militerisme. Elit politik dan

¹⁰ Malik Ibrahim, "Seputar Gerakan Islam di Thailand: Suatu Upaya Melihat faktor Internal dan Eksternal," *Sosio-Religia*, Vol. 10, No. 1 (Februari: 2012): 134.

sektor publik didominasi oleh etnis Thai baik itu di tingkat nasional maupun lokal. Kemudian, pemerintah Thailand meluncurkan kebijakan, bahwa dalam setiap sekolah sekuler diharuskan menggunakan bahasa Thailand. Akibatnya, masyarakat Muslim-Melayu semakin terpinggirkan.¹¹ Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini tentu saja ditentang oleh masyarakat Muslim Melayu yang berada di Thailand Selatan. Satu per satu kelompok pemberontakan mulai bermunculan.

Kelompok pemberontakan yang muncul, diantaranya adalah: Kelompok Haji Sulong, Barisan Revolusi Nasional (BRN), Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), dan The Pattani United Liberation Organization (PULO).¹² Mereka memiliki berbagai tuntutan seperti: pemberian otonomi terhadap Thailand Selatan; menjadikan Pattani sebagai bagian dari Federasi Tanah Melayu; atau menggabungkan Thailand Selatan dengan Indonesia. Namun, keinginan dari kelompok ini ditolak oleh pemerintah Thailand sehingga masyarakat Thailand mulai melakukan tindakan bersenjata, sehingga kerusuhan di Pattani pun tidak terelakkan.¹³

Pemberontakan yang mereka lakukan berbentuk kekerasan seperti upaya sabotase terhadap fasilitas infrastruktur milik pemerintah, penyerangan pusat-pusat komunikasi internasional, penyerangan pejabat pemerintah, penembakan

¹¹ John Fuston, *Thailand's Southern Fires : The Malaysian Factor*, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), (Canberra: Australian National University, 2006).

¹²Uthai Dulyakasem, "Muslim-Malay Separatism in Southern Thailand Factors Underlying the Political Revolt," in *Armed Separatism in Southeast Asia*, ed. Joo-Lock, Lim and Vani S.(Singapore: ISEAS,1984), quoted in Wardhani, *Iredentisme Islamis di Asia Tenggara*, 4.

¹³Ibid.,

guru, serta pengeboman jembatan, gedung-gedung pemerintahan, dan infrastruktur milik negara lainnya.¹⁴

Pada awal Januari 2004 beberapa insiden kerusuhan kembali melanda Thailand Selatan, terutama di wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat. Insiden dimulai dengan penyerbuan terhadap markas militer Distrik Arion di Thak Bhai, Provinsi Narathiwat yang menewaskan empat tentara Thailand serta hilangnya 300 senapan lengkap beserta amunisinya. Sejak peristiwa itu hingga pertengahan 2007, aksi kekerasan dan teror, pembunuhan, penculikan, dan peledakan bom terus-menerus mewarnai suasana di empat provinsi di Thailand Selatan yang mengakibatkan lebih dari dua ribu korban jiwa yang tewas.¹⁵ Sampai tahun 2014 konflik telah memakan korban sedikitnya 5.900 orang yang sebagian besar adalah warga sipil.¹⁶ Namun, hingga penelitian ini berlangsung, konflik di Thailand Selatan masih terjadi.

Upaya penyelesaian konflik Thailand Selatan bisa dikatakan tidak mudah. Kurangnya profesionalitas dan komitmen dari pemerintah Thailand, serta sikap pemerintah yang menolak melakukan negosiasi dan dialog yang intensif dengan kelompok pemberontak menjadi salah satu faktor yang memperparah hubungan antara kedua belah pihak. Terlebih lagi kepemimpinan dari pihak pemberontak

¹⁴Afif Futaqi, "Identitas Promordial: Konflik Thailand-Pattani, 2009," <https://www.scribd.com/doc/24286426/Identitas-Primordial-Konflik-Thailand-Patani>, (accessed April 8, 2015).

¹⁵Ibid.,

¹⁶Detik News, "Konflik Sektarian Thailand Renggut 5 Nyawa, termasuk Anak Kecil dan Biksu," *Detik.com*, February 12, 2014, <http://news.detik.com/read/2014/02/13/131001/2495927/1148/konflik-sektarian-thailand-renggut-5-nyawa-termasuk-anak-kecil-dan-biksu> (accessed Mei 17, 2015).

sendiri juga tidak jelas karena mereka terpolarisasi ke dalam beberapa kelompok.¹⁷

Upaya penyelesaian konflik di Thailand Selatan justru muncul dari organisasi internasional yang berbasis Islam, yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Hal ini menjadi menarik, karena Thailand bukan merupakan negara anggota OKI dan juga bukan merupakan negara Islam. OKI merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). OKI berprinsip pada keyakinan terhadap agama Islam, penghormatan terhadap Piagam PBB, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia universal. Dasar utama pembentukan OKI ini adalah untuk kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Salah satu mandat OKI sebagaimana yang tercantum dalam Piagam OKI adalah untuk melindungi hak-hak muslim minoritas dan masyarakat non-anggota.¹⁸ Piagam ini menyatakan bahwa OKI mengamanatkan Sekretariat Jenderal untuk menjamin hak-hak muslim minoritas dan masyarakat negara non-anggota. Dalam misinya OKI menjaga kelompok minoritas dan komunitas muslim di negara non-anggota dan melakukan intervensi atas nama perlindungan hak asasi manusia yang berkonsentrasi pada agama sebagai elemen penting yang mengikat muslim secara bersama.¹⁹

OKI terbentuk setelah sejumlah pemimpin negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22-25 September 1969. Dalam konferensi tersebut, ditegaskan bahwa OKI berprinsip pada keyakinan terhadap

¹⁷ International Crisis Group, *Southern Thailand: Moving Towards Political Solutions?*, (Bangkok, International Crisis Group, 2009), 1.

¹⁸ Charter of the Organisation of the Islamic Conference.

¹⁹ Kementerian Luar Negeri, "Organisasi Kerjasama Islam (OKI)," <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=4&P=Multilateral&l=id>, (accessed Agustus 18, 2015).

agama Islam, penghormatan terhadap piagam PBB dan hak asasi manusia. Dasar pembentukan OKI ini adalah untuk kepentingan umat Islam yang dapat dilihat dari awal pembentukannya. Pendirian OKI didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam terhadap masalah yang dihadapi oleh umat Islam dengan pembakaran Masjid al-Aqsa di Palestina oleh kelompok Zionis Israel pada tanggal 21 Agustus 1969 sebagai penyebab langsung pembentukannya. OKI memiliki beberapa tujuan konkret seperti: meningkatkan solidaritas Islam antar negara anggota, mengoordinasikan kerja sama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat suci Islam. Saat ini, OKI memiliki anggota 57 negara Islam yang mayoritas berasal dari Asia dan Afrika. Dalam perkembangannya, OKI menjadi salah satu wadah kerjasama di berbagai bidang, yaitu: ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara anggota OKI.²⁰

Terdapat dua alasan penulis mengapa OKI menjadi objek penelitian dalam resolusi konflik di Thailand Selatan. Pertama, berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak lain, seperti Malaysia dan Indonesia, OKI dinilai berhasil mengadakan perundingan dengan kedua belah pihak. Hal ini sangat penting untuk kemajuan konflik di Thailand Selatan karena merupakan titik terang untuk mencegah konflik kekerasan di Thailand menjadi berlarut-larut. Pada tahun 2005, OKI mengutus kejadian di Tak Bai yang telah menewaskan ribuan korban dan mengecam pemerintah Thailand. Hal ini ternyata berhasil membuat Thailand merespon OKI dengan cara mengutus menteri luar negerinya saat itu, Dr. Nissai Vejjajiva, untuk menemui Kesekretariatan OKI. Tujuannya adalah untuk

²⁰Ibid.,

mengonfirmasi kejadian di Tak Bai dan menyatakan bahwa pemerintah Thailand telah membentuk komite independen atau yang disebut dengan “Komite Investigasi Independen” guna melanjutkan penyelidikan yang terjadi di Tak Bai. Selanjutnya, pada pertemuan tersebut OKI juga memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Thailand untuk menuju perdamaian berkelanjutan. Dalam hal ini, OKI menyatakan kesiapannya untuk membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Thailand Selatan.²¹

Pada tahun 2009, OKI berhasil mengundang Abu Yasir Fikri, pemimpin kelompok PULO untuk membahas kasus Thailand Selatan pada pertemuan OKI yang berlangsung di Jeddah.²² Setahun setelahnya, dalam sidang ke-37, OKI mengeluarkan resolusi No.1/37-MM untuk menjaga hak komunitas Muslim dan kaum minoritas di negara anggota OKI, khususnya membuat keputusan tentang masalah Thailand Selatan. Isi resolusi ini diantaranya adalah OKI membantu Thailand Selatan dalam mencari model pemerintahan yang sesuai dengan masyarakatnya, menekankan pada masalah pengakuan bahasa dan budaya Melayu, serta mendorong pembangunan ekonomi yang adil di Thailand Selatan.²³

Kedua, OKI memiliki prinsip dan mandat tersendiri yang mengharuskan mereka untuk terlibat di dalam konflik Thailand Selatan. OKI memiliki prinsip untuk melindungi hak-hak muslim minoritas dan masyarakat di negara non-anggota OKI, sebagaimana yang tercantum di dalam piagam OKI. Piagam ini menyatakan bahwa OKI mengamanatkan Sekretariat Jenderal untuk bekerjasama

²¹ Paoyee Waesahme, “The Organization of the Islamic Cooperation and the Conflict in Southern Thailand”(MIR thesis., Victoria university of Wellington, 2012), 48.

²²Pattani Post, “*Kerajaan Thai Meloby Negara OIC*,” *PattaniPost.com*, April 20, 2010, <http://patanipost.net/2010/04/20/kerajaan-thail-meloby-negara-oic/>, (accessed Mei 29, 2015).

²³Pattani Post, “*OIC Mahu Supaya Pihak Terlibat Mengadakan Perbincangan*,” *PattaniPost.com*, Mei 24, 2010<http://patanipost.net/2010/05/24/oic-mahu-sepaya-pihak-terlibat-mengadakan-perbincangan/> (accessed November 4, 2015).

dengan organisasi internasional lainnya untuk menjamin hak-hak minoritas muslim dan masyarakat negara non-anggota. Dalam misinya, OKI menjaga kelompok minoritas dan komunitas muslim di negara non-anggota dan melakukan berbagai intervensi atas nama perlindungan hak asasi manusia yang berkonsentrasi pada agama sebagai elemen penting yang mengikat muslim secara bersama-sama. Hal ini membuat OKI, baik diminta atau tidak, cenderung menjadikan prinsipnya sebagai pijakan untuk mengatasi persoalan minoritas Muslim bahkan di negara non-anggota.²⁴ Bahkan upaya OKI untuk melakukan pencegahan konflik dalam perkembangan selanjutnya didukung sepenuhnya oleh PBB dengan memperoleh mandat untuk bertindak sebagai pihak yang mencegah (*preventing*) terjadinya konflik kekerasan di negara anggota OKI maupun di negara non-anggota tetapi di sana terdapat komunitas umat Muslim yang memerlukan perhatian khusus dari OKI. Mandat OKI sebagai pencegah (*preventer*) tersebut telah disahkan melalui Resolusi No.61/49 oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2006.²⁵

PBB memutuskan OKI sebagai organisasi pengamat, menyambut upaya Sekretaris Jenderal OKI dalam memperkuat peran OKI dalam pencegahan konflik (*conflict prevention*), menjaga perdamaian (*peacekeeping*), resolusi konflik (*conflict resolution*), dan rehabilitasi konflik di negara anggota serta konflik yang melibatkan masyarakat muslim. PBB dan OKI bekerjasama dalam mencari solusi untuk masalah global, seperti perdamaian dan keamanan internasional, pelucutan senjata, penentuan nasib sendiri, promosi damai kebudayaan melalui dialog dan

²⁴ Paoyee Waesahme, 20.

²⁵ UN Human Rights Committee, Consideration of reports submitted by states parties under Article 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights: concluding observations of the Human Rights Committee: Thailand, 8 July 2005, CCPR/CO/84/THA, quoted in Neil J. Melvin, *Conflict in Southern Thailand*, 7.

kerjasama, dekolonialisasi, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, terorisme, bantuan darurat dan rehabilitasi, pembangunan sosial, ekonomi, dan teknis kerjasama.²⁶

Sebagai pihak yang menjalankan resolusi konflik, OKI memiliki mekanisme operasional tersendiri, diantaranya: Misi pencarian fakta dalam zona konflik, berpartisipasi dalam negosiasi diplomatik internasional, penugasan khusus OKI dan/atau grup kontak dengan kasus konflik, deklarasi publik dan laporan, memanfaatkan anggota OKI dalam organisasi internasional pada kasus tertentu dan memberikan layanan mediasi kepada pihak yang berkonflik.²⁷

Mandat dan prinsip OKI di atas sepenuhnya bekerja dalam konflik Thailand Selatan. Hal ini bahkan sudah dilakukan OKI sejak Juni 2005 dengan mengirimkan tim pencari fakta ke Thailand terkait dengan konflik kekerasan di sana. Pada Oktober 2005, Sekretaris Jenderal Ekmeleddin Ihsanoglu menegaskan bahwa OKI hadir karena mereka merasa perlu untuk terlibat di dalam konflik kekerasan yang berlarut-larut di Thailand Selatan.²⁸ Artinya, OKI bukan semata-mata menginginkan konflik berakhir, akan tetapi juga tidak menginginkan kekerasan terhadap Muslim terus terjadi di Thailand Selatan, mengingat dalam prinsip OKI, menjamin hak-hak Muslim di negara manapun, merupakan perhatian mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, konflik Thailand Selatan sejak tahun 2004 terus berada pada taraf eskalasi. Bahkan hingga tahun

²⁶ Resolusi PBB no 61/49

²⁷ Elizabeth H. Prodromou, "The OIC and Conflict Resolution" (Harvard University, 2014)., 3

²⁸ Neil J. Melvin, "Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency," *SIPRI Policy Paper* No. 20 (September 2007): 7.

2015 konflik ini telah menewaskan lebih dari 6.500 warga sipil. Pada tanggal 11 Juli 2015, serangan bom di tiga provinsi di selatan Thailand; Yala, Narathiwat, dan Songkhla masih saja terjadi dan telah menewaskan 6 orang.²⁹ Artinya aksi-aksi kekerasan di Thailand Selatan masih sering terjadi dan berpotensi tinggi untuk terus berulang. Bahkan apabila dibiarkan bukannya tidak mungkin akan menimbulkan perang dalam skala yang masif.

Di tengah berlangsungnya konflik tersebut, OKI tetap menunjukkan komitmennya untuk ambil bagian dalam upaya resolusi konflik. Terakhir OKI mengeluarkan resolusi pada pertemuan negara-negara anggota di Kuwait pada tanggal 27-28 Mei 2015 untuk terus menolak aksi-aksi kekerasan di Thailand Selatan.³⁰ Namun, persoalannya adalah OKI mencoba melakukan strategi resolusi konflik di Thailand yang bukan negara anggota maupun negara Islam. Sehingga menarik untuk dilihat bagaimana strategi resolusi konflik OKI di Thailand, apakah mampu konsisten dengan tujuan-tujuan mereka atau justru mengalami kendala-kendala tertentu.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah “*Bagaimana strategi resolusi konflik yang dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam konflik Thailand Selatan dengan menggunakan model Hourglass?*”

²⁹Reuters, “Six Killed and 11 Injured in Thailand’s Violence-hit South,” *Reuters.com*, July 11, 2015. <http://www.reuters.com/article/2015/07/11/us-thailand-blast-idUSKCN0PL0G420150711#CgmzdF5Uw0rLpxpk.97> , (accessed November 4, 2015).

³⁰Pattani Post, “OIC resolution about South Thailand,” *PattaniPost.com*, June 16, 2015. <http://patanipost.net/2015/06/16/oic-resolution-abouth-southern-thailand/> (accessed November 4, 2015).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana strategi resolusi konflik yang dilakukan oleh OKI dalam penyelesaian konflik Thailand Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari tulisan ini untuk para penstudi Hubungan Internasional lainnya adalah untuk memperkaya literatur mengenai proses, strategi, serta bentuk-bentuk intervensi kemanusiaan yang pernah diterapkan dalam penanganan kasus etnis seperti di Thailand Selatan.

1.6. Studi Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan beberapa hasil karya orang lain yang terlebih dahulu meneliti tentang konflik Thailand Selatan maupun keterlibatan OKI di dalam studi pustaka.

Pertama, penulis menggunakan tulisan Malik Ibrahim dengan judul *Seputar Gerakan Islam di Thailand : Suatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal*. Dalam tulisannya ini, Malik menjelaskan aspek internal dan eksternal dari perkembangan Islam di Thailand. Dinamika Muslim Thailand tidak lepas dari aspek internal yaitu: pertama, adanya asimilasi ke dalam budaya Buddha-Siam yang dipaksakan oleh rezim Phibun Songgram pada tahun 1938. Kedua, terjadinya pembunuhan di Masjid Kru Se di Pattani dan Thak Bai di wilayah Menara pada tahun 2004 dan di Masjid al-Furqan di wilayah Menara pada tahun 2009 yang membuat umat Islam di Thailand tidak lagi memiliki tempat untuk

mengadu. Ketiga, militer yang mendominasi perpolitikan di Thailand sejak tahun 1932 hingga 1977 telah membuat aksi kekerasan terhadap muslim Pattani meningkat. Keempat, tidak adanya kesatuan di antara gerakan-gerakan perjuangan Muslim di Pattani. Sedangkan, pada aspek ekseternalnya Malik Ibrahim menyebutkan bahwa konflik di Pattani terus berlangsung karena kurang mendapat tempat bagi dunia internasional terutama PBB dan lembaga HAM meskipun konflik sudah terjadi sejak lama. Hal yang paling disayangkan menurut Ibrahim adalah OKI tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan untuk menghadapi konflik yang menimpa umat Muslim di Thailand Selatan tersebut.³¹

Kedua, penulis menggunakan laporan dari International Crisis Group dengan judul *Southern Thailand: Moving Towards Political Solutions?* yang menjelaskan konflik yang terjadi di Thailand Selatan pada tahun 2004. Kurangnya profesionalitas dari pemerintah serta sikap Thailand yang menolak melakukan negosiasi dengan kelompok pemberontak semakin memperparah hubungan antara kedua belah pihak. Para pihak fasilitator telah melakukan berbagai upaya, namun belum menemui hasil yang memuaskan. Upaya tersebut terhambat oleh kurangnya komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah serta kepemimpinan yang tidak jelas dari kelompok pemberontak. Salah satu contohnya adalah mediasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan pewartannya Jusuf Kalla di Bogor. Namun upaya mediasi ini gagal setelah upaya mediasi ini bocor di media. Jika pemerintah menunjukkan komitmen yang serius dalam penyelesaian serius dalam dialog maka pemberontakan yang terjadi bisa dikontrol.³²

³¹ Malik Ibrahim, 147-151.

³²International Crisis Group, 16.

Crisis Group dalam kasus Thailand Selatan ini memberikan beberapa rekomendasi untuk pemerintah Thailand. Pertama, mencabut keputusan darurat militer di tiga provinsi Thailand Selatan serta menguatkan *checks and balance* untuk menjaga kerusuhan kekuasaan disana. Kedua, mengadakan diskusi serius dengan perwakilan pemberontak yang membahas tentang struktur administratif khusus untuk Thailand Selatan. Ketiga, mengontrol peredaran senjata di dalam kelompok pemberontak maupun warga sipil. Keempat, meningkatkan partisipasi rakyat dalam perencanaan pembangunan wilayah. Kelima, menghentikan penyiksaan terhadap kelompok pemberontak. Dan yang terakhir mempercepat penyelidikan dalam penyerangan Masjid Al-Furqan.³³

Ketiga, penulis menggunakan tulisan Zachri Abuza yang berjudul *The Ongoing Insurgency in Southern Thailand: Trends in Violence, Counter insurgency Operations, and the Impact of National Politics*. Tidak jauh berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, Zachri Abuza juga membahas tentang konflik kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan. Namun, ia berkonsentrasi kepada peristiwa dari tahun 2004 hingga tahun 2011. Sejak tahun 2004, pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok muslim melayu Thailand Selatan telah menewaskan sedikitnya 4.500 orang dan 9.000 orang luka-luka, sehingga konflik yang terjadi di Thailand saat ini merupakan konflik yang mematikan di Asia Tenggara. Sampai pada tahun 2011, konflik masih mengalami kebuntuan. Dari tahun 2004 hingga pertengahan awal tahun 2007, konflik mengalami penurunan. Namun, pada pertengahan akhir tahun 2007 konflik mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2008. Rata-rata perbulannya masyarakat meninggal 32

³³ Ibid., ii.

orang dan 58 orang terluka. Kebanyakan korban berjatuh akibat serangan tembakan dan alat peledak (IED). Pemberontak menargetkan sasarannya kepada pemerintah, pasukan keamanan negara, serta Muslim Thailand yang telah bercampur dengan Buddha.³⁴

Konflik Thailand Selatan terkadang tidak begitu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah, sebab pemerintah hanya berfokus kepada politik nasional dan juga birokrasi Thailand yang kacau. Akibatnya kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan akan sulit untuk diselesaikan.³⁵

Keempat, penulis menggunakan tulisan Ibrahim Sharqieh yang berjudul *Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflict*. Dalam tulisan ini, Sharqieh membahas potensi yang dimiliki OKI dalam melaksanakan resolusi konflik di dunia Islam. Meskipun belum sepenuhnya berpengaruh besar terhadap perubahan konflik, OKI tetap melakukan berbagai upaya agar konflik yang terjadi dalam dunia Islam sedikit mereda. Hal itu bisa dilihat dari peranan OKI dalam empat negara yang pernah dibantu oleh OKI, diantaranya Filipina, Thailand, Somalia, dan Irak.³⁶

Konflik yang terjadi di Filipina dimulai pada saat kemerdekaan tahun 1964, yang mana komunitas muslim di negara tersebut menyerukan pembentukan negara sendiri, terpisah dari pemerintahan Filipina. Sehingga pada tahun 1970 menjadi konflik kekerasan dan mulai bermunculan kelompok pemberontakan, diantaranya *Moro National Liberation Front (MNLF)*. Dalam konflik ini, OKI

³⁴ Zachri Abuza, *The Ongoing Insurgency in Southern Thailand : Trends in Violence, Counterinsurgency Operations, and the Impact of International Politics* (Washington. D.C.: National defense University Press, 2011), 3-4.

³⁵ Ibid.,14.

³⁶ Ibrahim Sharqieh, "Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflict?" *Peace and Conflict Studies*, Vol. 19, No. 2, (Fall: 2012): 163.

melakukan intervensinya mulai pada tahun 1972. Kemudian, pada tahun 1974 OKI menyerukan agar MNLF dan pemerintah Filipina melakukan negosiasi dan mencari solusi damai untuk menjaga integritas wilayah Filipina. Melalui upaya mediasi intensif yang dilakukannya, OKI mampu membawa MNLF dan Pemerintah melaksanakan perjanjian damai pada tahun 1996 yang mana dalam perjanjian ini menunjuk pemimpin umum MNLF, Nur Misuari sebagai gubernur Filipina Selatan. Namun, DPR tidak meratifikasi kebijakan tersebut hingga terjadi lagi konflik baru. Hal ini menyebabkan OKI terlibat lagi dalam proses mediasi antara pemerintah dan MNLF hingga pada akhirnya OKI memulai kembali proses perdamaian dengan pencarian fakta baru.³⁷

Konflik selanjutnya, yaitu di Thailand. Konflik yang berkonsentrasi kepada empat provinsi Thailand bagian Selatan, yaitu: Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun dimana terjadinya diskriminasi muslim melayu oleh pemerintah Thailand. Puncak permasalahannya dimulai pada tahun 2004 ketika terjadi baku tembak antara tentara dan kelompok pemberontak. Melihat kasus ini, OKI ikut membantu menengahi konflik pada tahun 2005 setelah mendapat undangan dari pemerintah Thailand. Fokus utama OKI dalam konflik ini adalah mediasi. Upaya ini difokuskan kepada pemberian hak-hak muslim di Thailand Selatan dan juga sebagai bagian dari negara Thailand. Kemudian OKI membantu menyelesaikan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat Thailand Selatan dengan membentuk dialog, pemahaman, dan resolusi.³⁸

Kemudian terjadinya krisis kemanusiaan di Somalia pada tahun 1991 seperti perang saudara, kekeringan, serta kelaparan sehingga banyak menelan

³⁷ Ibid., 164-166.

³⁸ Ibid., 166-167.

korban jiwa. Dalam hal ini, OKI mencoba untuk ikut turun tangan dengan membentuk kelompok Kontak. Namun sayangnya, dalam perkembangannya konflik di Somalia menyebabkan Kelompok Kontak ini menjadi tidak efisien yang pada akhirnya menemukan jalan buntu. Namun kemudian, pada tahun 2006 OKI ikut berpartisipasi dalam upaya negosiasi antara Pemerintah Transisi Federal Somalia dengan Aliansi Pembebasan Somalia sehingga terbentuk Perjanjian Djibouti hingga kelompok Kontak menjadi aktif kembali.³⁹

Konflik yang terakhir yaitu di Irak. Terjadinya kerusuhan pada tahun 2003 serta pengeboman dua mesjid pada tahun 2006 memicu intervensi dari pihak ketiga, terutama OKI. OKI mencoba memberikan tempat untuk melakukan rekonsiliasi sehingga intervensi yang dilakukan oleh OKI dianggap sukses terutama dalam pencapaian “perdamaian sosial”. Beberapa contoh di atas menjelaskan bagaimana keterlibatan OKI sebagai mediator konflik.⁴⁰

Terdapat tiga faktor utama yang membuat pendekatan OKI menjadi lebih efektif. Pertama, pada saat organisasi lain seperti PBB melakukan mediasi dengan kekuatan (*force*), OKI mengambil peran sebagai pelengkap dalam mediasi tersebut. Kedua, pihak yang menginginkan OKI sebagai mediator terlaksana secara suka rela, sehingga mendapatkan respon yang baik dari pihak yang berkonflik. Dan yang ketiga, OKI melakukan pendekatan moral kepada pihak yang berkonflik. Selanjutnya, dalam kemitraannya dengan PBB, OKI menjadi salah satu agen resolusi konflik yang disahkan oleh Majelis Umum PBB, khususnya di negara-negara muslim.⁴¹

³⁹ Ibid., 168-169.

⁴⁰ Ibid., 169-170.

⁴¹ Ibid., 171-172.

Kelima, penulis menggunakan tulisan Shahid Ahmad Hashmat dengan judul *The OIC Potential, Capabilities and Constraints for International Conflict Resolution*. Tulisan tersebut tidak jauh berbeda dengan sumber sebelumnya yang menjelaskan tentang kemitraan OKI dengan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Negara-negara anggota OKI memberikan dukungan penuh terhadap berbagai operasi penjaga perdamaian dunia. Beberapa tahun terakhir hampir setengah dari pasukan OKI diberikan untuk pasukan perdamaian PBB. Menariknya, hampir dari setengah kekuatan ini disediakan oleh dua anggota OKI, yaitu: Bangladesh dan Pakistan.⁴²

Dalam pelaksanaan resolusi konflik, OKI juga mengalami beberapa kendala. Kendala ini terbagi dalam tiga kategori. Pertama, kendala yang berkaitan dengan masalah organisasi. Sejak tahun 1969, OKI merupakan sebuah Organisasi negara-negara Islam. Namun sayangnya, OKI tidak memiliki kerangka organisasi untuk menjadi perwakilan sejati dunia Muslim dan OKI juga bukanlah organisasi politik yang terstruktur sehingga tidak memiliki mandat dalam membuat keputusan yang mengikat. Kedua, kemampuan politik-militer yang masih minim diantara negara-negara OKI. Dan yang ketiga adalah kendala sumber daya pendapatan negara masing-masing anggota. Hanya sebagian kecil negara anggota yang hanya memiliki PDB per kapita tinggi, sedangkan negara anggota yang lainnya memiliki PDB per kapita yang rendah. Meskipun peran OKI dalam resolusi konflik terbatas, namun banyak negara-negara anggota OKI yang memberikan kontribusi

⁴² Shahid Ahmad Hashmat, *The OIC's Potential, Capabilities and Constraints for International Conflict Resolution*. (Islamabad: Institute of Strategic Studies Islamabad, 2014), 117-118.

yang positif dalam upaya PBB melaksanakan resolusi konflik internasional dengan aktif berpartisipasi dalam operasi penjagaan perdamaian PBB.⁴³

Dari kelima tulisan yang dijadikan bahan studi pustaka di atas, hal yang membedakannya dengan penelitian yang sedang penulis kaji adalah pada upaya memetakan atau meringkai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OKI dalam konteks penyelesaian atau resolusi konflik dalam sebuah model resolusi konflik. Dengan kata lain, di sini berusaha untuk memahami apa saja yang sudah dilakukan oleh OKI di Thailand Selatan dilihat dari model resolusi konflik yang diajukan, yaitu Model Hourglass dari Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Miall dkk., yang akan dipaparkan selanjutnya.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Definisi Konflik dan Resolusi Konflik

Konflik merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat manusia yang dapat terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi, perubahan sosial, pembentukan budaya, perkembangan psikologis, serta pembentukan organisasi dari kelompok-kelompok yang berkonflik. Dalam perkembangannya, konflik bersifat dinamis karena mengalami peningkatan (eskalasi) dan penurunan (de-eskalasi). Tidak jarang juga konflik diintervensi oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi perkembangan konflik dan memungkinkan konflik menjadi semakin meluas. Menurut Morton Deutsch, konflik pada dasarnya memiliki sifat merusak (*destructive*) dan membangun (*constructive*). Bagi Deutsch, hal tersebut

⁴³ Ibid., 119-123.

merupakan kunci utama dalam memahami Resolusi Konflik secara keseluruhan.⁴⁴ Sedangkan menurut Ramsbotham, dkk., konflik adalah pengejaran (*pursuit*) tujuan-tujuan yang berseberangan dari kelompok-kelompok yang berbeda. Ketika pihak yang saling berseberangan tersebut telah mengambil jalan menggunakan kekuatan paksaan (*force*) maka hal itu sudah termasuk konflik bersenjata (*armed conflict*). Ketika salah satu pihak menggunakan kekerasan untuk melawan pihak yang tidak bersenjata, maka itu sudah disebut dengan konflik kekerasan (*violent conflict*).⁴⁵

Setiap konflik tentunya membutuhkan suatu penyelesaian atau resolusi konflik. Menurut Ramsbotham, dkk., resolusi konflik merupakan suatu proses panjang agar bentuk konflik berubah atau terjadi transformasi yang belum bisa dikatakan selesai dengan hanya menghasilkan suatu kesepakatan (*agreement*) tapi juga harus menuju perubahan kondisi yang konstruktif. Artinya, resolusi konflik tidak hanya upaya untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi lebih jauh dari itu, resolusi konflik berarti menstruktur ulang atau mentransformasi hubungan pihak-pihak yang berkonflik.⁴⁶ Resolusi konflik bertujuan untuk mengubah perilaku pihak yang berkonflik untuk tidak lagi menempuh cara-cara kekerasan untuk mengejar tujuan, mengubah kebiasaan mereka yang sering bermusuhan kepada kondisi yang dapat saling memahami, serta mengubah struktur hubungan dari pihak-pihak yang berkonflik dimana tidak ada lagi kesenjangan atau diskriminasi.⁴⁷

⁴⁴ Ramsbotham et al., 7-8.

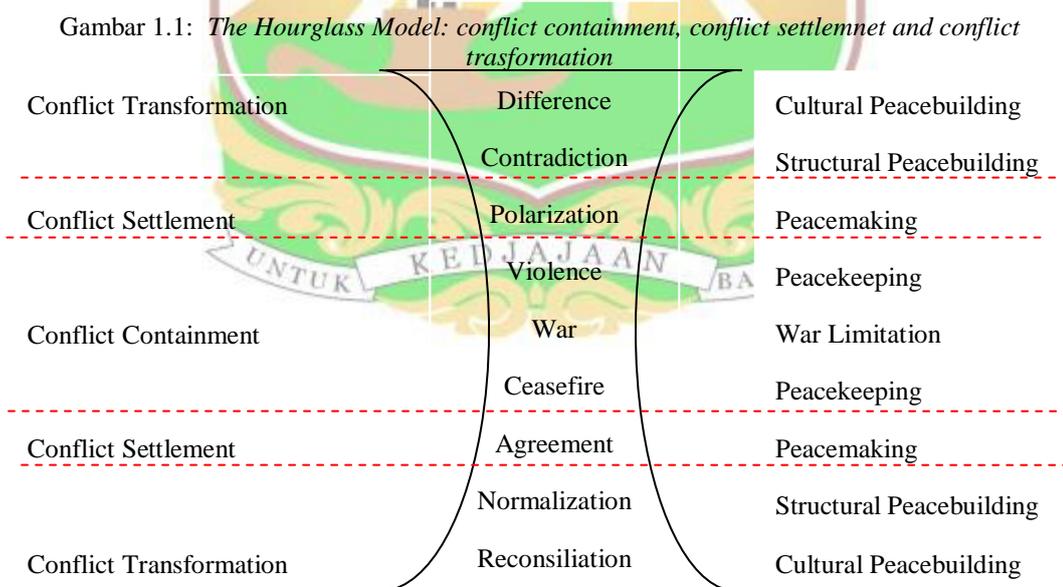
⁴⁵ Ibid., 30-31.

⁴⁶ Ibid., 9.

⁴⁷ Ibid., 31.

1.7.2. Model Respons Resolusi Konflik *Hourglass*

Terdapat berbagai macam model resolusi konflik yang ditawarkan oleh para ahli. Salah satunya adalah Model Respons Resolusi Konflik Hourglass (selanjutnya disebut Model Hourglass) yang dirumuskan oleh Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, dan Hugh Miall di dalam buku mereka *Contemporary Conflict Resolution* (2012). Model ini menggambarkan respon-respon yang dilakukan oleh pihak yang melakukan resolusi konflik pada fase-fase konflik, baik eskalasi maupun de-eskalasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Model Hourglass untuk menelaah strategi resolusi konflik yang dilakukan OKI dalam artian respons-respons strategis seperti apa yang diberikan oleh organisasi tersebut ketika bertindak sebagai pihak ketiga dalam konflik Thailand Selatan. Gambar 1.1. menunjukkan bentuk Model Hourglass yang sudah dirumuskan oleh Ramsbotham, dkk.



Sumber : Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Miall, *Contemporary Conflict resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflict*. 2012

⁴⁸Ibid., 13.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai Model Hourglass, berdasarkan penjelasan di dalam buku *Contemporary Conflict Resolution*, penulis mencoba memaparkan keterhubungan antara tiga kolom di dalam Model Hourglass. Baik itu antara kolom pertama dengan kolom kedua, kolom pertama dengan kolom ketiga, dan kolom kedua dengan kolom ketiga. Adapun yang penulis maksud dengan kolom pertama berada pada sisi kiri model, yaitu *conflict transformation*, *conflict settlement*, dan *conflict containment*. Kolom kedua berada pada bagian tengah, yaitu *difference*, *contradiction*, *polarization*, *violence*, *war*, *ceasefire*, *agreement*, *normalization*, dan *reconciliation*. Sedangkan kolom ketiga berada pada bagian kanan model yaitu *cultural peacebuilding*, *structural peacebuilding*, *peacemaking*, dan *peacekeeping*.

Ramsbotham dkk., memaparkan bahwa model yang mereka susun disebut juga dengan model mengenai kontingensi dan komplementaritas.⁴⁹ Kontingensi merujuk kepada sifat dasar dan fase konflik. Sedangkan komplementaritas merujuk kepada kombinasi respon-respon yang tepat yang dikerjakan secara bersama-sama untuk memaksimalkan kesempatan keberhasilan dalam resolusi konflik.⁵⁰ Apabila pengertian ini dibawa ke dalam model, kontingensi atau kemungkinan merujuk kepada kolom kedua model atau fase konflik. Hal ini didukung sendiri oleh Ramsbotham yang menyatakan bahwa baik eskalasi maupun de-eskalasi dalam fase konflik adalah sesuatu yang tidak terprediksikan.⁵¹ Sedangkan komplementaritas jelas merujuk kepada kolom pertama model. Keterhubungan antara kolom pertama dengan kolom kedua pun menjadi tergambar yang mana pada setiap fase konflik (kolom kedua) yang tidak

⁴⁹ [. . . this is a *contingency* and *complementarity* model . . .] Oliver Ramsbotham et.al., 13.

⁵⁰ Ibid., 13-14.

⁵¹ Ibid., 12-13.

terprediksikan diharapkan ada respon-respon tertentu (kolom pertama) dari pihak yang melakukan upaya resolusi konflik yang dapat memberi kesempatan keberhasilan pada resolusi konflik tersebut.

Fase konflik di dalam Model Hourglass terdiri dari fase eskalasi dan de-eskalasi. Fase eskalasi dimulai dari tahap *difference* hingga *violence*. Sedangkan fase de-eskalasi dimulai dari tahap *ceasefire* hingga *reconciliation*. Di antara kedua fase tersebut terdapat fase *war*. Ramsbotham dkk., tidak memberikan definisi tegas untuk setiap tahapan. Namun, menurut Ramsbotham, tahap *difference* sebetulnya adalah bagian dari setiap perkembangan sosial. Kemudian, tahap ini melewati tahap selanjutnya yaitu kemunculan *contradiction* yang dapat bersifat tersembunyi maupun tidak.⁵² Ramsbotham meminjam istilah *contradiction* dari Galtung yang didefinisikan sebagai situasi ketika adanya ketidakcocokan tujuan dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketidakcocokan ini dapat disebabkan oleh tidak sepadannya nilai-nilai sosial dan struktur sosial dalam suatu masyarakat.⁵³ Definisi ini akhirnya membantu menggambarkan apa yang dimaksud dengan *difference* itu sendiri yaitu perbedaan di dalam masyarakat, baik itu perbedaan nilai maupun perbedaan struktur.

Pada dua tahap pertama, konflik tidak begitu tampak di permukaan. Namun, pada tahap ketiga, konflik menjadi lebih jelas dan kelompok-kelompok musuh pun terbentuk. Tahap ini disebut dengan *polarization*. Puncaknya adalah ketika *violence* dan *war* terjadi.⁵⁴ Ada penjelasan tegas tentang apa yang disebut dengan konflik kekerasan (*violence conflict*). Konflik kekerasan kadang disebut juga dengan konflik mematikan (*deadly conflict*) atau konflik bersenjata (*armed*

⁵² Ibid., 13.

⁵³ Ibid., 10.

⁵⁴ Ibid., 13.

conflict). Konflik bersenjata meliputi serangkaian situasi mulai dari penerbangan militer di atas teritorial negara lain (*military overflight*) atau serangan tunggal terhadap penduduk sipil oleh seorang prajurit militer, hingga perang total dengan korban yang masif.⁵⁵

Setelah perang berakhir, konflik mulai memasuki fase de-eskalasi. Penandanya adalah adanya gencatan senjata (*ceasefire*) yang diikuti oleh tercapainya kesepakatan (*agreement*) dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketika dua tahap ini terlewati, maka tahap selanjutnya adalah normalisasi (*normalization*). Normalisasi terjadi pada kondisi pasca perang yang tampak ketika suatu negara memiliki kapasitas untuk melakukan atau mewujudkan hal-hal berikut: mensipilkan politik, keamanan bermasyarakat, budaya kekerasan yang sudah bertransformasi, pengadilan dan polisi yang tidak lagi dipolitisasi, respek terhadap hak-hak individu dan minoritas, penurunan kejahatan yang terorganisir, pemindahan kekuasaan yang damai lewat pemilu yang demokratis, pembangunan masyarakat madani dalam komunitas politik yang terjamin, integrasi yang patut antara politik lokal dan nasional, pembangunan dalam kepentingan warga negara dari semua latar belakang dalam jangka panjang, depolitisasi divisi-divisi sosial, penyembuhan luka psikologis, progres terhadap kesetaraan gender, pendidikan rekonsiliasi jangka panjang, integrasi menuju struktur regional/global yang kooperatif dan pantas.⁵⁶ Sedangkan fase terakhir, rekonsiliasi (*reconciliation*) didefinisikan sebagai pengembalian hubungan yang terputus dan belajar untuk hidup tanpa kekerasan dengan menerima bentuk-bentuk perbedaan (*differences*).⁵⁷

⁵⁵ Ibid., 31.

⁵⁶ Ibid., 222.

⁵⁷ Ibid., 246.

Dilihat dari data-data yang ditemukan, konflik di Thailand Selatan berada pada fase eskalasi dalam Model Hourglass. Lebih tepatnya berada pada tahap kekerasan (*violence*). Namun, karena konflik kekerasan merentang mulai dari kekerasan oleh satu orang bersenjata terhadap warga sipil hingga perang total, yang hanya dibedakan berdasarkan besarnya jumlah korban, perlu diperjelas apakah konflik Thailand Selatan berada pada tahap kekerasan atau sudah memasuki perang. Dilihat dari jumlah korbannya, sejak 2004 hingga 2015 konflik sudah menewaskan lebih dari 6.500 orang, peneliti menggolongkan konflik Thailand Selatan berada pada tahap *violence*.

Ramsbotham menghimpun data konflik bersenjata yang masih berlangsung hingga tahun 2008-2009 dari situs www.systemicpeace.org dan belum menempatkan konflik Thailand Selatan pada tahap perang.⁵⁸ Dari 2014 hingga sekarang, situs tersebut masih mengategorikan konflik Thailand Selatan pada tahap kekerasan (*violence*).⁵⁹ Kolonel Patcharawat Thnaprarnsing dari Royal Thai Army juga mengidentifikasi konflik Thailand Selatan pada tahap kekerasan.⁶⁰ Oleh karena itu, elemen-elemen Model Hourglass yang digunakan di dalam analisis adalah yang terkait dengan fase konflik dari *difference* hingga *violence* semata.

Dalam Model Hourglass, fase konflik pada kolom kedua mempengaruhi bentuk respons apa yang dilakukan oleh pihak yang tengah mengupayakan resolusi konflik. Bentuk respons ini terdapat pada kolom pertama dan ketiga.

⁵⁸ Ibid., 68.

⁵⁹ Monty G. Marshall, Center for Systemic Peace, "Major Episodes of Political Violence 1946-2014," Systemicpeace.org, <http://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm#> (diakses pada 19 April 2016).

⁶⁰ Patcharawat Thnaprarnsing, "Solving the Conflict in Southern Thailand," (Strategy Research Project, Royal Thai Army, 2009), 1.

Kolom pertama dan ketiga memiliki keterhubungan yang kuat. Ada tiga komponen di dalam kolom pertama, yaitu *conflict transformation*, *conflict settlement*, dan *conflict containment*. *Conflict transformation* merujuk pada transformasi mendalam dalam institusi-institusi dan wacana-wacana yang mereproduksi kekerasan, maupun transformasi mendalam dalam pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri serta hubungannya satu sama lain.⁶¹ *Conflict transformation* ini meliputi respons *cultural peacebuilding* dan *structural peacebuilding* yang terdapat pada kolom ketiga.⁶²

Conflict settlement merujuk pada pencapaian kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat mencegah atau mengakhiri konflik bersenjata.⁶³ Keterhubungannya dengan kolom ketiga Model Hourglass adalah bahwa *conflict settlement* dapat disamakan dengan *peacemaking* dalam kolom ketiga yang bentuk konkretnya adalah negosiasi atau mediasi pihak-pihak yang berkonflik agar tercapai kesepakatan.⁶⁴ Sedangkan komponen terakhir kolom pertama Model Hourglass adalah *conflict containment* meliputi *peacekeeping* dan *war limitation*. *Peacekeeping* dimaknai oleh Ramsbotham dengan dua cara: penempatan pasukan bersenjata internasional untuk memisahkan pihak yang berkonflik; dan melakukan tugas-tugas sipil seperti memonitor, menjaga ketertiban, dan menyokong intervensi kemanusiaan.⁶⁵ Sedangkan *war limitation* dapat berupa pembatasan perang secara geografis, peringatan dan pengurangan intensitas perang.⁶⁶ Kedua komponen tersebut, *peacemaking* dan *war limitation*

⁶¹ Oliver Ramsbotham., 31-32.

⁶² Ibid., 14.

⁶³ Ibid., 31.

⁶⁴ Ibid., 14.

⁶⁵ Ibid., 32.

⁶⁶ Ibid., 31.

berada pada kolom ketiga Model Hourglass. Dengan demikian keterhubungan antara kolom pertama dengan kolom ketiga adalah keduanya merupakan pekerjaan komplementaritas atau saling melengkapi.

Selanjutnya adalah keterhubungan antara kolom kedua dengan kolom ketiga Model Hourglass. Ramsbotham melebeli kolom kedua dengan tahap konflik (*stage of conflicts*), sedangkan kolom ketiga adalah respon strategis (*strategic response*) yang dilakukan bergantung pada tahap konflik.⁶⁷ Oleh karena konflik Thailand Selatan berada pada tahap kekerasan, maka respons strategis yang dijadikan alat analisis untuk melihat strategi resolusi konflik OKI adalah yang berkorelasi dengan tahap konflik dari *difference* hingga *violence* saja. Adapun responsnya adalah *cultural peacebuilding*, *structural peacebuilding*, *elite peacemaking*, dan *peacekeeping*.

Untuk memahami respons strategis dari *difference* hingga *violence* tersebut, Ramsbotham memberikan contoh-contoh konkret yang peneliti jadikan sebagai indikator untuk melihat OKI. *Cultural peacebuilding* dilakukan dalam bentuk misi pencarian fakta (*fact finding missions*). Apakah OKI melakukan misi pencarian fakta atau tidak, akan menjadi alat ukur untuk menentukan bagaimana respons OKI untuk memahami *difference* antara pihak-pihak yang berkonflik di Thailand Selatan. Kemudian, *structural peacebuilding* yang dilakukan dalam bentuk pembangunan masyarakat sipil (*civil society development*). Ada atau tidaknya OKI membantu pembangunan masyarakat di Thailand Selatan akan menjadi ukuran untuk menentukan seperti apa respons OKI ketika melihat *contradiction* yang ada di Thailand Selatan. Selanjutnya, *elite peacemaking*

⁶⁷ Ibid., 16.

dilakukan dengan mengirimkan duta khusus dan mediasi resmi (*special envoys and official mediation*) dan melakukan negosiasi (*negotiation*). Di sini akan dilihat, apakah OKI ada mengirimkan duta khusus ke Thailand Selatan, melakukan mediasi resmi, serta bernegosiasi dengan pihak Pemerintah Thailand maupun Kelompok Pemberontak. Hal ini akan menjadi ukuran dalam melihat respons OKI ketika memahami *polarization* yang terjadi di Thailand Selatan. Terakhir, *peacekeeping* dilakukan dengan manajemen dan pengurangan krisis (*crisis management and containment*). Hal ini berguna untuk melihat bagaimana OKI melihat kondisi *violence* di Thailand Selatan.⁶⁸

Ramsbotham menjelaskan bahwa resolusi konflik pada setengah bagian atas dari Model Hourglass –dari *difference* hingga awal *violence* –ditujukan untuk mencegah konflik kekerasan (*preventing violent conflict*).⁶⁹ Keterhubungan Model Hourglass dengan *preventing violent conflict* serta operasionalisasinya untuk melihat strategi resolusi konflik OKI di Thailand Selatan akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

1.7.3. Preventing Violence Conflict

Berdasarkan Model Hourglass, fase konflik dari tahap *difference* hingga tahap *violence* merupakan fase eskalasi konflik yang idealnya direspon oleh pihak yang melakukan resolusi konflik lewat serangkaian tindakan mulai dari *cultural peacebuilding*, *structural peacebuilding*, *peacemaking*, dan *peacekeeping*. Tujuan tindakan-tindakan tersebut adalah untuk pencegahan konflik kekerasan

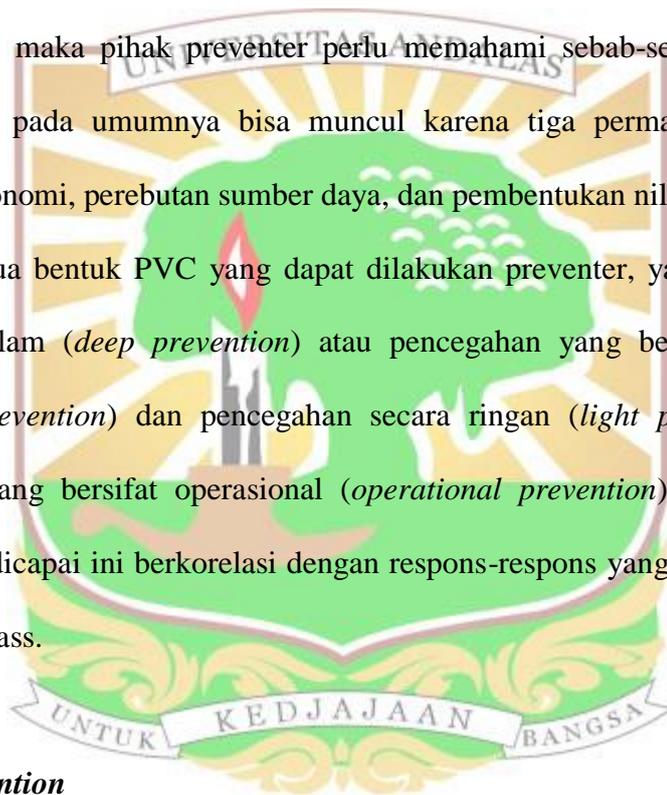
⁶⁸ Ibid., 16.

⁶⁹ Ibid., 15 dan 123.

(*preventing violent conflict*). Pihak yang melakukannya kemudian disebut dengan *preventer*.

Menurut Ramsbotham dkk., *Preventing violence conflict* (PVC) merupakan tujuan dilakukannya resolusi konflik pada tahap awal.⁷⁰ Prinsipnya adalah mencegah konflik bersenjata agar tidak meluas menjadi konflik bersenjata yang baru. PVC bukan dimaksudkan untuk menghindari konflik secara keseluruhan, melainkan untuk menghindari meluasnya konflik kekerasan.⁷¹ Agar PVC tercapai, maka pihak preventer perlu memahami sebab-sebab munculnya konflik, yang pada umumnya bisa muncul karena tiga permasalahan utama: perubahan ekonomi, perebutan sumber daya, dan pembentukan nilai-nilai baru.⁷²

Ada dua bentuk PVC yang dapat dilakukan preventer, yaitu pencegahan secara mendalam (*deep prevention*) atau pencegahan yang bersifat struktural (*structural prevention*) dan pencegahan secara ringan (*light prevention*) atau pencegahan yang bersifat operasional (*operational prevention*).⁷³ Dua sasaran yang hendak dicapai ini berkorelasi dengan respons-respons yang dilakukan pada Model Hourglass.



a. Deep Prevention

Deep prevention adalah pencegahan konflik kekerasan secara mendalam dengan menemukan akar penyebab konflik yang bisa disebabkan oleh persoalan ekonomi, kurangnya akses politik, atau diskriminasi terhadap suatu kelompok. Apabila ada pembangunan ekonomi yang sesuai, institusi sah, dan adanya budaya

⁷⁰ [From the starts, it has been a central purpose of conflict resolution to seek to prevent violent conflict] Oliver Ramsbotham., 123.

⁷¹ Ramsbotham et al., 123.

⁷² Ibid., 126.

⁷³ Ibid., 125.

toleransi, maka perang dapat dicegah.⁷⁴ *Deep Prevention* menekankan pada hubungan dan kepentingan pihak yang berkonflik atas konflik tersebut baik dalam tatanan domestik, regional, atau internasional dengan tujuan mengurangi timbulnya konflik.⁷⁵ Akar konflik di sebuah negara biasanya disebabkan oleh pengelolaan sumber daya yang kurang baik, ideologi negara yang berbeda dengan kultur masyarakatnya, serta hubungan yang kurang baik antara individu atau kelompok dengan komunitas politik negara tersebut. Pada dasarnya, jika ada kesepahaman antara komunitas politik dengan masyarakat, kemudian ketersediaan infrastruktur publik yang memadai, serta adanya nilai-nilai yang bisa diterima oleh masyarakat, sesungguhnya konflik-konflik kekerasan tersebut bisa dihindari. Namun, ketika pemerintahan dijalankan dengan paksaan dan sumber daya dialokasikan dengan tidak merata maka tak jarang konflik kekerasan akan terjadi.⁷⁶

Dari pemaparan Ramsbotham tersebut, ditarik premis bahwa *deep prevention* dimaksudkan untuk mencegah konflik secara mendalam dengan menciptakan tata pemerintahan yang baik untuk semua pihak yang mungkin akan berkonflik. Hal ini membentuk keterhubungan *deep prevention* dengan Model Hourglass, khususnya pada kolom ketiga. Pada kolom ketiga terdapat *cultural peacebuilding* yang dilakukan dengan mengupayakan pencarian fakta. Pencarian fakta secara langsung tentang konflik yang berlangsung sejalan dengan gagasan Ramsbotham bahwa *deep prevention* dilakukan dengan cara mencari akar konflik. Kemudian, *structural peacebuilding* dilakukan dengan mengupayakan pembangunan masyarakat. Hal ini sesuai dengan orientasi *deep prevention*

⁷⁴ Ibid., 125.

⁷⁵ Ibid., 129.

⁷⁶ Ibid., 129.

selanjutnya yaitu menciptakan pemerintahan yang baik untuk semua pihak. Hal ini akan berguna untuk melihat apakah OKI memberikan respons berupa *cultural peacebuilding* dan *structural peacebuilding* ketika memahami *difference* dan *contradiction* pada konflik dengan berorientasi pada pencegahan yang mendalam.

Untuk mengukur apakah orientasi OKI adalah mencegah secara mendalam terulangnya konflik kekerasan di Thailand Selatan adalah dengan menguji indikator yang diberikan oleh Ramsbotham mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh preventer terkait akar permasalahan konflik. Berikut tabel yang akan menjelaskan tindakan yang dapat diambil oleh *preventer* dalam menghadapi sebuah konflik.⁷⁷

Tabel 1.1: *Preventers of Intrastate Conflict*

Factor generating conflict	Possible preventers
<i>State Level</i>	
Ethnic stratification	Power-sharing/federalism/autonomy
Human right abuse	Rule of law, human rights monitoring/protection

Sumber : Ramsbotham, dkk, 2012

Terlihat pada tabel di atas, bagian kiri memaparkan beberapa permasalahan umum suatu negara dan bagian kanan merupakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat disarankan oleh para *preventer*. Pada permasalahan etnis, *preventer* bisa menyarankan antara pihak yang berkonflik untuk mendapatkan kuasa yang sama dan berimbang. Tidak ada pihak yang mendominasi antara kelompok tersebut sehingga tercipta suatu pembagian kekuasaan (*power-sharing*). Atau juga bisa pemerintah memberikan otonomi

⁷⁷ Ibid., 133.

khusus kepada daerah yang berkonflik. Dan faktor umum yang terakhir adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok tertentu. Disini, upaya yang bisa dilakukan oleh pihak *preventer* adalah membantu membentuk hukum tertentu, serta memonitor dan melindungi hak asasi kelompok tersebut.

b. *Light Prevention*

Light Prevention merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan ketika konflik sedang mendekati konflik kekerasan dengan melakukan mediasi dan manajemen krisis.⁷⁸ *Light prevention* sering juga disebut dengan “*preventive diplomacy*” sebab dalam pelaksanaannya *preventer* menyelenggarakan usaha diplomasi, baik itu secara resmi seperti: mediasi, konsiliasi, mengadakan konferensi, serta membentuk pusat pencegahan konflik, maupun secara tidak resmi yang meliputi mediasi secara pribadi dan mengadakan dialog tertutup.⁷⁹

Keterhubungan *light prevention* dengan Model Hourglass dapat dilihat dari kesesuaian bentuk respons pada model tersebut dengan tindakan-tindakan yang mungkin diambil oleh *preventer* agar *light prevention* tercapai. *Elite peacemaking* yang ditunjukkan oleh pengiriman duta khusus, mediasi, dan negosiasi, sesuai dengan upaya diplomasi *preventer* dalam *light prevention*. Sedangkan *peacekeeping* yang bertujuan untuk memonitoring konflik berkorelasi dengan upaya manajemen krisis yang diupayakan *preventer* dalam *light prevention*.

Komponen *light prevention* di atas berguna untuk melihat apakah dalam merespons konflik Thailand Selatan dengan *elite peacemaking* dan *peacekeeping*,

⁷⁸ Ibid., 125.

⁷⁹ Ibid., 135.

OKI bermaksud pula untuk mencegah secara ringan konflik kekerasan di Thailand Selatan tidak terulang kembali.

Dalam pelaksanaannya, baik *deep prevention* maupun *light prevention* bisa tercapai ataupun tidak. Apabila *deep prevention* berhasil dicapai, maka perdamaian konflik yang terjadi pun akan mengalami penurunan dan mengarah ke kondisi yang damai. Jika gagal, konflik pun akan semakin meluas. Sedangkan *light prevention* apabila tercapai akan mampu menghindari konflik bersenjata yang baru dan lebih masif, namun jika gagal dicapai, akan terjadi konflik bersenjata yang baru.⁸⁰

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁸¹

1.8.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya melihat tindakan-tindakan atau upaya yang dilakukan oleh OKI terkait dengan konflik Thailand Selatan dari tahun 2005 hingga 2015. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, tahun 2005 menjadi awal bagi upaya panjang OKI dalam

⁸⁰ Ibid., 144.

⁸¹ Steven J. Taylor dan Robert Bogdan, *Introduction to Qualitative Research: Research Methods: the Search for Meaning* (New York: Wiley & Sons Inc. , 1984), 5.

menyelesaikan konflik Thailand Selatan dengan mengundang kedua belah pihak yang berkonflik.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis (variabel dependen) merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dan dianalisis. Variabel ini merupakan akibat dari kekuatan dan pengaruh dari variabel lain.⁸² Variabel yang dapat mempengaruhi unit analisa (variabel dependen) disebut sebagai unit eksplanasi (variabel independen). Variabel independen lebih dahulu terjadi daripada variabel dependen. Secara umum variabel independen disebut sebagai variabel penyebab dan variabel dependen sebagai variabel akibat.⁸³ Tingkat analisis merupakan area dimana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisis dalam studi hubungan internasional membantu di tingkat mana analisis dalam penelitian ini akan ditekankan.⁸⁴ Dari penjelasan tersebut, yang menjadi unit analisisnya adalah strategi resolusi konflik Organisasi Kerjasama Internasional (OKI) dan unit eksplanasinya adalah dinamika konflik Thailand Selatan. Sedangkan tingkat analisisnya adalah negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan tidak kaku.⁸⁵ Di dalam penelitian kualitatif, tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dianggap sebagai pekerjaan yang berkesinambungan dan dilakukan

⁸²Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3E, 2008), 108.

⁸³ Ibid., 108

⁸⁴ Ibid., 35

⁸⁵ Emy Susanti Hendrarso, 168-169.

secara bersamaan sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Peneliti tidak harus menunggu seluruh data terkumpul baru kemudian diolah dan dianalisis. Melainkan data dapat diolah dan dianalisis selagi data masih dikumpulkan. Peneliti dapat mengumpulkan data lebih banyak lagi di tengah pengolahan dan analisis data sesuai dengan kebutuhan.⁸⁶

Terdapat tiga bentuk umum pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu: 1) Melakukan wawancara mendalam dan terbuka. Di sini data dapat berupa kutipan-kutipan. 2) Melakukan observasi langsung, yaitu dengan mengamati langsung tingkah laku objek penelitian. 3) Menelaah dokumen tertulis. Di sini data dapat berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan dari catatan-catatan organisasi, klinis, atau program; atau berupa memorandum dan korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survei.⁸⁷

Dalam penelitian ini, data yang berhasil ditemukan berupa dokumen tertulis baik itu data primer maupun data sekunder. Adapun data primer, berupa *Press Release*, Piagam OKI, dan Resolusi-resolusi yang dikeluarkan OKI terkait dengan konflik Thailand Selatan. Sedangkan data sekunder, berupa hasil penelitian orang lain, buku, dan berita-berita baik dari Thailand, maupun Thailand Selatan.

Data juga dapat diolah dengan mengklasifikasikan atau mengategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian.⁸⁸ Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan data-data tentang OKI, mulai profil mendalam OKI,

⁸⁶ Ibid., 172.

⁸⁷ Dede Oetomo, "Penelitian Kualitatif: Aliran dan Tema" dalam Bagong Suyanto dan Sutinah, 186.

⁸⁸ Emy Susanti Hendrarso, 173.

keterlibatan OKI dalam resolusi konflik, dan terakhir melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OKI dalam penyelesaian konflik Thailand Selatan. Di sini peneliti dibantu oleh konsep dan model yang digunakan dalam melihat strategi resolusi konflik OKI di Thailand Selatan dengan mengelompokkannya, apakah OKI melakukan *preventing*. Jika OKI memang benar melakukan *preventing*, maka jenis apakah *preventing* tersebut: *deep prevention* atau *light prevention*.

Setelah diolah dan dianalisis, penulis dapat menyajikan data hingga tercapai suatu premis umum, sesuai dengan logika induktif, mengenai apa yang telah dilakukan oleh OKI. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya berbentuk uraian kata-kata atau deskripsi.⁸⁹

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian.

BAB II Pemetaan dan Analisis Fase Konflik Thailand Selatan

Bab ini berisi pengetahuan-pengetahuan yang menjelaskan eskalasi konflik Thailand Selatan.

BAB III Kerangka Kerja Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Resolusi Konflik Thailand Selatan

⁸⁹ Ibid., 173.

Bab ini berisi deskripsi pengetahuan mengenai OKI sebagai organisasi internasional, yang meliputi kerangka pencegahan konflik yang mereka adopsi serta bentuk mekanisme operasional resolusi konflik OKI.

BAB IV Analisis Strategi Resolusi Konflik OKI di Thailand

Bab ini berisi pemaparan dan analisis data mengenai strategi resolusi konflik yang dilakukan OKI di Thailand Selatan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

PEMETAAN DAN ANALISIS FASE KONFLIK THAILAND SELATAN

2.1. Pentingnya Resolusi Konflik di Thailand Selatan

Konflik kekerasan yang terjadi pada tahun 2004, menjadi puncak bagi konflik yang ada di Thailand Selatan sebab dalam peristiwa ini banyak memakan korban jiwa dan korban luka-luka. Akibatnya, konflik ini disebut juga sebagai konflik mematikan (*deadly conflict*). Oleh sebab itu, untuk menyelesaikannya, dibutuhkan penyelesaian Model Hourglass yang dianggap mampu menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk resolusi konflik apa yang akan dilakukan.

Bab ini memaparkan pemetaan dan analisis fase konflik yang terjadi di Thailand Selatan. Pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui jenis konflik apa yang terjadi di Thailand Selatan, bagaimana konflik tersebut bisa terjadi, siapa pihak yang terlibat dan apa yang menjadi tujuan dari pihak-pihak tersebut. Sedangkan analisis fase konflik dimaksudkan untuk mengetahui tahapan-tahapan konflik mulai apakah mengalami peningkatan (eskalasi), mencapai puncak, atau sudah mengalami penurunan (de-eskalasi).

Paul Wehr menyebutkan bahwa tujuan dari pemetaan konflik adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai asal-usul, kondisi alamiah, dan dinamika konflik serta kemungkinan yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik.⁹⁰ Memahami dinamika atau fase konflik serta tindakan yang telah dan/atau akan dilakukan untuk menyelesaikan konflik dapat dianalisis dengan menggunakan Model Hourglass yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

⁹⁰Paul Wehr, *Conflict Regulation* (Boulder: Westview Press, 1979), 18.

Dalam Model Hourglass dijelaskan beberapa fase konflik mulai dari adanya *difference*, yaitu ketika ada perbedaan nilai dan struktur sosial di dalam masyarakat. Kemudian *contradiction*, yaitu ketika perbedaan tersebut membuat pihak-pihak yang memiliki tujuan yang berbeda menjadi berkonflik. Selanjutnya pertentangan tersebut makin jelas dalam tahap *polarization* ketika pihak-pihak yang berkonflik membentuk kelompok-kelompok dan memperjuangkan tujuan masing-masing. Hingga diambilnya langkah-langkah kekerasan (*violence*) yang dapat memicu perang (*war*) oleh pihak yang terlibat.⁹¹ Fase-fase inilah yang nantinya akan dianalisis dalam konflik Thailand Selatan setelah dipaparkan terlebih dahulu latar belakang konflik tersebut.

2.2. Latar Belakang Konflik Thailand Selatan

Konflik Thailand Selatan terjadi antara Pemerintah Thailand dengan kelompok pemberontak Muslim Melayu yang berbasis di wilayah selatan Thailand atau Pattani. Konflik terjadi di wilayah Pattani yang telah dipecah menjadi empat provinsi, yaitu: Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla. Konflik kekerasan terjadi sejak tahun 2004 yang ditandai oleh dua insiden, yaitu: pembantaian terhadap masyarakat Pattani yang terjadi di Masjid Krue Se di Pattani dan insiden mematikan berupa pengeboman di Tak Bai, Narathiwat. Namun, secara historis, akar konflik sudah terlihat ketika Kesultanan Pattani dijadikan wilayah Kerajaan Siam melalui Traktat Anglo-Siam tahun 1902. Dua kerajaan dengan budaya, etnis, bahasa, dan agama masyarakat yang berbeda ini masih belum bisa untuk menerima satu sama lain sehingga hingga hari ini

⁹¹ Ramsbotham et al., 13.

perbedaan tersebut masih menjadi alasan penggunaan kekerasan oleh kedua belah pihak.

2.2.1. Deskripsi Mengenai Thailand Selatan

Kerajaan Thailand merupakan salah satu negara berdaulat yang penting di Asia Tenggara. Secara geografis, Thailand terletak di Asia Daratan (*mainland*) yang diapit oleh Teluk Thailand di sebelah timur dan Selat Malaka di sebelah barat. Sebelah utara, Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar, sementara sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Dengan luas wilayah mencapai 514.000 km, Thailand dibagi ke dalam lima kondisi geografis:⁹²

- a) Thailand Utara: tanah pegunungan Thai di utara yang berbatasan dengan Myanmar yang mana ketinggian wilayah ini berangsur menurun ke selatan. Salah satu kota terkenalnya adalah Chiang Mai.
- b) Thailand Tengah: dataran rendah yang datar tempat kota-kota utama seperti Bangkok, Nonthaburi, dan SamutPrakan. Wilayah tengah didominasi oleh lembah Sungai ChaoPhraya yang mengalir ke Teluk Thailand.
- c) Thailand Timur Laut: wilayah dataran pipih gunung berbentuk cekung. Wilayah ini terdiri dari Hampanan Khorat yang mana batas sebelah timurnya adalah Sungai Mekong. Kota-kota pentingnya adalah Buriram, NakhonRatchasima, dan UdonThani.
- d) Thailand Timur yang terdiri dari Provinsi Chachoengsao.

⁹² Hassan Shadili, *Ensiklopedi Indonesia*, Edisi khusus, Vol. 6 (Jakarta: PT. IchtiarBaru-VanHoeve, 1984), 3531. Lihat juga, Find the Data, "Thailand," FindTheData.com, <http://country-facts.findthedata.com/1/134/Thailand> (diakses pada 8 Februari 2016).

- e) Thailand Selatan: wilayah yang membentang dari Tanah Genting Kra yang terus melebar ke selatan menuju Semenanjung Malaysia.

Empat provinsi paling selatan di Thailand Selatan, yaitu Songkhla, Pattani, Yala, dan Narathiwat, menjadi area terjadinya konflik kekerasan antara pemberontak Pattani dengan Pemerintah Thailand. Kecuali Pattani, wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah selatan. Sementara itu, kecuali Yala, wilayah tersebut berbatasan dengan Teluk Siam di sebelah timur. Jika dilihat dari sejarahnya, wilayah Thailand Selatan yang sedang bergejolak ini dulunya adalah wilayah dari sebuah kerajaan merdeka bernama Kesultanan Melayu Pattani. Sehingga wilayah Thailand Selatan sering juga disebut dengan wilayah Pattani saja.

2.2.2. Akar Historis Konflik Thailand Selatan

Akar historis konflik Thailand Selatan dapat ditelusuri kembali pada awal abad kedua puluh ketika Kesultanan Melayu Pattani secara paksa dijadikan bagian dari kekuasaan Kerajaan Siam melalui Traktat Anglo-Siam pada tahun 1902. Penguasaan Pattani oleh Siam merupakan akibat dari melemahnya Kesultanan Pattani yang sudah berdiri selama berabad-abad.

Menurut ahli sejarah Thailand, Andries Teeuw dan David K. Wyatt, Kesultanan Pattani telah berdiri sejak pertengahan abad ke-14 dan ke-15.⁹³ Rekam sejarah menunjukkan, Pattani dulunya merupakan salah satu kesultanan yang penting dalam pertumbuhan perdagangan dan penyebaran agama Islam bagi Bangsa Melayu. Ketika itu, Pattani merupakan satu-satunya kota pelabuhan pusat

⁹³Andries Teeuw dan David K. Wyatt, *Hikayat Pattani The Story of Pattani: Bibliotheca Indonesica* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1970), 3.

perdagangan Islam yang berpengaruh di sekitar perairan Laut Tiongkok Selatan.⁹⁴ Perkembangan Pattani sejalan dengan pesatnya perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Terlebih lagi, Pattani menempati wilayah yang strategis, yaitu berada dalam pertengahan jalur lalu lintas perdagangan antara negeri Melayu dengan negeri Asia Timur, dan di antara jalur perdagangan Selat Malaka dengan Laut Tiongkok Selatan dan Laut Sulu di Filipina.⁹⁵

Pattani juga memiliki kedudukan yang cukup penting dalam proses Islamisasi Melayu. Perkembangan Islam di Pattani banyak dipengaruhi oleh perkembangan Islam di Tiongkok, karena kuatnya hubungan perdagangan di antara keduanya. Kemudian, barulah penyebaran agama Islam di lanjutkan oleh para pedagang Arab dan India.⁹⁶

Para pedagang Arab dan India yang banyak membawa komoditas tekstil menjadikan Pattani sebagai tumpuan dagang. Hasil dari perdagangan tersebut kemudian dijual kembali bersamaan dengan hasil bumi Pattani sendiri, seperti lada hitam, emas dan beberapa bahan makanan.⁹⁷ Di samping makmur karena berdagang, Pattani juga dinilai berhasil mencapai kestabilan politik dalam negeri sehingga dihormati oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Pahang, Johor Baru, dan Ayudhya.⁹⁸ Namun, kegemilangan Pattani dengan cepat mulai menurun. Kemakmuran Pattani ternyata menarik minat penjajah Eropa, seperti Portugis

⁹⁴ Auni bin Haji Abdullah, *Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu* (Kuala Lumpur: DarulFikir Sdn.Bhd, 2001), 298.

⁹⁵ Abdullah., 300.

⁹⁶ Andries Teeuw dan David K. Wyatt., 4

⁹⁷ P. Rudolf Yuniarto, "Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atau Dominasi "Nasional" Thailand", (Paper, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004), 4

⁹⁸ Ibid., 23

(1517) dan Belanda (1602) untuk menguasai perdagangan di Pattani, terutama guna memperoleh rempah-rempah, lada hitam, serta emas.⁹⁹

Situasi Pattani makin diperparah karena kestabilan politik yang sudah mereka capai, dengan cepat jatuh ke dalam kekacauan. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya pengganti yang berwibawa sepeninggal Raja Kuning (1635-1688). Kondisi ini membuat Pattani menjadi mudah dikuasai oleh dinasti lain yaitu Dinasti Kelantan. Pada masa inilah mulai adanya perselisihan kekuasaan hingga perang saudara pun tidak terelakkan. Akibat dari perang ini, para saudagar yang awalnya meletakkan pola perniagaan mereka di Pattani, mulai berangsur-angsur pindah ke wilayah Singapura dan Malaka. Dan akibatnya, perekonomian Pattani mengalami kemerosotan yang tajam.¹⁰⁰

Ketika Pattani jatuh ke dalam kekacauan politik, Kerajaan Siam (Ayudhya atau Thailand lama) yang saat itu sedang mengalami peperangan dengan Burma (sekarang Myanmar), menjadikan Pattani sebagai salah satu wilayah rebutan mereka. Pada akhirnya yang dapat menguasai wilayah Pattani adalah Siam. Pada tahun 1776, Phya Taksin, Raja Siam, mengambil paksa Kesultanan Pattani sehingga perang dengan wilayah Pattani pun tidak terelakkan. Pada tahun 1778, Pattani menderita kekalahan sehingga terpaksa menjadi bagian dari Kerajaan Siam. Sekitar 4.000 masyarakat Pattani di bawa ke Bangkok sebagai tawanan dan sejak masa inilah mulai munculnya tindakan pemberontakan anti-Siam.¹⁰¹

Keberadaan Pattani semakin terpojok, ketika pada tahun 1826, penaklukan Siam terhadap Pattani mendapat dukungan dari Inggris. Kerjaan Siam

⁹⁹ P. Rudolf Yuniarto, "Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atau Dominasi "Nasional" Thailand", 4.

¹⁰⁰ Andries Teeuw dan David K. Wyatt., 72.

¹⁰¹ Yuniarto, "Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atau Dominasi "Nasional" Thailand".,8

mengadakan perjanjian dengan Inggris tentang pembagian wilayah yang memperburuk keadaan Pattani. Siam ingin membendung arus imperialis yang dilancarkan oleh negara-negara Eropa terhadap wilayah Semenanjung. Sementara Inggris, sudah menguasai Semenanjung bagian selatan Pattani yaitu: Kelantan, Trengganu, Perlis dan Kedah. Daerah ini dianggap memiliki potensi ekonomi sebagai pelabuhan penting pangkalan perang Inggris di Asia.¹⁰²

Agar dapat menguasai keempat wilayah tersebut, Inggris berdiplomasi dengan Siam dengan mengakui kedaulatan Siam terhadap Pattani dan mengembalikan segala persoalan yang menyangkut hak ekstra teritorial wilayah dan kenegaraan kepada Siam. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Anglo-Siam tahun 1902.¹⁰³ Dengan terbentuknya kesepakatan Anglo-Siam, sistem pemerintahan kesultanan Melayu mulai dihapuskan.¹⁰⁴ Wilayah Pattani kemudian dianggap sebagai wilayah hasil penaklukan Bangsa Thai. Traktat ini juga yang di kemudian hari menjadi landasan historis konflik Thailand Selatan.¹⁰⁵

Traktat juga memperkuat posisi Siam dalam penguasaan Pattani yang sebelumnya juga telah berusaha untuk menerapkan hukum sekuler sebagai pengganti hukum syariat Islam. Masyarakat Muslim Pattani berusaha melakukan protes massal dan meminta bantuan Inggris yang berada di Singapura untuk menghalangi upaya ini. Namun, hal tersebut menuai kegagalan. Bahkan para penguasa Melayu secara resmi diberhentikan.¹⁰⁶

¹⁰² Yuniarto, "Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atau Dominasi "Nasional" Thailand", 11

¹⁰³ Ibid., 10-11.

¹⁰⁴ Ibrahim., 141.

¹⁰⁵ P. Rudolf Yuniarto, "Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 7, No. 1 (Jakarta, 2005), 91.

¹⁰⁶ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, terj. Eva Y.N. dkk, Vol. 6. (Bandung: Mizan, 1995), 231.

2.3. Fase Perbedaan: Siamisasi Pasca Traktat Anglo-Siam

Merujuk kepada Model Hourglass oleh Ramsbotham, dkk., setiap konflik mematikan (*deadly conflict*), mengalami beberapa fase peningkatan (eskalasi) sebelum meletus menjadi konflik kekerasan (*violent conflict*) yang dapat berubah menjadi peperangan (*war*). Fase tersebut dimulai dari adanya perbedaan (*difference*) nilai dan struktur sosial antara satu kelompok dengan kelompok lain. Hal ini juga terjadi dalam konflik Thailand Selatan.

Berbeda dengan mayoritas masyarakat Thailand etnis Thai yang beragama Buddha, umumnya wilayah bagian selatan dihuni oleh masyarakat etnis Melayu yang beragama Islam. Kuat dan kentalnya kultur Melayu di bagian selatan, membuat cara hidup, budaya, agama, serta tradisi penduduk selatan Thailand berbeda dengan penduduk Thailand pada umumnya.¹⁰⁷

Perbedaan etnis ataupun agama tidak akan menjadi masalah apabila kedua kelompok dapat untuk hidup bersama tanpa adanya diskriminasi (kondisi ko-eksistensi). Namun, perbedaan akan menjadi masalah ketika satu pihak berupaya memaksakan suatu nilai terhadap kelompok lain untuk menghilangkan perbedaan yang telah ada. Sebagian dapat menanggapi hal tersebut dengan menerima, tetapi sebagian akan menganggapnya sebagai bentuk penghilangan identitas. Hal inilah yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat etnis Melayu-Muslim di Thailand Selatan ketika Pemerintah Thailand berusaha untuk mengintegrasikan mereka ke dalam struktur sosial masyarakat Thailand. Proses tersebut dimulai sejak berlakunya Traktat Anglo-Siam tahun 1902.

¹⁰⁷Desy Arisandy, "Diplomasi Thailand-Malaysia dalam Mengatasi Gerakan Separatis di Thailand Selatan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012), 24.

Sebagai kelompok minoritas yang memiliki identitas Islam, masyarakat muslim Pattani dihadapkan dengan proses ‘siamisasi’ (*Siamization*) atau upaya mengasimilasikan masyarakat Muslim Melayu di Pattani dengan masyarakat Thai yang beragama Buddha.¹⁰⁸ Dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Siam, Siamisasi ditandai oleh tiga hal, yaitu: 1) Penggabungan secara administratif wilayah Pattani ke dalam sistem pemerintahan Thailand; 2) Penghapusan hukum syariat Islam dan hukum adat Melayu; dan 3) Penggantian penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa Thai.

Dalam proses penggabungan wilayah Pattani ke dalam sistem administrasi Siam (Thailand) pada tahun 1902 bukan hanya tindakan politik yang disentralisasikan ke Bangkok, tetapi Kerajaan Thailand dinilai telah menghancurkan struktur sosial masyarakat Islam dengan menyebarkan nilai-nilai Buddhisme. Kerugian lain yang dirasakan oleh masyarakat Pattani adalah dihapuskannya hukum syariat dan hukum adat Melayu yang sudah lama menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keberadaan lembaga yang sangat penting bagi masyarakat, yaitu masjid dan pondok (sekolah agama tradisional) juga terancam karena proses Siamisasi. Hal ini merugikan masyarakat Pattani karena fungsi masjid bagi mereka tidak hanya sebagai tempat praktek keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan dan administrasi. Sementara itu, pondok berfungsi sebagai tempat belajar bagi masyarakat.¹⁰⁹

Penghapusan hukum syariat di wilayah Pattani merupakan hasil dari pelaksanaan undang-undang Thailand yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat

¹⁰⁸ Sunu Wibirama, “Geliat Islam di Thailand,” Wibirama.com <http://wibirama.com/2009/02/23/sunu-wibirama-geliat-islam-di-thailand/> (Diakses pada 27 Februari 2016)

¹⁰⁹ Thanet Aphornsuvan, “History and Politics of the Muslim in Thailand”, (Paper, Thammasat University, 2003), 15.

yang absolut. Hukum-hukum di Pattani mengalami reformasi, dari penggunaan hukum Islam menjadi hukum sekuler Thailand, kecuali untuk kasus keluarga dan warisan. Namun, pelaksanaan hukum keluarga dan warisan pun juga sudah dicerai dengan masuknya hukum Thailand. Hakim muslim yang mengurus dan memutuskan perkara pada dua hal tersebut dianggap belum final keputusannya sebelum disetujui oleh hakim Thailand. Pada saat kasus telah naik menuju pengadilan tinggi, mereka harus menerima keputusan hakim Thailand yang bukan Muslim. Penetapan hukum sekuler dan penghapusan hukum syariat dianggap telah mengecilkan peran ulama. Akibatnya, pemberontakan terhadap pusat kekuasaan di Bangkok akibat Siamisasi ini mulai bermunculan pada tahun 1910 hingga 1920 yang dipimpin oleh para ulama.¹¹⁰

Selanjutnya, sekitar tahun 1921 mulai diberlakukannya peraturan pendidikan rendah, dimana anak-anak muslim diwajibkan untuk masuk sekolah negeri Thailand. Dalam sekolah tersebut, mata pelajarannya berorientasi pada mata pelajaran sekuler bahkan Buddhisme. Bahasa Thailand dijadikan sebagai bahasa pengantar sehari-hari yang membuat penggunaan bahasa Melayu secara perlahan mulai berkurang. Hal ini menuai tanggapan langsung dari masyarakat muslim dengan enggan mengirim anak-anak mereka untuk masuk sekolah.¹¹¹ Kebijakan dari pemerintah Thailand ini menimbulkan pergolakan kembali pada tahun 1922 yang melibatkan beberapa pemimpin agama dan kaum bangsawan Melayu yang termasuk mantan raja Pattani, yakni Raja Abdul Kadir. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk kemerdekaan Pattani.¹¹²

¹¹⁰ Sunu Wibirama.,

¹¹¹ Laili Maftukhah, "Gerakan Pembebasan Pattani di Thailand Selatan pada Tahun 1973-1982", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011), 25

¹¹² Aphornsuvan., 17.

Kebijakan Siamisasi yang dikeluarkan oleh Thailand terbukti tidak diterima oleh masyarakat Pattani. Hal ini ditunjukkan oleh pergolakan dan pemberontakan yang dipimpin oleh pemimpin agama dan kaum bangsawan Melayu. Hal ini dilihat oleh Pemerintah Thailand sebagai hambatan. Namun, karena ketegangan antara pemerintah dengan masyarakat Melayu-Muslim masih dalam batasan wajar, pemerintah pun lebih memilih langkah damai untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian lebih berorientasi kepada membangun pemahaman budaya.

Jika dilihat dari Model Hourglass, pada tahapan ini Pemerintah Thailand melakukan resolusi konflik yang disebut dengan pembangunan perdamaian berbasis kultural (*cultural peacebuilding*). Pembangunan perdamaian dilakukan sejak tahun 1923 oleh Pemerintah Thailand dengan meninjau ulang kebijakan mengenai pendidikan wajib, penetrasi birokrasi dan keterlibatan sosial, serta ekonomi Melayu-Muslim.¹¹³ Pemerintah pusat mengambil jalan kompromi dengan sedikit melonggarkan berbagai kebijakan sosial dan budayanya terhadap masyarakat muslim Pattani. Sehingga wilayah Pattani kembali stabil secara politik, setidaknya hingga tahun 1930an.¹¹⁴

2.4. Fase Kontradiksi: Siamisasi Pasca Revolusi Siam 1932

Fase kontradiksi merupakan kelanjutan dari fase perbedaan. Fase ini muncul apabila resolusi konflik yang dilakukan pada fase pertama, yaitu pembangunan perdamaian berbasis kultural gagal dilakukan. Fase kontradiksi yaitu ketika pihak-pihak yang berbeda secara nilai dan struktur tersebut memiliki

¹¹³ Ibid., 17.

¹¹⁴ Laili Maftukhah., 26

tujuan yang saling berseberangan. Dengan kata lain, ada benturan nilai dan sikap kedua belah pihak.

Dalam kasus Thailand Selatan, perbedaan tersebut diperjelas ketika Thailand tetap berusaha melakukan Siamisasi terhadap Pattani. Kontradiksinya terlihat dari benturan nilai dan sikap antara kedua belah pihak. Di satu sisi, Thailand tengah berupaya membangun sebuah negara modern berbasis kesatuan (*unitary state*). Untuk mencapai hal itu, seluruh elemen masyarakat yang berada di bawah kekuasaan Thailand harus berada di dalam satu kerangka yang sama. Namun, masyarakat Pattani tidak bisa menerima jika mereka harus berada di bawah kekuasaan Thailand. Terlebih lagi jika kebudayaan asal mereka yang berbasis kepada kultur Melayu dan agama Islam, harus dihilangkan.

Fase kontradiksi mulai terlihat pada tahun 1930an, di mana pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan untuk membagi wilayah Pattani menjadi tiga provinsi, yakni: Pattani (Patani), Yala (Jala), dan Narathiwat (Menara). Dengan begitu, setiap provinsi berada di bawah pengawasan dan tinjauan langsung pemerintahan pusat kerajaan di Bangkok. Pemerintah Thailand memperkenalkan sistem baru dimana setiap provinsi diharuskan memiliki seorang wakil di DPR, dan untuk wilayah Thailand Selatan wakil rakyat yang beragama Islam selalu menjadi Majelis Perundangan Siam.¹¹⁵

Pada tahun 1932, terjadi Revolusi Siam yang mempengaruhi perkembangan politik di Thailand. Revolusi Siam merupakan revolusi yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan absolut raja dengan membentuk suatu

¹¹⁵ Yasril Yazid, "Konflik Minoritas Melayu dan Militer Thailand: Analisis terhadap Krisis Politik di Selatan Thailand", (Paper, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2009), 4-5

konstitusi. Dengan begitu, seperti negara monarki modern lainnya, Thailand menjadi sebuah negara modern.

Di bawah corak pemerintahan yang baru, Kerajaan Thailand menegaskan bahwa pembentukan negara Thai modern bertujuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan (*unitary state*) yang artinya rakyat tidak lagi berada dibawah pemerintahan monarki mutlak, melainkan rakyat sebagai warga negara (*citizenry*). Akibat kebijakan dari kerajaan Thailand ini, masyarakat Melayu di Pattani juga menjadi bagian dari warga Thailand dan mereka juga harus menonjolkan identitas baru sebagai warga negara baru Thailand.¹¹⁶

Pada tahun 1938, seorang Jenderal Militer Thailand, Plaek Phibunsongkhram mengudeta pimpinan kerajaan Thailand. Pemerintahan Phibunsongkhram (1938-1944) mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversi. Salah satunya adalah kebijakan *rathniyom* (revolusi budaya), yang mana tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan suatu identitas budaya Thai yang maju. Kebijakan ini ternyata mencoba “mensiamkan” masyarakat yang bukan etnis Thai (*siamization policy*) seperti masyarakat Melayu dan Tiongkok. Salah satunya adalah dengan mengharuskan masyarakat Melayu dan Tiongkok untuk menukar nama asal mereka menjadi nama Thai dan berkomunikasi menggunakan bahasa Thai.¹¹⁷ Kemudian, dalam menerapkan identitas nasional Thailand, Phibunsongkhram menggunakan simbol trinitas (*lak thai*) yang hanya mengakui satu kebangsaan bangsa Thai, satu agama yakni agama Budhha, dan tunduk pada kekuasaan Raja.¹¹⁸ Jika dilihat dari dimensi sosial budaya, identitas

¹¹⁶ Yazid., 5.

¹¹⁷ Ibid., 5.

¹¹⁸ Reza Sihbudi, “Problema minoritas Muslim di Asia Tenggara Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya,” *Seri Penelitian PPW-LIPI*, No. 06 (2000), 45.

seperti ini merupakan sebuah bentuk pemaksaan ideologi yang dapat merenggut masyarakat muslim Melayu Pattani dari tradisi dan identitasnya.¹¹⁹

Siamisasi kedua yang dilakukan Phibun Songkhram lebih terstruktur dibandingkan proses siamisasi sebelumnya meskipun dengan tujuan yang masih sama. Phibun Songkhram menghapus pengadilan agama yang menangani kasus-kasus keagamaan di daerah Pattani dan mengalihkan kasus yang berkaitan dengan keagamaan Islam ke mahkamah sipil Thailand.¹²⁰ Dia juga mengonsolidasikan administrasi yang dirancang untuk mengintegrasikan wilayah bangsa Melayu ke dalam sistem politik nasional Kerajaan Siam yang di pusatkan di Bangkok. Seiring dengan kebijakan ini, pemerintah juga melakukan kebijakan integrasi ekonomi yang mana provinsi harus membiayai pemerintahannya sendiri tanpa menjadi beban bagi kerajaan.¹²¹

Dilihat dari fase konflik dalam Model Hourglass, segala bentuk penyatuan yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand terhadap etnis Melayu-Muslim justru menimbulkan kontradiksi-kontradiksi yang tidak dapat diterima oleh etnis Melayu-Muslim. Sehingga hal tersebut menimbulkan reaksi dari Melayu-Muslim.

Momentum yang dimanfaatkan oleh Melayu-Muslim adalah melirik bantuan Inggris pada saat Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Dunia Kedua, Pemerintahan Phibun Songkhram membantu pendudukan Jepang di Asia Tenggara. Akibatnya, Thailand harus berkonfrontasi dengan Inggris. Melihat peluang ini, pemimpin masyarakat Melayu Pattani menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapat simpati Inggris dengan cara menunjukkan kesetiaan

¹¹⁹ Yuniarto, *Integritas Muslim Patani.*, 12.

¹²⁰ D.W. Forbes, *The Muslim of Thailand*, Vol. 2 (Bihar: Centre for Southeast Asian Studies, 1989), 157.

¹²¹ Yuniarto, *Integritas Muslim Patani.*, 12.

kepada Inggris dan membantu tentara Inggris untuk mengalahkan tentara Jepang. Salah satu tokoh Melayu Pattani yang membantu perlawanan Inggris saat itu adalah Tengku Mahmud Mahyidden. Namun, Jepang akhirnya mampu menduduki wilayah Malaya yang dikuasai oleh Inggris sehingga berimbas terhadap masyarakat Pattani. Mahyidden kemudian melarikan diri ke India bersama tentara Inggris.¹²²

Di akhir Perang Dunia Kedua, ketika Jepang mengalami kekalahan dan Inggris kembali menguasai wilayah Malaya, Inggris melihat pentingnya membentuk suatu badan pengawasan internasional di perbatasan Siam-Malaya, mulai dari daerah Tanah Genting Kra hingga negeri Melayu Utara yang berada di bawah pemerintahan Thailand pada masa Perang Dunia ke-II. Dengan sikap loyal yang ditunjukkan oleh Pattani dalam melawan Jepang, Inggris mulai mempertimbangkan kedudukan Pattani dibawah Inggris Malaya secara serius.¹²³

Gerakan pro-kemerdekaan yang ditunjukkan Inggris terhadap Pattani mengundang keresahan untuk pemerintah Thailand, sehingga pada Juli 1944, Kerajaan Thailand melalui Gubernur Pattani yakni Janyawisat mengadakan pertemuan Majelis Pemilu di Pattani untuk membahas keinginan Melayu Pattani yang ingin bergabung dengan pemerintahan Inggris. Seiringan dengan pertemuan tersebut, Deklarasi Persidangan Cairo 1945 memutuskan resolusi tentang larangan penjajahan wilayah asing, sehingga keinginan Inggris untuk mengambil alih wilayah Thailand Selatan menjadi hilang.¹²⁴

¹²² Clive J. Christie, *A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism and Separatism*, (London: Tauris Academic Studies and Singapore, 1996), 178.

¹²³ Yazid., 6.

¹²⁴ Ibid., 7

Masyarakat Muslim Melayu tidak putus asa untuk mempertahankan negeri mereka dari ketidakadilan pemerintah Thailand sehingga pada November 1945, masyarakat Melayu Pattani mengajukan petisi kepada Inggris untuk menyampaikan rasa tidak puas masyarakat Pattani terhadap kerajaan Thailand. Petisi tersebut meminta Inggris untuk mengambil alih Pattani dari kerajaan Thailand.¹²⁵ Namun sayangnya, petisi tersebut tidak mengubah *status quo* Pattani. Inggris tidak menuntut penyerahan wilayah dari Thailand kecuali pengembalian empat negeri Melayu di utara Semenanjung Tanah Melayu. Inggris juga terpaksa harus akur dengan resolusi sidang San Fransisco yang diusulkan oleh Amerika Serikat sebagai sekutu perang Inggris untuk mengakhiri semua perang setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II.¹²⁶

Ancaman campur tangan negara asing terhadap wilayah Pattani ini telah mendesak kerajaan Thailand untuk lebih waspada dalam menerima tawaran damai untuk wilayah Melayu di Selatan Thailand. Untuk menetralkan kembali situasi yang memanas, pemerintah Thailand mengambil suatu langkah signifikan, yakni melantik *chularatchmontri* (Penasihat Urusan Agama Islam) pada tahun 1945 yang fungsinya adalah sebagai penasihat Raja Thailand dalam urusan agama. Kebijakan ini merupakan bukti nyata bahwa Islam telah diberikan legitimasi untuk pertama kalinya di Thailand.¹²⁷

Kerajaan Thailand berusaha untuk mengintegrasikan Islam dan Melayu dalam rangka strukturisasi negara Thailand melalui kebijakan kerajaan adalah dengan memberikan status kewarganegaraan kepada kaum Melayu-Islam di Selatan Thailand. Pemerintah memberikan status kewarganegaraan Thai-Islam

¹²⁵ Ibid., 7

¹²⁶ Ibid., 7

¹²⁷ Christie., 182.

untuk menggantikan istilah Melayu Islam dimana tujuan mereka adalah untuk menggolongkan mereka sebagai warga negara Thailand. Namun sebenarnya lebih dari itu, langkah yang diambil oleh pemerintah Thailand ini merupakan sebuah bukti konkret bahwa kerajaan Thailand berusaha untuk memutuskan hubungan antara masyarakat Islam Thai dengan identitas Melayu yang berkaitan dengan negara tetangga, Malaysia.¹²⁸

2.5. Fase Polarisasi: Kelompok Pemberontak Pattani

Fase ketiga dari fase eskalasi konflik dalam Model Hourglass adalah polarisasi. Yang dimaksud dengan polarisasi di sini adalah semakin mengkristalnya kelompok yang berkonflik hingga terkutub ke dalam satu atau beberapa kelompok. Dalam konflik Thailand Selatan, masyarakat Muslim-Melayu tampak jelas membentuk kelompok-kelompok untuk melawan Pemerintah Thailand. Kelompok-kelompok ini melakukan beberapa aksi protes dalam skala yang relatif. Mereka juga terpecah ke dalam pemahaman ideologi yang berbeda-beda sehingga mengambil jalan yang tidak selalu sama. Namun begitu, tampak jelas bahwa polarisasi muncul karena masalah kontradiksi di Thailand Selatan belum terselesaikan.

2.5.1. Pemberontakan Haji Sulong

Berbagai macam kebijakan asimilasi kebudayaan yang diterapkan oleh pemerintahan Thailand mendorong munculnya perlawanan bangsa Melayu Pattani karena adanya kekhawatiran identitas budayanya akan tercabut. Gerakan

¹²⁸ Yazid., 8.

perlawanan bangsa Melayu Pattani yang muncul pertama kali sebagai sebuah gerakan damai yang memperjuangkan otonomi bagi Pattani dipimpin oleh Haji Sulong pada tahun 1947. Gerakan yang dipimpin oleh Haji Sulong ini menjadi ujung tombak sekaligus gerakan terpenting dari berbagai gerakan yang muncul selanjutnya.¹²⁹

Pemberontakan Haji Sulong dimulai pada April 1947 dengan mengajukan lima tuntutan kepada Kerajaan Thailand, yaitu:¹³⁰

- a. Tuntutan otonomi politik untuk semua wilayah Melayu Pattani.
- b. Tuntutan untuk mengangkat seorang gubernur dari kalangan Melayu Pattani dalam menjalankan pemerintahan kolektif terhadap empat daerah di Selatan Thailand yang mayoritas penduduknya adalah orang Melayu.
- c. Tuntutan agar bahasa Melayu memiliki status yang sama dengan bahasa Thai dan bahasa Melayu juga digunakan sebagai pengantar bagi sekolah di wilayah Thailand Selatan.
- d. Tuntutan untuk mendirikan Mahkamah Islam guna menjalankan undang-undang Syari'ah.
- e. Tuntutan untuk menggunakan hasil sumber daya alam daerah Melayu sebagai percepatan pembangunan di wilayah Melayu tersebut.

Perjuangan Haji Sulong ini tidak berlangsung lama. Atas tuntutannya menuntut hak otonomi untuk memerintah daerah Melayu, menyebabkan pihak militer Thailand menangkap Haji Sulong dengan tuduhan menghasut pada Januari

¹²⁹ VOA Islam, "Muslim Patani Ditangkap, Dibunuh, Dirampas, dan Diperkosa," Voa-Islam.com <http://www.voa-islam.com/read/international-jihad/2011/12/10/16981/kabar-terkini-muslim-patani-ditangkap-dibunuh-dirampas-diperkosa/#sthash.HAmGfZt6.dpbs> (diakses pada 11 Februari 2016).

¹³⁰ Christie., 183.

1948.¹³¹ Penangkapan Haji Sulong menimbulkan perlawanan dari kelompok Muslim sehingga meletuslah pemberontakan besar-besaran di dusun Nyior, Narathiwat pada April 1948. Pemberontak tersebut kemudian ditangkap dan mengalami proses pengadilan selama delapan bulan dan rata-rata dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara atas tuduhan penghinaan terhadap pemerintah. Sementara itu, dalam perjalanan menuju Songkla untuk menjalankan panggilan polisi, Haji Sulong tewas terbunuh pada 13 Agustus 1954.¹³²

Kematian Haji Sulong telah menjadi simbol perlawanan terhadap Negara Thailand. Menurut Dokter Ismae-Alee dari Prince of Songkhla University mengatakan bahwa konflik di Thailand Selatan adalah ketidaktahuan pemerintah terhadap kehidupan Melayu serta bagaimana peranan Islam mempengaruhi pola hidup masyarakat Melayu. Dia juga mengatakan bahwa masyarakat Muslim selatan memiliki gaya hidup yang berbeda dan memiliki keyakinan yang berbeda dari wilayah lain di Thailand Selatan. Sebab, identitas, nasionalisme, dan sejarah telah berakar di jiwa mereka.¹³³

Dari sini juga tampak jelas bahwa pada awalnya Muslim di Pattani bukannya tidak mau hidup berdampingan dengan etnis lain asalkan kebudayaan dan keyakinan mereka dihormati dan diakui oleh pemerintah. Tampak juga bahwa Haji Sulong tidak menuntut pemisahan atau kemerdekaan dari Thailand. Namun, respons yang negatif dari Kerajaan Thailand, membuat konflik semakin parah hingga merembes menjadi isu separatisme. Kegagalan Haji Sulong juga ternyata melahirkan kelompok-kelompok lainnya yang lebih ekstrem.

¹³¹ Yazid., 9

¹³² Ibrahim., 145

¹³³ Imtiyaz Yusuf. *Ethnoreligious and Political Dimensions of the Southern Thailand Conflict* (Washington DC: Stimson, 2009), 47

2.5.2. Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP)

Setelah kematian Haji Sulong, pada tahun 1959 muncul gerakan penerusnya yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang mendirikan front perlawanan bawah tanah, yaitu Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP) atau yang dikenal juga dengan *National Liberation Front of Pattani* (NLFP). Gerakan ini tidak hanya menuntut otonomi seperti yang di perjuangkan oleh Haji Sulong, melainkan BNPP ini ingin mendirikan negara Islam. Namun, selain karena keinginan kuat untuk membentuk pemerintahan Islam, pemberontakan ini juga muncul karena persoalan ekonomi. Pada saat itu, harga timah dan karet yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Pattani mengalami penurunan yang drastis. Masyarakat Pattani kemudian menyadari adanya eksploitasi oleh pemerintah atas sumber daya alam Pattani tanpa memberikan kontribusi yang adil.¹³⁴

Di daerah Pattani, BNPP berupaya untuk menentang keinginan pemerintah mendirikan pemukiman-pemukiman umat Budha. Thailand yang saat itu dipimpin oleh Sarit Thanarat (1957-1973) berusaha memperbesar jumlah penduduk Budha. Sejak 1960, sekitar 100.000 orang Thai dari Thai Timur Laut telah dipindahkan ke daerah Pattani, Yala, dan Narathiwat. Menurut rencana pemerintah, sedikitnya 650.000 orang Thai Budhis akan dipindahkan ke daerah Muslim.¹³⁵

Ranah operasi BNPP bukan hanya di Pattani, namun juga beroperasi di negeri Kelantan dan wilayah Thai. Kelompok ini juga giat mendorong orang Melayu Pattani untuk menjadi warga negara Malaysia. Melalui orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, BNPP akan mudah melanjutkan kegiatannya di

¹³⁴Yuniarto, *Integritas Muslim Patani.*, 13.

¹³⁵ Neil J. Melvin, *Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency* (Bromma: CM Gruppen, 2007), 12.

daerah perbatasan, karena mereka akan melintasi perbatasan dengan bebas. Pelajar Pattani yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Malaysia termasuk dari mereka yang mendapatkan kewarganegaraan ganda. Setelah mereka menyelesaikan studinya di Malaysia, mereka akan bekerja di Malaysia dan terus membantu BNPP. Dengan cara seperti ini, orang Melayu Muslim Pattani secara perlahan akan memasuki birokrasi negara bagian dan federal Malaysia.¹³⁶

Selanjutnya, hubungan yang baik terjalin antara BNPP dengan Partai Islam di Malaysia. Partai Islam merupakan partai Islam konservatif yang memiliki pengaruh yang besar di negeri Kelantan yang berbatasan langsung dengan wilayah Thai. Pejabat-pejabat pemerintah Kelantan memberikan dukungan moril dan materiil kepada BNPP. Namun, sejak Partai Islam mengalami kekalahan pada pemilu 1978, bantuan materiil yang biasa di salurkan untuk BNPP mengalami penurunan. Walaupun demikian, ikatan erat yang terjalin antara BNPP dan pejabat Kelantan masih dipertahankan. Hubungan baik ini menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah Thailand, walaupun Malaysia telah menyatakan tidak akan campur tangan untuk urusan dalam negeri Thailand sendiri.¹³⁷



2.5.3. Barisan Revolusi Nasional (BRN)

Seiring jalan dengan BNPP, generasi muda Pattani yang terdidik mengambil inisiatif untuk membangun gerakan perlawanan dengan membentuk Barisan Revolusi Nasional (BRN) atau *Liberation Front of Republik Pattani* (LRFP). BRN merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dengan tujuan

¹³⁶ Surin Pitsuawan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*. (Jakarta: LP3ES, 1989), 176.

¹³⁷ Laili Maftukhah, "Gerakan Pembebasan Pattani di Thailand Selatan pada Tahun 1973-1982", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Aurabaya, 2011), 51.

mendirikan Republik Islam Pattani dan mencetuskan suatu revolusi sosial dan membebaskan Pattani dari kekerasan. Organisasi ini berbasis di Malaysia Utara dan beroperasi di Thailand Selatan. BRN ini dibentuk pada Maret 1963 oleh sekelompok mantan guru pondok dan dipimpin oleh Ustad Karim Haji Hassan.¹³⁸ Sebagai kelompok dalam memperjuangkan pembebasan Pattani dari Pemerintah Thailand, BRN terlibat dalam tindakan kekerasan, pembunuhan, penculikan, sabotase, pemerasan, dan serangan bom yang dirancang untuk memberikan rasa tidak aman bagi warga yang beretnis Thailand yang tinggal di Provinsi Thailand Selatan, serta memberikan beban kepada pejabat pemerintah Thailand.¹³⁹

Alih-alih membentuk pemerintahan Islam tradisional, tujuan BRN lebih kepada pembentukan republik Islam yang sosialis.¹⁴⁰ Menurut pemerintah Thailand, organisasi ini memiliki pasukan gerilya dengan perlengkapan yang cukup dan kebanyakan dari pemimpinnya berpendidikan di luar negeri, khususnya Malaysia dan Indonesia.¹⁴¹ Hal paling di khawatirkan pemerintah Thailand adalah terjalinnya hubungan yang dekat antara BRN dengan Partai Komunis Malaya (CPM). Pemerintah juga khawatir kalau BRN akan giat menyebarkan ideologi sosialisme-komunisme yang dipadukan dengan gagasan Islam di antara kalangan penduduk Melayu.¹⁴² Namun, hal ini tidak sepenuhnya menguntungkan BRN.

¹³⁸ Anthony Davis, "Thailand Confronts Separatist Violence in its Muslim South," *Jane's Intelligence Review*, (March 2004), 21-22.

¹³⁹ Peter Chalk, "Militant Islamic Separatism in Southern Thailand," dalam *Islam in Asia: Changing Political Realities*, ed. Jason F. Isaacson dan Colin Rubenstein (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002), 168-169.

¹⁴⁰ Pitsuawan., 177.

¹⁴¹ Melvin., 16

¹⁴² Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta; Pustaka LP3S, 1993), 178

Karena ideologi yang mereka anut lebih mengutamakan sosialisme daripada Islam, para ulama justru enggan mendukung BRN.¹⁴³

Pada 7 Agustus 1977, BRN membentuk “Tentara Pembebasan Rakyat Muslim” yang sering melaksanakan aksi militer bersama dengan gerilyawan Komunis Thai.¹⁴⁴ Tindakan yang diambil oleh BRN ini telah mengubah arah konflik yang melibatkan pemerintah Thailand dan minoritas Muslim Melayu menjadi sebuah konflik ideologi yang bisa melibatkan negara asing. Hubungan yang erat terjalin antara BRN dengan partai-partai Komunis lainnya memberikan kecemasan bagi para pemimpin organisasi separatis lainnya. Mereka khawatir bahwa dengan adanya dukungan komunis itu akan merugikan citra gerakan kemerdekaan secara keseluruhan.¹⁴⁵

2.5.4. The Pattani United Liberation Organization (PULO)

Kelompok separatis yang muncul selanjutnya adalah *Pattani United Liberation Organization* (PULO) yang didirikan pada tahun 1968 dan menjadi kelompok separatis paling aktif sepanjang tahun 1970an. PULO didirikan oleh Tengku Bira Kotantila atau yang dikenal juga dengan Kabir Abdul Rahman. PULO memiliki ideologi “agama, ras, tanah air, dan kemanusiaan.”¹⁴⁶

PULO memosisikan dirinya sebagai organisasi yang lebih ketat dalam memperjuangkan nasionalisme Melayu Muslim di level internasional. Dukungan internasional yang diperoleh oleh PULO datang dari berbagai pihak, mulai dari Libia, Suriah, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), hingga Partai Islam se-

¹⁴³Ibid., 334.

¹⁴⁴ Ibid., 178

¹⁴⁵Pitsuwan., 179.

¹⁴⁶ Ibid., 16

Malaysia (PAS) yang berbasis di Kelantan. Dalam melakukan aksinya, PULO sering menempuh cara-cara kekerasan yang kerap dilakukan oleh sayap militer mereka, Pattani United Liberation Army (PULA) yang mengaku bertanggung jawab atas sejumlah pengeboman dan pembakaran di berbagai tempat, termasuk di Bangkok.¹⁴⁷

PULO merupakan organisasi induk yang mengoordinasikan banyak kelompok gerilya yang memerangi pemerintah Thailand. Untuk struktur organisasinya, PULO memiliki tingkat-tingkat kepemimpinan. Tingkat paling atas dari PULO berada di Mekkah, Arab Saudi yang menentukan kebijakan. Menurut Komite Khusus Parlemen yang menyelidiki masalah separatisme, PULO mendapatkan dukungan lebih dari 8.000 Muslim Pattani yang bermukim di Mekkah.¹⁴⁸ Sedangkan tingkatan kedua dari organisasi ini berada di Tumpat, Kelantan, Malaysia yang menangani urusan politik. Tingkatan ini mengoordinasikan berbagai kegiatan yang diharapkan untuk menciptakan kondisi politik yang menguntungkan bagi perang gerilya. Dan tingkatan yang ketiga yang paling terkenal, yaitu pimpinan operasi militer (jabatan tentara) di Thailand Selatan. PULO dalam tingkatan ini memiliki pasukan militer yang terlatih dan perlengkapan yang paling memadai. Pasukan bersenjata PULO aktif di keempat provinsi Melayu dan di beberapa distrik Shongkhla.¹⁴⁹

PULO mendapatkan dukungan paling efektif dan paling luas disebabkan oleh pimpinan PULO terdiri dari para cendekiawan muda lulusan perguruan tinggi di Timur Tengah dan Asia Selatan. Di samping kegiatan militer, PULO juga mengutamakan kampanye politik untuk mempertajam perpecahan antara

¹⁴⁷Chalk., 172

¹⁴⁸Pitsuan., 180.

¹⁴⁹Ibid., 180

mayoritas Melayu dan Minoritas China-Budhis di wilayah perbatasan Thailand tersebut. Kemampuan utama PULO adalah memanfaatkan persoalan-persoalan emosional yang melibatkan hubungan mayoritas dan minoritas di Thailand. Mereka mampu mengubahnya menjadi peristiwa-peristiwa politik untuk menarik perhatian umum dan media internasional. Pada masa 1973 hingga 1976, yang dianggap sebagai periode paling demokratis di Thailand, kecerdasan politik pimpinan PULO telah diakui sepenuhnya oleh pejabat pemerintah ketika organisasi tersebut mampu mengoordinasikan berbagai golongan yang berjuang untuk perlindungan dan kebebasan rakyat.

Keberhasilan PULO ini terjadi pada akhir 1975 hingga awal 1976. Pada saat itu, PULO mengorganisasikan demonstrasi politik terbesar dalam sejarah Thailand. Lebih dari 70.000 orang Muslim Melayu Pattani turun ke jalan untuk memprotes tindakan yang dilakukan oleh marinir Thai di Distrik Bacho atas pembunuhan lima orang penduduk kampung Melayu.¹⁵⁰ Dalam demonstrasi ini, masyarakat juga menuntut pemerintahan yang otonom. Aksi-aksi dari PULO ini mampu menarik pers dunia, sehingga dukungan internasional juga semakin besar. Dan sejak saat itu PULO menjadi organisasi gerakan Melayu-Muslim yang paling besar dan berpengaruh.¹⁵¹

2.6. Fase Kekerasan: Konflik Kekerasan Thailand 2004-2015

Fase terakhir dari eskalasi konflik menjelang perang adalah terjadinya kekerasan. Bibit-bibit kekerasan sebetulnya telah tampak beriringan dengan munculnya kelompok-kelompok pemberontak. Namun, dalam penelitian ini

¹⁵⁰ Ibid., 182

¹⁵¹ Ibid., 183

kekerasan yang lebih fokus untuk dilihat adalah gelombang kekerasan terkini yang terjadi sejak tahun 2014. Di sini, penjelasan fase konflik mulai dari fase perbedaan hingga fase polarisasi yang telah dijelaskan sebelumnya berguna untuk memberikan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai konflik kekerasan yang terjadi sejak tahun 2004 tersebut.

Berdasarkan batasan penelitian (2015), kekerasan telah terjadi selama 11 tahun. Pada gelombang inilah Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang akan dilihat strategi resolusi konfliknya ikut campur dalam konflik Thailand Selatan. Gelombang kekerasan yang dimulai tahun 2004 ini kembali terjadi setelah dalam beberapa tahun, Thailand berada dalam kestabilan politik. Dalam perkembangan fase ini kelompok pemberontak tidak begitu mencolok melakukan aksi kekerasan atas nama kelompok tersendiri. Pemerintah Thailand juga menggolongkan mereka semua ke dalam satu kelompok separatis. Adanya keinginan untuk menyatukan suara menjadi salah satu penyebab hal tersebut. Namun, di antara kelompok pemberontak, yang paling menonjol adalah PULO. Kelompok ini juga yang aktif meminta bantuan kepada OKI. Akan tetapi, peta kekerasan dalam fase ini sedikit berubah karena yang melakukan tindak kekerasan tidak hanya pemberontak, tetapi juga aparat keamanan dari Pemerintah Thailand. Oleh karena itu, fase kekerasan akan dijelaskan dengan penggolongan berdasarkan dinamika kepemimpinan politik di Thailand.

2.6.1. Aksi Kekerasan di Masjid Krue Se dan Tak Bai tahun 2004

Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, Pemerintah Thailand mencoba untuk membangun stabilitas di kawasan Thailand Selatan. Thailand menjadi lebih

demokratis dengan melakukan pendekatan pengintegrasian (*inclusion*) dan meninggalkan pendekatan *exclusion* terhadap Muslim Melayu. Banyak tokoh Melayu yang mendapatkan akses pada pemerintahan seperti Surin Pitsuwan, Wakil Menteri Luar Negeri Thailand dan setelah itu menjadi Menteri Luar Negeri Thailand; Wan Muhammad Nor Mata, Ketua Perhimpunan Kebangsaan Thailand; dan Den Tohmeena, anak Haji Sulong yang menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Upaya ini dinilai cukup berhasil untuk menata ulang struktur sosial di Thailand.¹⁵²

Namun, kestabilan tersebut tidak berlangsung lama karena Thailand dilanda krisis ekonomi tahun 1997. Thailand kembali jatuh kepada kekacauan ketika terjadi insiden pencurian 300 pucuk senjata di kompleks tentara Cho AiRong, Narathiwat yang menewaskan empat orang Pasukan Keamanan. Kejadian ini kembali membuat Pattani menjadi wilayah yang tidak aman.¹⁵³

Faktor lain yang menyebabkan kestabilan politik di Thailand hanya dapat dinikmati sebentar adalah transformasi di dalam tubuh PULO sehingga mereka menjadi lebih militan dan radikal.

Tahun 1995, PULO pecah menjadi dua kelompok: PULO lama dan PULO baru yang lebih militan atau yang disebut juga dengan Barisan Nasional Baru (BNB) dan satu lagi kelompok militan kecil yang disebut dengan Tantra Jihad Islam (TIJ). Pada tahun 1997, kelompok tersebut datang bersama-sama untuk membentuk aliansi dalam upaya memfokuskan kembali perhatian nasional dan regional dalam konflik Thailand Selatan. Selama periode Agustus 1997 hingga Januari 1998, setidaknya 33 serangan terpisah dilakukan terhadap Pemerintahan

¹⁵²Wattana Suganasil, *Dinamic Diversity in Southern Thailand* (Chiang Mai; Silkworm Books, 2005), 13.

¹⁵³Yazid., 12-13.

Thailand yang berada di selatan sehingga mengakibatkan 9 orang tewas, puluhan cedera serta kerusakan ekonomi yang cukup besar. Melihat aksi yang dilakukan oleh kelompok pemberontak ini, awal tahun 1998, Pemerintah Thailand mengadakan kerjasama dengan Malaysia untuk menangkap pemimpin pemberontakan yang berlindung di Kelantan. Pada awalnya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad tidak mengambil sikap terhadap kegiatan pemberontakan Melayu di Thailand. Namun, pada masa ini Malaysia menjamin keamanan wilayah untuk Thailand. Akibatnya, banyak anggota pemberontak menyerah kepada pihak Thailand dan ada juga yang melarikan diri ke daerah pengasingan di luar negeri.¹⁵⁴

Pemberontakan kembali terjadi di Thailand Selatan yang ditandai dengan adanyaengeboman, penculikan, dan penembakan pada masa Pemerintahan Thaksin (2001-2006). Pada tahun 2001, Menteri Dalam Negeri Thailand mencatat kenaikan jumlah kekerasan, seperti terbunuhnya 19 orang anggota polisi Thailand dan 50 orang anggota pemberontak juga terbunuh yang terjadi di tiga provinsi utama Thailand Selatan yaitu Yala, Pattani, dan Narathiwat. Pada tahun 2002, sejumlah kantor polisi diserang oleh segerombolan gerilyawan yang berhasil merebut sejumlah amunisi senjata dan bahan peledak. Insiden ini terjadi 75 kali dalam tahun 2002 yang menewaskan sedikitnya 50 orang anggota polisi. Pada tahun 2003, insiden terus bertambah dan tercatat sedikitnya 119 insiden.¹⁵⁵

Pemerintah Thailand mengeluarkan beberapa kebijakan militer terhadap Thailand Selatan. Salah satunya adalah pemberlakuan Undang-Undang Tentara (Martial Act) pada tahun 2004. Undang-undang ini memberi akses kepada tentara

¹⁵⁴Chalk., 176.

¹⁵⁵Futaqi., 11.

untuk menawan siapa saja yang dianggap tersangka pelaku kekerasan di Thailand Selatan tanpa melewati proses pengadilan. Kebijakan ini mendapat sorotan dari dalam maupun luar negeri karena memberikan kekuasaan yang mutlak kepada tentara untuk memeriksa rumah penduduk, masjid, dan pondok pesantren, sebagai tempat yang dianggap tempat tinggal ataupun persembunyian anggota kelompok pemberontak. Akibat dari undang-undang ini, banyak pemuda dan ulama Melayu ditangkap oleh tentara Thailand. Tercatat sepanjang Januari hingga April 2004, sembilan puluh empat terbunuh dan sembilan puluh lima lagi cedera karena undang-undang tentara ini terus dijalankan.¹⁵⁶

Kelompok Pattani menanggapi Undang-Undang Tentara dengan perlawanan. Sehingga tahun 2004 menjadi tahun yang kembali mengundang gelombang konflik kekerasan di Thailand Selatan. Kekerasan dimulai pada 4 Januari 2004 di mana gudang senjata militer di Narathiwat diserbu oleh segerombolan orang bersenjata. Serangan ini menewaskan 4 orang tentara pemerintah. Akibat serangan ini sekitar 100 pucuk senjata dirampas dan 18 sekolah dibakar. Pada tanggal 5 Januari, Pemerintah Thailand memberlakukan keadaan darurat perang di Narathiwat, Yala, dan Pattani. Pada tanggal 19 Februari, serangan kembali terjadi di Thailand Selatan yang mengakibatkan 3 orang tewas dan 3 orang lainnya cedera. Salah satu korban yang tewas adalah seorang polisi. Ratusan sekolah terpaksa diliburkan karena mendapat ancaman. Pada tanggal 22 Maret, terjadi peledakan di dekat Balai Kota Thailand Selatan, dimana Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Thailand sedang mengadakan pertemuan dengan pejabat kepolisian. Ledakan ini mengakibatkan

¹⁵⁶Yazid., 13.

satu orang cedera dan seorang polisi tertembak pada peristiwa yang terpisah. Pada tanggal 23 April, sebanyak 50 rumah terbakar dan seorang tentara dan tetua kampung tewas dalam kerusuhan di Thailand Selatan.¹⁵⁷

Puncak kekerasan pada tahun 2004 ini ditandai oleh dua peristiwa: serangan terhadap Masjid Krue Se dan insiden kekerasan di Tak Bai di Narathiwat. Serangan terhadap Masjid Krue Se terjadi pada tanggal 28 April 2004 ketika militer Thailand menyerang Masjid Krue Se yang ada di Pattani dan membantai sekelompok orang yang diduga pemberontak. Korban tewas saat itu mencapai 37 orang yang berasal dari militan. Sementara itu, insiden kekerasan Tak Bai terjadi pada tanggal 25 Oktober 2004. Serangan dimulai ketika Distrik Tak Bai diserang oleh sekelompok orang. Beberapa orang dipenjarakan oleh polisi Thailand terkait serangan tersebut. Hal ini memicu demonstrasi besar-besaran masyarakat Muslim Melayu di luar kantor polisi distrik. Polisi Thailand menanggapi demonstrasi dengan menempuh cara kekerasan. Kerusuhan terjadi hingga menewaskan 86 orang dari masyarakat Muslim. Sejumlah 1300 orang ditangkap dan dibawa dari Tak Bai ke kamp militer di Pattani.¹⁵⁸

Enam orang meninggal di tempat kejadian dan 78 meninggal karena kekurangan oksigen ketika berada di dalam truk saat mereka dalam perjalanan menuju kamp militer. Kejadian ini menimbulkan kontroversi besar. Spekulasi bermunculan di antaranya tuduhan kekerasan yang berlebihan, metode yang terlalu keras, serta pelanggaran hak asasi manusia. Perdana Menteri Thaksin

¹⁵⁷Yuniarto, *Integritas Muslim Patani.*, 15.

¹⁵⁸ Max L. Gross, *A Muslim Archipelago: Islam and Politics in Southeast Asia* (Washington DC: National Defense Intelligence College, 2007), 79.

kemudian dituntut untuk segera memberikan pernyataan maaf, tetapi hal tersebut tidak dipenuhi.¹⁵⁹

Pemerintah membentuk komisi pencarian fakta independen untuk menyelidiki bagaimana tewasnya para demonstran. Hasil temuan tim tersebut adalah kematian mereka tidak disengaja. Atas insiden ini pemerintah menangkap empat guru Islam yang dianggap terlibat dalam insiden ini. Pemerintah menganggap bahwa pondok menjadi tempat berkembangnya pemberontak.¹⁶⁰

Sejumlah peristiwa yang terjadi menjelaskan bahwa kejadian tersebut memperlihatkan pola-pola persamaan dengan sejarah Pattani pada awal abad kedua puluh. Insiden ini juga mencerminkan manifestasi perasaan ketidakpuasan rakyat Thailand Selatan terhadap pemerintahan Bangkok. Keputusan pemerintah Thailand menggunakan kekerasan untuk mengamankan keadaan memberikan implikasi negatif sehingga wilayah tersebut terus menjadi daerah konflik.

Thaksin Shinawatra, Perdana Menteri Thailand mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan persoalan. Namun, menurut Abuza, langkah tersebut dinilai kurang bijak karena Thaksin terlalu menginginkan hasil yang instan. Langkah yang diambil oleh Thaksin adalah merotasi kepemimpinan Pasukan Keempat di Thailand Selatan dengan sangat membingungkan. Enam komandan silih berganti memimpin pasukan tersebut selama tiga tahun. Akibatnya 60.000 pasukan keamanan yang dinilai kuat menjadi tidak terorganisir. Kondisi ini yang kemudian menguntungkan kelompok pemberontak untuk memperkuat diri mereka.¹⁶¹

¹⁵⁹ Yusuf., 50.

¹⁶⁰ Yazid., 13

¹⁶¹ Abuza., 3-4

2.6.2. Keberlanjutan Aksi Kekerasan Pasca 2004

Pada September 2006, Thaksin dikudeta oleh militer Thailand. Jenderal Surayud Chulanont yang menggantikannya menjanjikan perbaikan dan permohonan maaf kepada masyarakat Thailand Selatan. Kudeta militer tahun 2006 mengambil tindakan rekonsiliasi terhadap konflik selatan. Perdana Menteri yang baru, Jenderal Surayud, meminta maaf atas kesalahan penanganan krisis oleh pemerintah sebelumnya, Thaksin. Dia mengumumkan amnesti bagi mereka yang mengundurkan diri dari gerakan pemberontak. Dia meyakinkan generasi tua dari gerakan separatis (PULO dan BRN) memainkan peran mediasi antara pemerintah dan kelompok pemberontak muda yang memiliki pendekatan lebih radikal.¹⁶² Namun, program perbaikan tersebut hanya sedikit yang terlaksana. Sementara itu kelompok pemberontak seakan tidak peduli dengan siapa yang menduduki kekuasaan di Bangkok. Akibat lemahnya pemerintahan Chulanont, pada bulan Mei 2007, kekerasan kembali terjadi di selatan yang menewaskan empat orang.¹⁶³

Pada Januari 2008, kekuasaan di Thailand dipegang oleh *People's Power Party* (PPP) menggantikan Jenderal Chulanont. Namun, tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, PPP tidak mampu memperbaiki keadaan di Thailand Selatan. PPP yang khawatir militer Thailand akan melakukan kudeta, memberikan kuasa penuh kepada tentara di wilayah selatan. Hal tersebut justru memicu terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM.¹⁶⁴

Pada Desember 2008, kekuasaan PPP atas pemerintahan Thailand berakhir. Thailand kemudian diperintah oleh Abhisit Vejjajiva dari Partai Demokrat. Vejjajiva menjanjikan perbaikan di selatan menjadi prioritasnya.

¹⁶² Yusuf., 51.

¹⁶³ Abuza., 4.

¹⁶⁴ Ibid., 4

Menurut Abuza, pemerintahan Vejjajiva awalnya memberi harapan tersebut karena dinilai lebih demokratis dari pendahulunya. Namun, Partai Demokrat dihadapkan pada kelompok oposisi pro-Thaksin mengganggu stabilitas politik di Thailand. Kondisi ini membuat Vejjajiva tidak bisa berbuat banyak terhadap Thailand Selatan. Bahkan, dalam 30 bulan memerintah, dia hanya empat kali melakukan perjalanan sehari ke selatan.¹⁶⁵

Pada Maret 2012, terjadi kembali ledakan di Yala. Jumlah korban tewas sedikitnya 7 orang, sedangkan korban luka-luka sedikitnya 70 orang. Sedangkan di wilayah lainnya, Narathiwat juga mengalami ledakan bom pada saat dua kendaraan patroli sedang melewati jalan. Satu orang tentara mengaami luka serius dalam serangan tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2011 militer Thailand menematkan sekitar 60.000 pasukan di wilayah tersebut untuk mengatasi pemberontakan.¹⁶⁶

Meskipun hingga sekarang konflik di Thailand Selatan terus berlanjut, namun menurut Abuza, konflik kekerasan mengalami penurunan sejak tahun 2007 yang dianggap sebagai puncak dari gelombang kekerasan yang sudah terjadi sejak tahun 2004. Namun demikian, kekerasan masih terus terjadi dari tahun ke tahun. Hingga awal Januari 2016, telah lebih dari 5000 orang menjadi korban dari konflik kekerasan tersebut.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Ibid., 4

¹⁶⁶ BBC, "Ledakan Bom di Thailand Selatan, Lima Orang Tewas," BBC.com, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/03/120331_thailand.shtml. (diakses pada 12 Maret 2016).

¹⁶⁷ Patani Post, "OIC Harap Dapat Main Peranan Dalam Proses Perdamaian di Selatan Thailand," Patanipost.net, <http://patanipost.net/2016/01/14/oic-harap-dapat-main-peranan-dalam-%E2%80%A8proses-erdamaian-di-selatan-thailand/> (Diakses pada 3 Februari 2016).

BAB III

KERANGKA KERJA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM RESOLUSI KONFLIK THAILAND SELATAN

Bab ini memaparkan bagaimana kerangka kerja (*framework*) yang dimiliki oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam melakukan resolusi konflik yang diaplikasikan di Thailand Selatan. Penjelasan tersebut meliputi profil OKI sebagai organisasi antar pemerintah yang mewadahi negara-negara Muslim mulai dari sejarah pembentukan organisasi tersebut, prinsip, tujuan, dan mandat organisasi, hingga struktur organisasi yang berlaku dan terkait dengan proses resolusi konflik.

Berikutnya adalah penjelasan tentang perhatian OKI terhadap Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam yang menjadi landasan nilai bagi organisasi ini untuk melakukan resolusi konflik di Thailand Selatan. Dari perhatian terhadap HAM dalam pandangan Islam, OKI kemudian memberikan perhatian yang lebih serius terhadap nasib kaum minoritas Muslim di negara-negara non-anggota yang paling sering mengalami diskriminasi dan menjadi korban kekerasan karena konflik. Atas perhatian akan hal inilah diketahui kemudian OKI menjadi serius terhadap penyelesaian konflik di Thailand Selatan.

Terakhir disimpulkan bahwa kerangka kerja yang dimiliki oleh OKI dalam upaya resolusi konflik yang diterapkan di Thailand Selatan, tidak lepas dari perhatian terhadap HAM dalam pandangan Islam dan nasib Muslim minoritas sehingga adalah wajar melihat keterlibatan OKI di dalam konflik Thailand Selatan. Hal inilah yang dengan sendirinya membuat OKI melibatkan dirinya sendiri untuk campur tangan dalam konflik Thailand Selatan. Campur tangan ini

semakin menarik mengingat hubungan antara OKI dengan pihak-pihak yang berkonflik. Di satu sisi, Thailand sudah lama menjadi negara pengamat di dalam OKI yang artinya hubungan baik antara negara berdaulat ini dengan organisasi internasional berbasis agama tersebut sudah lama terjalin. Di sisi lain, kelompok Pattani di selatan Thailand yang bagi pemerintah Thailand adalah pemberontak dan separatis, bagi OKI merupakan penghubung dengan masyarakat Muslim Melayu yang minoritas dan harus dilindungi.

3.1 Profil Organisasi Kerjasama Islam

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan organisasi antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*) yang beranggotakan 57 negara-negara Muslim. Organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi suara kolektif Dunia Muslim (*al-Ummah*). Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Islam dikenal dengan nama Organisasi Konferensi Islam yang memiliki dimensi religius yang kuat sebagai ciri khas dan pembeda dengan organisasi internasional antar pemerintah lainnya. Saat ini, prioritas utama OKI adalah mengatasi masalah *Islamophobia*, mempromosikan kepentingan masyarakat Muslim di seluruh dunia serta mengonsolidasikan kerjasama negara Islam dalam forum dan dalam organisasi internasional lainnya.¹⁶⁸

OKI dianggap sebagai organisasi antar pemerintah internasional terbesar kedua setelah PBB. Kantor pusatnya terletak di Jeddah, Arab Saudi. OKI berkembang sangat pesat pada abad kedua puluh satu dengan mengembangkan

¹⁶⁸ Pekkan Hakala, dan Andreas Kettis, "The Organisation of Islamic Cooperation: Defined –for Better and Worse– by its Religion Dimension," (Laporan, European Union, 2013), 4.

hubungannya dengan dunia luar pada masa EkmeleddinIhsanoglu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal OKI (2004–2014).¹⁶⁹

Berdirinya OKI tidak lepas dari kondisi politik Dunia Islam. Pada tanggal 25 September 1969, para pemimpin negara-negara Arab berkumpul di Rabat, Maroko untuk membahas insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh kelompok Zionis Israel. Pertemuan tersebut merupakan konferensi tingkat tinggi pertama yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara Arab. Pada awalnya, tujuan dari pertemuan ini hanya untuk membahas insiden pembakaran terhadap Al-Aqsa. Namun pada akhirnya, setelah perdebatan panjang para peserta rapat kemudian membahas isu yang lebih luas. Pertemuan tersebut kemudian dianggap sebagai awal dari pembentukan Organisasi Kerja Sama Islam yang pada saat didirikan masih bernama Organisasi Konferensi Islam (OKI).¹⁷⁰

Kesekretariatan permanen OKI berada di Jeddah, Arab Saudi.¹⁷¹ Saat ini, OKI terdiri atas 57 negara. OKI dianggap sebagai organisasi antar pemerintah terbesar kedua setelah PBB dan organisasi terbesar yang berhubungan dengan agama.¹⁷² Sejak 1 Januari 2014, Sekretaris Jenderal OKI di jabat oleh H.E. Mr. Iyad Ameen Madani dari Arab Saudi menggantikan Ekmeleddin Ihsanoglu dari Turki.¹⁷³

OKI beranggotakan negara-negara dengan latar perekonomian yang beragam. Namun, yang menjadi kekuatan ekonomi terbesar OKI adalah

¹⁶⁹Ibid., 4

¹⁷⁰The Organization of Islamic Cooperation, "History," OIC-OCI.org, http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en (diakses pada 25 February 2016).

¹⁷¹Ibid.,

¹⁷²Ciljar Harders, dan Metteo Legrenzi, *Regionalism? Regional Cooperation, Regionalism and Regionalization in the Middle East* (Surrey: Ashgate, 2008), 126.

¹⁷³The Organization of Islamic Cooperation, "Biography: Secretary General of OIC, H.E. Mr. Iyad Ameen Madani," OIC-OCI.org, http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=58 (diakses pada 18 February 2016).

bergabungnya negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia, serta beberapa negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Sebagian besar negara Timur Tengah memegang peranan besar dalam jalannya OKI. Namun, OKI juga terdiri atas negara inti yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam organisasi dan negara anggota lainnya yang memiliki peran pengikut. Oleh sebab itu, OKI juga terdiri dari beberapa kelompok elite kekuasaan dan beberapa negara yang kurang memiliki pengaruh dalam organisasi dalam mengambil keputusan penting. Namun terlepas dari ini, OKI dianggap relatif penting untuk anggotanya. Sebab, OKI merupakan satu-satunya organisasi yang mampu menyatukan semua negara-negara Islam dibawah satu atap.¹⁷⁴

Di samping diperkuat oleh anggotanya, OKI juga didukung oleh beberapa entitas pengamat yang berasal dari berbagai latar belakang. Saat ini terdapat lima negara yang menjadi pengamat di OKI yaitu Bosnia dan Herzegovina (1994), Republik Afrika Tengah (1996), Kerajaan Thailand (1998), Federasi Rusia (2005), dan Negara Siprus Turki (1979). Kemudian juga ada satu organisasi komunitas Muslim yang menjadi pengamat yaitu *Moro National Liberation Front* (MNLF) dari Filipina (1977). Dua institusi Islam juga tercatat sebagai pengamat yaitu: *Parliamentary Union of The OIC Member State* (PUOICM) dan *Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation* (ICYPDC). Di luar itu, organisasi internasional lainnya yang menjadi pengamat adalah: Perserikatan Bangsa-Bangsa (1976), Gerakan Non-Blok (1977), Liga Arab (1975), Uni Afrika (1977), dan Organisasi Kerjasama Ekonomi (1995).¹⁷⁵

¹⁷⁴The Organization of Islamic Cooperation, "Home," OIC-OCI.org, http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=52 (accessed 18 February 2016).

¹⁷⁵The Organization of Islamic Cooperation, "About OIC," OICUN.org, <http://www.oicun.org/2/23/> (Diakses pada 18 February 2016).

Selain membangun hubungan antar anggota dan dengan kelompok pengamat, OKI juga menjalin berbagai kerja sama dengan lembaga lainnya, di antaranya: Komite Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan (COMEC), Kantor Berita Islam Internasional (IINA), Bank Pembangunan Islam (IDB) dan Dana Solidaritas Islam (ISF).¹⁷⁶

3.1.1. Tujuan dan Prinsip OKI

Segala sesuatu yang berkaitan dengan OKI diatur di dalam Piagam OKI. Piagam tersebut merupakan dokumen legal tertinggi organisasi tersebut. Piagam OKI dirumuskan dalam dua pertemuan besar di masa-masa awal yaitu pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri para raja, kepala negara, dan kepala pemerintahan negara-negara Arab di Rabat, Maroko tahun 1969 dan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-III pada bulan Februari 1972 di Jeddah, Arab Saudi.

Pada KTM di Jeddah tersebut, OKI telah merumuskan tujuan organisasinya yang secara lengkap tertuang di dalam Piagam OKI yaitu:

- a. Memperkuat solidaritas diantara negara anggota; kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek; perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya.
- b. Aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam dan memberi semangat serta dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya.

¹⁷⁶Shahram Akbarzadeh dan Samina Yasmeen, *Islam and the West: Reflection from Australia* (New South Wales: University of NewSouth Wales Press, 2005).

- c. Bekerjasama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan; menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian diantara negara anggota dan negara-negara lain.

Pada KTT Islam ke-XI di Dakar, Senegal, yang diselenggarakan pada tanggal 13–14 Maret 2008, OKI mengamandemen piagam mereka seiring dengan perkembangan zaman dan isu yang berkembang di abad kedua puluh satu. Dalam pembukaan piagam yang baru ini dinyatakan nilai-nilai yang mendasari OKI seperti persatuan dan persaudaraan umat Islam, perdamaian dan keamanan internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap muslim minoritas.¹⁷⁷

Piagam tersebut juga menyatakan bahwa OKI mengamankan Sekretariat Jenderal untuk menjamin hak-hak muslim minoritas dan masyarakat negara non-anggota. Dalam misinya OKI menjaga kelompok minoritas dan komunitas muslim di negara non-anggota dan melakukan intervensi atas nama perlindungan hak asasi manusia yang berkonsentrasi pada agama sebagai elemen penting yang mengikat muslim secara bersama.¹⁷⁸

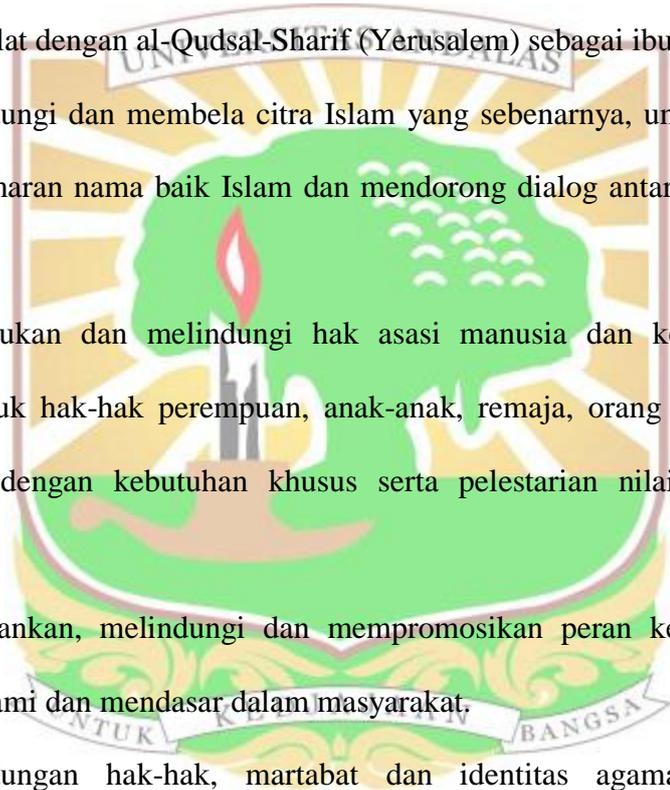
Sementara itu dari segi tujuan organisasi, amandemen Piagam OKI juga memperbaharui tujuan organisasi. Di sana tampak jelas bahwa meskipun nama dan fungsinya berorientasi pada agama, tujuan-tujuan OKI yang tertera di dalam piagamnya justru didasarkan pada konsep negara modern yang berdaulat. Hal tersebut tertuang jelas dalam pasal 1 Piagam OKI tahun 2008, Yakni:¹⁷⁹

¹⁷⁷The Organisation of the Islamic Cooperation, *Charter of the Organisation of the Islamic Conference 1972*, Preamble.

¹⁷⁸Kementerian Luar Negeri, "Organisasi Kerjasama Islam (OKI)," Kemlu.go.id, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=4&P=Multilateral&l=id>, (Diakses pada 18 Agustus 2015).

¹⁷⁹The Organization of Islamic Cooperation, "Home."

- a. Mempromosikan hubungan antar negara berdasarkan keadilan, saling menghormati dan bertetangga yang baik untuk memastikan perdamaian global, keamanan, dan harmoni.
- b. Menegaskan kembali dukungan bagi hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Piagam PBB dan Hukum Internasional.
- c. Mendukung dan memberdayakan rakyat Palestina untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan membangun negara yang berdaulat dengan al-Quds al-Sharif (Yerusalem) sebagai ibukotanya.
- d. Melindungi dan membela citra Islam yang sebenarnya, untuk memerangi pencemaran nama baik Islam dan mendorong dialog antar peradaban dan agama.
- e. Memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar termasuk hak-hak perempuan, anak-anak, remaja, orang tua dan orang-orang dengan kebutuhan khusus serta pelestarian nilai-nilai keluarga Islam.
- f. Menekankan, melindungi dan mempromosikan peran keluarga sebagai unit alami dan mendasar dalam masyarakat.
- g. Perlindungan hak-hak, martabat dan identitas agama dan budaya masyarakat Muslim dan minoritas di negara non-anggota; mempromosikan dan membela posisi bersatu pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama di forum internasional.
- h. Bekerjasama dalam memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, korupsi, pencucian uang dan perdagangan manusia.



Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara anggota harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip OKI berikut:¹⁸⁰

- a. Negara anggota berdaulat, mandiri dan setara dalam hak dan kewajiban.
- b. Semua negara anggota wajib menyelesaikan perselisihan mereka melalui cara damai dan menahan diri dari penggunaan ancaman kekuatan dalam hubungan mereka.
- c. Semua negara anggota harus berusaha untuk menghormati kedaulatan nasional, kemandirian dan keutuhan wilayah negara anggota lainnya dan harus menahan diri dari campuran tangan dalam urusan internal orang lain.
- d. Negara anggota wajib menegakkan dan mempromosikan pada tingkat nasional dan internasional, pemerintahan yang baik, demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan aturan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, OKI mengonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas diantara negara anggota, dan OKI juga menekankan pentingnya untuk menjadi organisasi yang baik dari masyarakat dunia dan menghormati kedaulatan, integritas dan martabat negara. Oleh sebab itu, OKI merupakan organisasi yang menggabungkan unsur-unsur agama yang universal sesuai dengan karakteristik organisasi.¹⁸¹

3.1.2. Struktur OKI

OKI terdiri dari beberapa badan utama, sebagai berikut:¹⁸²

¹⁸⁰The Organization of Islamic Cooperation, "About OIC."

¹⁸¹Ibid.,

¹⁸²Hakala, dan Kettis., 5.

1. Konferensi Tingkat Tinggi Islam

KTT Islam terdiri dari para raja, kepala negara, serta kepala pemerintahan negara-negara anggota. KTT Islam merupakan otoritas tertinggi di dalam OKI. KTT Islam melaksanakan sidang satu kali dalam setiap tiga tahun untuk membicarakan, mengambil keputusan, dan memberikan bimbingan terhadap semua isu yang berkaitan dengan realisasi tujuan serta mempertimbangkan isu-isu lain yang menjadi perhatian negara anggota dan umat.

2. Dewan Menteri Luar Negeri

Konferensi Tingkat Menteri atau Dewan Menteri Luar Negeri yaitu pertemuan para menteri luar negeri dari seluruh negara anggota. Dewan ini melaksanakan pertemuan sekali dalam setahun. Dewan Menteri Luar Negeri juga dianggap sebagai sarana untuk mengimplementasikan kebijakan umum OKI, diantaranya:

- a. Mengadopsi keputusan dan resolusi mengenai masalah-masalah kepentingan bersama dalam pelaksanaan tujuan dan kebijakan umum organisasi.
- b. Meninjau kemajuan pelaksanaan keputusan dan resolusi yang diadopsi pada KTT sebelumnya.

3. Sekretariat Jenderal

Sekretaris Jenderal menjadi kepala administratif kantor dari organisasi. Sekretaris Jenderal akan dipilih oleh Dewan Menteri Luar Negeri dalam jangka waktu lima tahun. Pemilihan Sekretaris jenderal harus dipilih dari warga negara anggota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemetaan geografis, rotasi dan

kesempatan yang sama untuk semua negara anggota dengan pertimbangan karena kompetensi, integritas serta pengalaman.

Sekretaris Jenderal OKI memiliki tanggung jawab sebagai berikut:¹⁸³

- a. Memberikan perhatian untuk badan organisasi
- b. Menindak lanjuti keputusan, resolusi, dan rekomendasi dari KTT Islam, Dewan Menteri Luar Negeri dan pertemuan Menteri lainnya.
- c. Menyiapkan Negara anggota dengan kertas kerja dan memorandum, dalam pelaksanaan keputusan, resolusi dan rekomendasi dari KTT dan Dewan Menteri Luar Negeri
- d. Mengoordinasikan dan menyelaraskan pekerjaan Organ yang relevan dari Organisasi
- e. Mempersiapkan program dan anggaran kesekretariatan OKI
- f. Meningkatkan komunikasi antara negara anggota dan memfasilitasi konsultasi dan pertukaran pandangan serta penyebaran informasi yang bisa menjadi sangat penting untuk negara-negara anggota.
- g. Melakukan fungsi lain seperti yang dipercayakan kepadanya oleh KTT atau Dewan Menteri Luar Negeri
- h. Menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan menteri Luar Negeri.

Sekretaris Jenderal OKI sebelumnya, yaitu EkmeleddinIhsanoglu, andil besar dalam melakukan reformasi di dalam tubuh OKI. Hal ini membuat peran OKI menjadi lebih luas. Reformasi tersebut dilakukan dalam bentuk Program Aksi Sepuluh Tahun.

¹⁸³The Organisation of the Islamic Cooperation, *Charter of the Organisation of the Islamic Conference 1972*, Article 17.

3.1.3. Program Aksi Sepuluh Tahun OKI

Piagam OKI yang berlaku saat ini diadopsi pada KTT Islam ke-11 yang di selenggarakan di Dakar, Senegal pada 13-14 Maret 2008 dimana tujuan dan prinsip-prinsip organisasi adalah untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama diantara negara anggota. Selama kurang lebih 40 tahun, OKI berhasil mengembangkan organisasinya, mulai dari masih beranggotakan 25 negara hingga saat ini mencapai 57 negara anggota. Organisasi ini memiliki kewajiban untuk menyatukan seluruh umat Islam yang berkisar 1,5 miliar di seluruh dunia. OKI juga memiliki hubungan kerjasama dengan PBB dan organisasi antar pemerintah lainnya untuk melindungi kepentingan umat Islam dan bekerja untuk menyelesaikan konflik dan sengketa yang melibatkan negara anggota. Untuk menjaga nilai-nilai Islam yang sebenarnya, organisasi ini telah mengambil berbagai langkah untuk menghapus kesalahan persepsi tentang Islam dan menganjurkan penghapusan diskriminasi terhadap umat Islam dalam segala bentuk dan manifestasinya.¹⁸⁴

Pada masa Sekretaris Jenderal Profesor EkmeldenIhsanoglu, OKI telah melakukan reformasi untuk memperkuat kinerja dan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi tantangan pada abad ke-21 ini. Tantangan yang dihadapi oleh OKI semakin berat dan untuk mengatasi tantangan tersebut, KTT Islam Luar Biasa ke-3 yang dilaksanakan di Mekkah pada Desember 2005 menghasilkan Program Sepuluh Tahun yang akan dilaksanakan dari tahun 2005 hingga 2014. Program tersebut mempromosikan toleransi, modernisasi, dan reformasi yang luas untuk semua bidang, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, peningkatan

¹⁸⁴ Ahmed Adam, "Understanding the Role of the Organisation of Islamic Cooperation in Human Right," (Laporan, Asian Forum for Human Right and Development, 2014), 1-2.

perdagangan, dan menekankan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mempromosikan hak asasi manusia di dunia Muslim, khususnya yang berkaitan dengan hak anak-anak, wanita, dan orang tua seperti nilai-nilai keluarga yang diajarkan dalam Islam.¹⁸⁵

Program aksi sepuluh tahun menyerukan kepada anggota OKI untuk mempertimbangkan sebuah badan permanen yang independen untuk mempromosikan hak asasi manusia dan untuk menguraikan suatu piagam hak asasi manusia OKI. Piagam OKI kemudian di revisi pada tahun 2008 yang berkaitan dengan badan hak asasi manusia independen dalam kerangka kelembagaan. Lembaga tersebut kemudian dikenal dengan nama The Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC). Pada KTT ke-11 di Dakar pada tahun 2008, makin memperkuat fokus tentang hak asasi manusia.¹⁸⁶

Program Aksi Sepuluh Tahun ini akan berakhir pada tahun 2015. OKI mengekspresikan kepuasannya terhadap perubahan yang dialami OKI selama program berlangsung. Laporan terbaru mengenai tentang pelaksanaan program ini yang diselenggarakan pada Desember 2013 menyatakan bahwa dengan program reformasi ini OKI telah menyaksikan pergeseran paradigma dari tahun 2005 dan perubahan konseptual yang dihasilkan dari program ini. Pada isu-isu yang terkait dengan HAM, OKI mencatat bahwa pembentukan IPHRC ini merupakan prestasi terbesar terhadap pelaksanaan agenda politik dan tujuan reformasi kelembagaan yang masuk dalam Program Aksi Sepuluh Tahun. Sejak dimulainya program ini pada tahun 2005, citra OKI mulai meningkat di tingkat global serta proses birokrasi juga meningkat dengan baik dan sebagai akibatnya, organisasi

¹⁸⁵Ibid.,

¹⁸⁶Turan Kayaoglu, "The OIC's Independent Permanent Human Right Commission: An Early Assessment," (Paper, The Danish Onstitute for Human Right Isntitution, 2015),5.

mendapatkan kepercayaan dari negara anggotanya. Selain itu, prestasi yang didapatkan oleh OKI adalah reformasi kelembagaan untuk resolusi konflik dan kemajuan kesejahteraan masyarakat OKI di dalam sosial-ekonomi, budaya dan kemanusiaan.¹⁸⁷

3.2 Perhatian OKI Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam: Deklarasi Kairo

Keterlibatan OKI di dalam konflik Thailand Selatan tidak lepas dari pandangan OKI akan pentingnya menjaga hak asasi umat Islam dan membantu kaum minoritas Muslim yang ada di negara tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan upaya-upaya serius OKI untuk membantu kaum minoritas Muslim, termasuk yang ada di Thailand, OKI juga secara gradual memperbaiki kinerja mereka dalam urusan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap minoritas Muslim.

Perhatian OKI terhadap Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam tertuang dalam Deklarasi Kairo yang diadopsi oleh negara-negara anggotanya pada tahun 1990. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan oleh Dunia Muslim mengenai universalitas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang dianggap gagal mengakomodir hak asasi manusia dalam konteks agama dan budaya karena landasan nilainya yang berpijak kepada nilai-nilai Barat. Deklarasi HAM Islam tersebut kemudian dikenal dengan nama *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI). Sejumlah 45 negara anggota OKI diketahui telah menandatangani deklarasi tersebut. Pada tahun 1993, OKI memperkenalkan

¹⁸⁷Adam., 9.

CDHRI kepada masyarakat internasional melalui Konferensi Dunia di Wina sebagai perwujudan konsensus Islam di seluruh dunia.

CDHRI memberikan gambaran tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan menegaskan syariat (hukum Islam) sebagai sumber tersendiri. OKI menyebutkan bahwa CDHRI merupakan “pedoman umum” tentang hak asasi manusia untuk anggota serikat. Dan negara anggota harus mengoordinasikan posisi mereka pada hak asasi manusia dalam forum internasional sesuai dengan pedoman yang disediakan.¹⁸⁸

Fokus pada HAM dalam Islam makin mengkristal di dalam tubuh OKI pada Juni 2011 ketika Dewan Menteri Luar Negeri OKI mengadakan pertemuan di Kazakhstan untuk menyetujui rancangan pembangunan Komisi Permanen Hak Asasi Manusia Independen atau The Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC). Komisi ini terdiri dari 18 ahli hak asasi manusia, enam di antaranya dari negara-negara Arab, enam dari negara-negara Asia, dan enam dari negara-negara Afrika.¹⁸⁹

3.3. OKI dan Minoritas Muslim

Sebagai salah satu organisasi terbesar yang berorientasi pada agama, ruang lingkup kerja OKI tidak hanya terbatas dalam negara-negara anggotanya saja. Salah satu misi utama OKI adalah untuk melindungi hak-hak muslim minoritas Muslim di negara-negara non-Islam.¹⁹⁰

¹⁸⁸Hakala, dan Kettis.,

¹⁸⁹Adam., 10.

¹⁹⁰Ekhmelleddin Ihsanoglu, *The Islamic World in The Century* (London: C. Hurst & Co Ltd., 2010), 127.

Secara statistik terdapat 500 Juta Muslim yang tersebar di negara non-muslim. Muslim minoritas ini merupakan sepertiga dari keseluruhan populasi yang ada di dunia. Setelah mempertimbangkan sejumlah kaum minoritas Muslim yang ada di dunia dan kompleksitas dimensi sosial dan politik serta budaya orang-orang Muslim, OKI membentuk sebuah departemen minoritas dan komunitas muslim. Departemen ini berfungsi untuk mengatasi berbagai masalah kelompok minoritas dan lembaga ini juga berperan sebagai instrumen untuk OKI dalam menjangkau permasalahan muslim Minoritas yang terdapat di negara non-anggota.

Menurut Talal Daus, Direktur Departemen minoritas dan komunitas Muslim, OKI membahas isu-isu minoritas melalui strategi:¹⁹¹

- a. Menjaga komunikasi dengan kelompok minoritas muslim dan membantu mereka untuk berinteraksi dengan negara-negara anggota OKI dan Sekjen OKI untuk memahami situasi kelompok minoritas tersebut.
- b. Mengembangkan hubungan atau melakukan kontak langsung dengan negara-negara yang memiliki masyarakat minoritas muslim dan membantu memenuhi kebutuhan mereka untuk melindungi hak-hak mereka, melalui negosiasi dan keterlibatan dalam dialog yang konstruktif dan diplomatik, serta OKI juga mempertimbangkan kedaulatan dan integritas penuh negara yang bersangkutan.
- c. Membantu minoritas dalam dialog dengan pemerintah mereka untuk berasimilasi dengan minoritas lainnya.

¹⁹¹Waesahme., 17.

- d. Membangun kerjasama dengan organisasi lain dan lembaga Islam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial dari kelompok minoritas muslim.

Isu minoritas ini pada dasarnya secara politik dianggap sebagai masalah internal negara saja. Namun ketika isu tersebut telah menyebar luas keluar dari negara yang bersangkutan, maka baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan menimbulkan campurtangan dari pihak lain. Baik itu diminta ataupun tidak aktor non-negara seperti OKI pun siap untuk memecahkan permasalahan dalam negara tersebut.

Pada awal berdirinya OKI sangat sadar bahwa OKI tidak akan mengganggu urusan internal negara. Namun seiring berjalannya waktu, OKI melihat permasalahan kelompok minoritas butuh perhatian, sehingga OKI pun juga ikut turun tangan. Permasalahan minoritas pertama yang di bantu oleh OKI adalah permasalahan di Filipina Selatan, Mindanao yang masuk dalam agenda konferensi menteri luar negeri pada tahun 1972.¹⁹²

Permasalahan minoritas selanjutnya juga mulai dibahas dalam konferensi selanjutnya. Selama konferensi berlangsung, konferensi tertarik dengan berbagai laporan tentang banyaknya kesulitan yang dialami oleh masyarakat muslim minoritas non-anggota. Akibatnya, konferensi mengeluarkan resolusi tentang Muslim minoritas. Pertemuan ini menyimpulkan bahwa minoritas Muslim di beberapa negara tidak menikmati hak-hak agama dan politik mereka seperti yang telah diakui dalam hukum internasional. Oleh sebab itu, OKI menyerukan agar

¹⁹²Ihsanoglu., 133.

negara-negara anggota menjadi tuan rumah bagi kaum minoritas Muslim untuk menghormati keyakinan budaya dan etnis mereka.¹⁹³

Menurut Dr Sarawut Aree, kelompok Muslim minoritas terbagi dalam 5 kelompok:¹⁹⁴

1. Kelompok minoritas yang tinggal dalam konteks teritorial negara tertentu. Kelompok ini dianggap minoritas dalam negara namun mereka mayoritas dalam wilayah tertentu, seperti Muslim-Melayu di wilayah Pattani, Thailand. Kelompok ini biasanya ingin memisahkan diri dari negaranya.
2. Kelompok minoritas yang menderita akibat kebijakan negara. Baik kebijakan tersebut disengaja dibuat untuk kelompok minoritas tersebut atau tidak, seperti muslim di India.
3. Kelompok minoritas muslim yang bermigrasi untuk tinggal di negara-negara non-muslim, seperti Amerika Serikat.
4. Kelompok muslim minoritas korban politik dan sering menjadi korban perang sipil di negara mereka. Dalam beberapa kasus mereka disuruh untuk mendukung pemerintah, atau menentang pemerintah. Seperti kelompok minoritas di Sri Lanka.
5. Kelompok minoritas yang populasinya relatif kecil dibanding dengan kelompok mayoritasnya. Masalah utamanya adalah budaya agama mereka rentan terhadap ancaman. Seperti kelompok muslim yang ada di Korea.

Salah satu mandat yang tercantum dalam Piagam OKI tahun 2008 Pasal 1, menegaskan bahwa OKI melindungi hak muslim minoritas dan masyarakat

¹⁹³The Organization of the Islamic Conference, *Resolution No. 10/4 1973: The Situation of Muslims Throughout the World*, 4th Islamic Conference of Foreign Ministers., Benghazi, 24-26 Maret 1973.

¹⁹⁴Waesahme., 18.

muslim di negara non-anggota OKI. Piagam ini mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal akan bekerjasama dengan organisasi internasional dan regional lainnya dalam menjaga kelompok Muslim minoritas negara non-anggota, dan rasa umat yang dimiliki sesama Muslim akan mengikat umat Islam secara bersama-sama untuk melaksanakan intervensi kemanusiaan atas nama perlindungan hak asasi manusia dengan konsentrasi agama yang luar biasa tentang agama dan elemen yang mengikat Muslim secara bersama. Namun, pada saat misi OKI ini bersinggungan dengan negara non-anggota, prosesnya tidak akan semudah dengan negara anggota. OKI tidak akan bisa melaksanakan misinya sendiri tanpa bantuan dari negara yang bersangkutan.¹⁹⁵

Isu-isu hak asasi manusia ini akan dilaporkan ke Sekretaris Jenderal OKI dibawah pantauan Departemen Muslim Minoritas dan Komunitas Muslim. Jika situasi belum mengalami perbaikan dalam sebuah negara, maka forum OKI akan membahasnya, minimal menunjukkan rasa simpati untuk permasalahan kelompok minoritas tersebut. Jika situasi ini semakin meningkat, maka resolusi terpisah akan diusulkan. Resolusi terpisah ini dipandang sebagai alat untuk menekan negara yang bersangkutan untuk menghormati hak-hak mereka.¹⁹⁶

3.4. OKI dan Resolusi Konflik

OKI selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggotanya dengan cara damai. Pada tahun awal, OKI menjadi perantara antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Pemerintah Yordani (kepala negara

¹⁹⁵Ibid., 19.

¹⁹⁶Ibid., 20.

Arab Saudi dan Mesir memainkan peran yang kuat) dan antara Bangladesh dan Pakistan (Sekretaris Jenderal memainkan peran utama).¹⁹⁷

Dalam perkembangannya, upaya OKI dalam menyelesaikan konflik minoritas Islam juga terjadi di negara non-anggota. Seperti upaya perdamaian di wilayah Mindanao yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberated Front (MNLF). Upaya yang dilakukan OKI atas konflik ini adalah membentuk Komite Perdamaian untuk Filipina Selatan. OKI juga terlibat dalam bantuan kemanusiaan di Somalia. Sementara itu untuk konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan masyarakat muslim di Thailand Selatan, upaya yang dilakukan oleh OKI adalah dengan membentuk resolusi konflik untuk konflik tersebut.¹⁹⁸

Banyaknya konflik kekerasan bagi masyarakat muslim di dunia menjadikan perhatian utama dari OKI dan menjadikan penyelesaian konflik tersebut sebagai prioritas organisasi. Keterlibatan OKI dalam pencapaian resolusi konflik ini layak untuk di pertimbangkan. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan OKI dapat membentuk pengaturan perdamaian yang tahan lama sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip kedaulatan dalam tatanan global dan keamanan.¹⁹⁹

OKI tidak memiliki satu tubuh yang mengelola resolusi konflik. Namun sebaliknya, OKI melakukan upaya resolusi konflik semaksimal mungkin oleh organ eksekutif utama OKI, yakni Dewan Menteri Luar Negeri yang kemudian didukung penuh oleh kombinasi organ OKI (pengawasan dari anggota OKI),

¹⁹⁷Hakala, dan Kettis., 6.

¹⁹⁸Sharqieh., 164-167.

¹⁹⁹Elizabeth H. Prodromou, "The OIC and Conflict Resolution," (Laporan, Harvard University, 2014), 1.

Komunitas Islam Bulan Sabit Internasional (bertanggung jawab untuk bantuan kemanusiaan dan medis, dan Bank Pembangunan Islam (promosi pembangunan ekonomi dan dan kemajuan sosial melalui berbagai alat pembiayaan.²⁰⁰

OKI memiliki tiga prioritas untuk mendefinisikan evolusi mekanisme resolusi konflik OKI, strategi, dan kasus yang ditangani OKI.²⁰¹

- a. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam upaya resolusi konflik.
- b. Langkah untuk mengembangkan pembiayaan mekanisme resolusi konflik (independen dari organ PBB) baik melibatkan anggota organisasi secara menyeluruh ataupun upaya kolaborasi anggota tertentu.
- c. Fokus terhadap konflik yang dianggap penting untuk kepentingan Muslim global, dan umat dalam menemukan resolusi konflik.

Sedangkan mekanisme operasional resolusi konflik OKI, meliputi:²⁰²

- a. Misi pencarian fakta kedalam zona konflik.
- b. Berpartisipasi dalam negosiasi diplomatik internasional dan/atau mewakili Partai Islam dalam konflik.
- c. Penugasan utusan khusus OKI dan/atau grup kontak dengan kasus konflik.
- d. Deklarasi publik dan laporan.
- e. Bantuan keuangan untuk bantuan kemanusiaan.
- f. Memanfaatkan anggota OKI dalam organisasi internasional dalam kasus tertentu.

²⁰⁰Ibid., 3.

²⁰¹Ibid., 3.

²⁰²Ibid., 3.

- g. Memberi layanan mediasi kepada pihak yang berkonflik (biasanya konflik intra-muslim), partisipasi dalam internasional (misalnya PBB) dan/atau pasukan perdamaian regional (misalnya Uni Afrika).

Upaya penyelesaian konflik yang dilaksanakan oleh OKI tetap reaktif, sehingga keberhasilan dalam menciptakan kondisi untuk perdamaian dan/atau perdamaian tahan lama dan transformasi konflik tetap terukur rendah dalam usaha mengurangi konflik dan kekerasan, terutama menciptakan perdamaian dalam jangka waktu yang lama pasca terbentuk solusi dari permasalahan tersebut. Sistematisasi mekanisme yang ada dalam resolusi konflik dalam kategori operasional (yaitu mediasi, negosiasi dan jasa baik, misi pencarian fakta, bantuan kemanusiaan, dan krisis dan inisiatif pengembangan dan rekonstruksi) secara signifikan dapat meningkatkan hasil resolusi konflik dan upaya kerjasama OKI dengan dunia internasional dan regional.²⁰³

Pelaksanaan Resolusi Konflik OKI ini, juga di dukung oleh PBB dengan resolusi No. 61/49 Desember 2006, dimana PBB memutuskan OKI sebagai organisasi pengamat, menyambut upaya Sekretaris Jenderal OKI dalam memperkuat peran OKI dalam pencegahan konflik (*conflict prevention*), menjaga perdamaian (*peacekeeping*), resolusi konflik (*conflict resolution*), dan rehabilitasi konflik di negara anggota serta konflik yang melibatkan masyarakat muslim. PBB dan OKI akan terus bekerjasama dalam mencari solusi untuk masalah global, seperti perdamaian dan keamanan internasional, pelucutan senjata, penentuan nasib sendiri, promosi damai kebudayaan melalui dialog dan kerjasama,

²⁰³Prodromou., 4.

dekolonialisasi, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, terorisme, bantuan darurat dan rehabilitasi, pembangunan sosial, ekonomi, dan teknis kerjasama.²⁰⁴

Sebagai salah satu organisasi internasional yang berfokus pada hak asasi manusia kelompok minoritas, OKI terlibat dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan kelompok separatis Thailand selatan. Atas mandat yang di terima oleh OKI berdasarkan Piagamnya, OKI melindungi hak-hak muslim minoritas dan masyarakat non-anggota, dan untuk menjalankan mandatnya ini, OKI memiliki misi untuk menjaga kelompok minoritas dan komunitas muslim di negara non-anggota dan melakukan intervensi atas nama perlindungan hak asasi manusia yang berkonsentrasi pada agama yang mengikat muslim secara bersama.

Keterlibatan OKI dengan konflik di Thailand ini dimulai pada saat kejadian di Thak Bai, Narathiwat tahun 2004. Kejadian yang menimpa negara observer OKI ini, menimbulkan keprihatinan dari OKI. Sekretaris Jenderal saat itu di pimpin oleh Prof Ekhmelden Ihsanoglu mengancam kejadian yang menewaskan 86 dari masyarakat Muslim dan sejumlah 1300 orang ditangkap dan dibawa ke Kamp Militer yang ada di Pattani.²⁰⁵

Masyarakat Muslim yang berada di Thailand selatan, merupakan masyarakat dengan muslim terbanyak di wilayah tersebut, namun merupakan muslim minoritas di Thailand Selatan. Tindakan pemerintah yang tergolong diskriminatif menimbulkan kelompok muslim Thailand Selatan menjadi

²⁰⁴The United Nations, *Resolution No. 67/264 2013: Cooperation between the United Nations and the Organization of the Islamic Cooperation*, 82nd Plenary Meeting of General Assembly., 17 Mei 2013.

²⁰⁵Gross., 79.

terpinggirkan. Atas dasar inilah OKI ingin masuk dan menyelesaikan permasalahan di Thailand Selatan.

Sekretaris Jenderal OKI, menekankan bahwa pemerintah Thailand harus menjamin hak-hak minoritas Muslim tersebut di daerah selatan. Pemerintah harus memperlakukan umat Islam sama dengan masyarakat lainnya di Thailand tanpa adanya diskriminasi. Sekjen OKI juga menegaskan bahwa pentingnya dialog damai antara pemerintah Thailand dan kelompok separatis Muslim. Sekjen juga meyakinkan bahwa kedaulatan, martabat, dan integritas Thailand juga harus dihormati.²⁰⁶

Seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, OKI masuk ke Thailand Selatan dianggap penting untuk alasan berikut:²⁰⁷

1. Hal ini merupakan kewajiban OKI untuk melindungi hak-hak Muslim minoritas di negara non-Islam. Misi OKI adalah untuk menegakkan hak-hak universal dengan ikatan agama. Oleh sebab itu OKI selalu meminta pemerintah Thailand untuk menjamin hak-hak mereka.
2. OKI memandang bahwa konflik di Thailand Selatan tidak akan dapat diselesaikan secara pihak oleh pemerintah Thailand tanpa partisipasi dari muslim minoritas dan mediasi OKI. OKI percaya bahwa konflik bisa dihilangkan jika pemerintah Thailand dan perwakilan Muslim minoritas duduk bersama di meja negosiasi.

²⁰⁶Waesahme., 48.

²⁰⁷Waesahme., 48-49.

BAB IV

ANALISIS STRATEGI RESOLUSI KONFLIK ORGANISASI

KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM KONFLIK THAILAND SELATAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dengan pertanyaan penelitian, *Bagaimana strategi resolusi konflik yang dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam konflik Thailand Selatan dengan menggunakan model Hourglass?* Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi resolusi konflik OKI merupakan respons terhadap konflik kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan yang sudah berlangsung sejak 2004. Respons tersebut berupa transformasi konflik (*conflict transformation*), penyelesaian konflik (*conflict settlement*), dan pengurangan konflik (*conflict containment*). Targetnya adalah mewujudkan pencegahan konflik kekerasan (*preventing violent conflict*), baik pencegahan secara mendalam (*deep prevention*), maupun secara ringan (*light prevention*).

4.1. Tindakan OKI Terkait Konflik Thailand Selatan

Masuknya OKI sebagai pihak ketiga dalam konflik Thailand Selatan pada tahun 2005 adalah sebagai respons terhadap kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, sesuai dengan batasan masalah, tindakan OKI akan dilihat sampai tahun 2015 dengan keluarnya Resolusi No. 1/42 tahun 2015. Peneliti membagi tindakan OKI yang sudah dilakukan selama sepuluh tahun tersebut kedalam tiga fase, yaitu: 1) Fase pembukaan dialog dengan Thailand (2005-2009); 2) Fase pembukaan dialog dengan kelompok pemberontak (2009); dan 3) Fase pemantauan (*monitoring*) dengan mengeluarkan resolusi-resolusi

lebih mendalam (2010-2015). Pada fase terakhir ini OKI lebih tampak memelihara seluruh upaya dan proses damai yang sudah berlangsung sejak 2005 agar tercipta kondisi yang lebih baik.

4.1.1. Fase I: Membuka Dialog dengan Thailand (2005-2009)

Puncak kekerasan di Thailand Selatan yang terjadi pada tahun 2004 yang ditandai dengan dua peristiwa penting, yakni serangan terhadap Masjid Kru Se pada tanggal 28 April 2008 dan insiden kekerasan di Tak Bai pada tanggal 25 Oktober 2004, telah memakan ratusan korban jiwa, sedangkan sekitar 1.300 orang Muslim ditangkap dan dibawa ke markas militer yang berada di Pattani. Kejadian ini menimbulkan kontroversi besar. Spekulasi mulai bermunculan di antaranya tuduhan kekerasan yang berlebihan, metode yang terlalu keras, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Peristiwa tersebut menarik perhatian dunia internasional. Salah satunya datang dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pada saat itu Sekretaris Jenderal OKI, Professor Ekmelleddin Ihsanoglu, mengecam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand terhadap kaum muslim yang berada di Thailand Selatan. OKI merilis beberapa siaran pers sehubungan dengan kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan. Siaran pers tersebut mengutuk berlanjutnya aksi kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan menyerukan negosiasi dan dialog damai untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di Thailand. OKI juga menyerukan kepada pemerintah Thailand agar

memperlakukan masyarakat Muslim di Thailand Selatan sejajar dengan warga negara yang lainnya.²⁰⁸

Kecaman keras dari OKI mendapatkan respons positif dari pihak Thailand. Pemerintah Thailand mengirimkan utusan ke OKI yang dipimpin oleh delegasi tinggi Thailand, Nissai Vejjajiva dan utusan khusus dari Menteri Luar Negeri Thailand, Dr. Surakiart Sathirathai. Kunjungan ini didasarkan atas inisiatif pemerintah Thailand dalam menanggapi kekhawatiran OKI terhadap wilayah Thailand Selatan. Delegasi tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal OKI di kesekretariatan umum OKI pada 5 Maret 2005.²⁰⁹

Delegasi Thailand menjelaskan fakta-fakta seputar munculnya kekerasan di wilayah Selatan, serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam memulihkan kestabilan di wilayah Selatan. Terkait konflik kekerasan yang terjadi di Krue Se dan Tak Bai, Thailand telah membentuk tim pencari fakta yang sedang mencari kebenaran atas konflik tersebut, kemudian pemerintah melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan. Salah satunya adalah tindakan disiplin bagi pihak yang terlibat dalam konflik kekerasan tersebut dan memberikan kompensasi kepada para korban. Selain itu, delegasi menjelaskan tekad yang kuat dari pemerintah Thailand untuk mempromosikan perdamaian dan keharmonisan di wilayah Selatan dengan mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, serta kebutuhan sosial masyarakat terutama proyek-proyek yang

²⁰⁸Imtiyaz Yusuf, "The Southern Thailand Conflict and the Muslim World," (Paper, Assumption University, 2006), 20.

²⁰⁹The Organization of the Islamic Conference, *Meeting between Secretary General of OIC and High-Level Thai Delegation on the Situation in the Southern Province of Thailand*, Press Release., Jeddah, 9 Maret 2005.

dilakukan di bawah Strategi Pembangunan Bersama dengan Malaysia yang bertujuan untuk membangkitkan semangat masyarakat wilayah Selatan.²¹⁰

Sekretaris Jenderal mengungkapkan apresiasi yang mendalam atas informasi yang telah disampaikan oleh delegasi Thailand. Informasi tersebut akan disampaikan kepada negara anggota OKI. Mengingat status Thailand sebagai negara pengamat dalam OKI dan tentunya juga akan bersinggungan dengan negara-negara muslim, Sekretaris Jenderal OKI menegaskan bahwa mereka akan menghormati kedaulatan Thailand dengan tidak mendukung setiap tindakan separatisme serta sangat menyesali pembunuhan orang yang tidak bersalah, terlepas dari keyakinan agama mereka.²¹¹

Lebih lanjut lagi, Sekretaris Jenderal OKI menekankan bahwa OKI siap untuk memperpanjang kerjasama dan bantuan dalam upaya pemerintah Thailand untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat muslim Selatan. Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya finalisasi oleh Pemerintah Thailand terhadap komisi investigasi independen yang berkaitan dengan kasus kekerasan 2004. Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal OKI mendapatkan undangan dari Menteri Luar Negeri Thailand untuk berkunjung ke Thailand. Realisasi kunjungan OKI ke Thailand Selatan adalah untuk melihat situasi serta kehidupan Muslim di Selatan sebelum Konferensi Menteri Luar Negeri OKI digelar pada akhir Juni 2005, di Sanaa, Yaman.²¹²

²¹⁰Ibid.,

²¹¹Ibid.,

²¹²Ibid.,

Sikap kooperatif antara OKI dengan Thailand ini kemudian membuat Delegasi Thailand menegaskan kembali bahwa Thailand sebagai negara pengamat menekankan pentingnya peranan OKI dalam permasalahan ini.²¹³

Undangan dari Thailand dipenuhi oleh OKI pada tahun 2005. Pada titik inilah secara resmi OKI dapat dikatakan menjadi pihak ketiga yang melakukan intervensi guna mencapai resolusi konflik di Thailand Selatan. Kunjungan OKI ke Thailand Selatan ditujukan untuk meninjau secara langsung kondisi yang dialami oleh masyarakat Muslim Melayu di wilayah Selatan. Sekretaris Jenderal OKI mengutus delegasi yang terdiri atas: Dr. Oumar Jah, Penasihat Sekretaris Jenderal; Duta Besar Abdullah Kharbash, Direktur Departemen Masyarakat Muslim dan Minoritas non-anggota OKI; Mr. Taher Seif, Direktur Departemen Minoritas dan Komunitas Muslim; dan Mr. Ahmed Ibrahim, wartawan dan fotografer di kantor berita internasional Islam. Delegasi khusus ini dipimpin oleh Duta Besar SyedQasimAl-Masri, mantan asisten Sekretaris Jenderal OKI dan Ahli Hak Asasi Manusia Internasional. Hasil dari pengamatan delegasi ini disampaikan dalam Konferensi Menteri Luar Negeri yang berlangsung di Sana'a, Yaman pada akhir Juni 2005.²¹⁴

Delegasi OKI diizinkan menggunakan kantor pemerintahan yang berada di Thailand Selatan. Selain lebih dekat dengan lokasi di mana kekerasan terjadi, penempatan kantor sementara delegasi OKI ini juga berguna untuk meninjau dan meredakan hambatan yang mungkin terjadi untuk mewujudkan negosiasi yang memungkinkan bagi Muslim di wilayah Selatan untuk menikmati hak-haknya

²¹³Ibid.,

²¹⁴The Organization of the Islamic Conference, *OIC Secretary General Dispatches a Good-Offices Mission to Assess Conditions of the Muslims in Southern Thailand*, Press Release.,Jeddah, 1 Juni 2005.

sebagai warga negara. Hal ini juga bertujuan untuk menghentikan tindakan kekerasan aparat keamanan atas penindasan yang mereka lakukan kepada warga Muslim. Dengan begitu delegasi dapat mendukung upaya perdamaian dan stabilitas di Thailand dengan tetap menghormati kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Thailand.²¹⁵

Pimpinan delegasi, Al-Masri, menegaskan akan mengambil tindakan yang diperlukan agar pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dapat dihukum dan korban mendapatkan kompensasi. Pimpinan delegasi juga menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk mencegah terulangnya pelanggaran atau aksi kekerasan di Thailand yang menyangkut komunitas Muslim pada kemudian hari.²¹⁶

Dalam kunjungan OKI ke Thailand, delegasi Thailand menyebutkan bahwa pemerintahnya akan berkomitmen untuk sepenuhnya bekerjasama dengan OKI untuk menemukan cara dan sarana dalam memecahkan masalah Muslim di Thailand Selatan dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka.²¹⁷

Sesuai dengan kerangka kerja yang dimiliki oleh OKI untuk melakukan resolusi konflik, tim delegasi OKI memulainya dengan pengumpulan fakta-fakta. Dari data yang mereka temukan, tim delegasi menyimpulkan bahwa kerusuhan di Thailand bukanlah berakar dari diskriminasi agama. Namun, kerusuhan berakar pada pengabaian budaya wilayah selatan. Hal ini yang sebenarnya memicu konflik hingga terjadi sampai saat ini. Oleh karena itu, Al-Masri menegaskan

²¹⁵Ibid.,

²¹⁶Ibid.,

²¹⁷Ibid.,

bahwa pemerintah Thailand harus mengizinkan kepada masyarakat Muslim selatan untuk mengembangkan budaya dan bahasa mereka.²¹⁸

Setelah kunjungan OKI ke Thailand Selatan, Sekretaris Jenderal OKI terus mengamati dan memantau situasi yang terjadi di Thailand Selatan. Namun, konflik belum sepenuhnya teredam. Hingga pada 18 Oktober 2005, OKI lebih serius lagi mengusahakan agar konflik kekerasan tidak terulang kembali dengan kembali mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap konflik yang berada di wilayah Selatan Thailand. Sekretaris Jenderal melihat bahwa untuk mengatasi akar permasalahan di wilayah Selatan harus segera dilakukan dialog damai agar aspirasi yang positif dari masyarakat Thailand Selatan itu sendiri dapat tersampaikan. Sehingga mereka dapat mempertahankan dan mengekspresikan identitas budaya mereka dan mengelola urusan lokal yang di jamin oleh pemerintah Thailand. Ihsanoglu juga menegaskan kembali bahwa penting untuk menghormati hak asasi manusia terutama di wilayah Selatan.²¹⁹

Respons positif diberikan oleh pemerintah Thailand. Dalam jumpa pers yang dilakukan oleh OKI pada 5 November 2006, Sekretaris Jenderal OKI menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang diambil oleh Perdana Menteri Thailand, Surayud Chulanod untuk mencapai tujuan damai dan adil untuk permasalahan Thailand Selatan dengan negosiasi. Perdana Menteri Thailand juga meminta maaf kepada masyarakat Muslim Thailand Selatan atas kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang banyak memakan korban. Perdana Menteri juga menyelidiki orang hilang sejak kerusuhan tahun 2004. Perdana Menteri bersedia

²¹⁸Yusuf, *The Southern Thailand Conflict.*, 45.

²¹⁹*Ibid.*, 49.

untuk memecahkan masalah atas dasar negosiasi dan melakukan pemulihan Dewan Administrasi Provinsi Selatan.²²⁰

Melihat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand ini, Sekretaris Jenderal memiliki keyakinan penuh untuk menemukan solusi damai atas permasalahan Muslim yang ada di wilayah Selatan. Sekretaris Jenderal OKI juga menyatakan kesiapan OKI untuk berkontribusi dengan semua cara dan sarana yang memungkinkan untuk mencapai perdamaian yang diinginkan. Sekretaris Jenderal kembali menegaskan bahwa pihak OKI bersedia untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Thailand untuk membangun keamanan dan kestabilan di wilayah Selatan tersebut.

Pada tahun 2007 pemerintah Thailand mengundang langsung Sekretaris Jenderal OKI, Ihsanoglu, untuk berkunjung ke Thailand. Kunjungan resmi perdana Sekretaris Jenderal ini berlangsung pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2007. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal diterima oleh Perdana Menteri Thailand, yakni Jenderal Surayud Chulanod; Dewan Keamanan Nasional, Jenderal Sonthi Boonyaratglin; Menteri Luar Negeri, Mr. Nitya Phibulsongkram; dan Menteri Dalam Negeri, Dr Surin Pitsuwan. Kemudian, Sekretaris Jenderal juga mengunjungi Yayasan Islamic Centre of Thailand (FICT) dan berdiskusi dengan perwakilan dari komunitas Muslim.²²¹

Selama berdiskusi dengan pemerintah Thailand, Sekretaris Jenderal mengungkapkan keprihatinan yang mendalam dari OKI atas situasi wilayah Selatan. Dalam diskusi tersebut, Sekretaris Jenderal OKI mendorong pemerintah

²²⁰The Organization of the Islamic Conference, *The OI Secretary-General Welcomes the New Tendencies of the Thai Authorities in Dealing with the Situation of Muslims in Southern Thailand*, Press Release.,Jeddah, 5 November 2006.

²²¹The Organization of the Islamic Conference, *OIC Secretary General Concludes Visit to Thailand*, Press Release.,Jeddah, 3 Mei 2007.

Thailand untuk mempercepat proses yang berkelanjutan dari akuntabilitas sebagai sarana membangun kepercayaan untuk penduduk Muslim Selatan dan untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar atas urusan mereka sendiri dalam ruang lingkup konstitusi Thailand. Atas saran dari Sekretaris Jenderal, pemerintah memberikan jaminan kepada Sekretaris Jenderal untuk bertekad menyelesaikan akar penyebab dari permasalahan di wilayah Selatan ini.²²²

Selanjutnya, delegasi OKI juga meminta pemerintah Thailand untuk menyediakan fasilitas pendidikan di daerah dengan memasukkan mata pelajaran Islam ke dalam kurikulum pendidikan. Pemerintah juga diminta untuk mengizinkan umat Muslim menerapkan hukum syariat di dalam keluarga (urusan perdata). Kemudian, Sekretaris Jenderal meminta pemerintah Thailand untuk mengumumkan amnesti umum bagi mereka yang terlibat dalam kekerasan di wilayah Selatan. Dalam pertemuan ini, OKI juga bersedia untuk berkontribusi dalam proses membangun kepercayaan di wilayah tersebut.²²³

Pada akhir pertemuan, baik OKI maupun pemerintah Thailand saling memuji satu sama lain. Kedua pihak memutuskan untuk memperdalam kerjasama. OKI dan Pemerintah Thailand prihatin atas konflik kekerasan hingga banyak menimbulkan korban tewas, baik yang muslim maupun non-muslim, menegaskan bahwa kekerasan tidak boleh digunakan sebagai alat pemecah masalah.²²⁴

²²²Ibid.,

²²³Ibid.,

²²⁴Ibid.,

4.1.2. Fase II: Membuka Dialog dengan Pemberontak (2009)

OKI tidak hanya berusaha bersikap koperatif dengan pemerintah Thailand guna mencari solusi untuk Thailand Selatan. Pada tahun 2009, OKI juga berupaya mengikutsertakan kelompok pemberontak ke dalam proses perdamaian.

Pertemuan OKI dengan kelompok separatis dimulai dari PULO. Presiden PULO, Al Haj Abu Yasir Fikri diundang ke Kesekretariatan OKI di Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 18-19 April 2009. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PULO menyebutkan bahwa untuk memahami permasalahan yang sebenarnya di Thailand Selatan, semua pihak harus melihat akar permasalahan yang lebih mendalam. Thailand melihat wilayah Selatan sebagai bagian wilayahnya, namun gerakan-gerakan pembebasan melihat Thailand sebagai kekuatan kolonial yang menduduki tanah mereka dengan paksa. Untuk memahami kasus Thailand ini, perwakilan PULO memberikan empat poin penting untuk memahaminya, yakni:²²⁵

1. Konflik antara gerakan pembebasan nasional untuk kemerdekaan Pattani dan Pemerintah Thailand adalah tentang mempertahankan wilayah Selatan Thailand.
2. Akar konflik di wilayah terbut berasal dari keputusan pemerintah Thailand untuk menghapuskan Kesultanan Melayu Pattani pada tahun 1902.
3. Bahasa, adat istiadat, dan budaya mayoritas masyarakat di wilayah Thailand Selatan berbeda dengan mayoritas rakyat Thailand. Di daerah

²²⁵Pattani Post, "PULO President Invited to Speak at OIC Meeting 18-19 April 2009" PataniPost.com, 19 April 2009, <https://web.archive.org/web/20130530040803/http://www.patanipost.com/OIC090419.html>, (Diakses pada 26 February 2016).

Thailand Selatan sekitar 90% dari populasi masyarakatnya adalah Muslim Melayu dengan masyarakat Siam Buddha sebagai minoritas.

4. Tidak adanya pengakuan keberadaan etnis Melayu, dan menolak identitas mereka sehingga menimbulkan hambatan yang besar untuk hidup berdampingan secara damai.

Atas penjelasan akar konflik di atas, perwakilan PULO memberikan enam solusi untuk permasalahan tersebut, yakni.²²⁶

1. Untuk penyelesaian kasus Thailand Selatan tidak bisa dibiarkan sepenuhnya berada di tangan rakyat Thailand Selatan dan Pemerintahan Pattani. Oleh sebab itu perlu intervensi internasional dalam bentuk pemerintahan eksternal atau PBB. Ada beberapa pendapat tentang kehadiran pihak ketiga, yakni dengan kehadiran pihak ketiga akan mengganggu urusan internal Thailand. Namun pihak Thailand Selatan percaya bahwa Thailand Selatan berada di bawah pendudukan kolonial Thailand dan rakyatnya sedang berjuang untuk mendapatkan hak mereka kembali serta menentukan nasib mereka sendiri. Oleh sebab itu intervensi eksternal tidak harus selalu dilihat sebagai pengganggu urusan internal Thailand.
2. Untuk tahap pertama, pemerintah Thailand harus memberikan status khusus kepada wilayah Selatan Thailand. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan kebebasan yang lebih untuk masyarakat Thailand Selatan dalam mengelola urusan internal mereka. Langkah ini tidak akan bertentangan dengan Konstitusi Thailand. Daerah

²²⁶Ibid.,

yang sudah diberikan status khusus di Thailand adalah Bangkok dan Pataya.

3. Masyarakat etnis Melayu meminta pengakuan terhadap pemerintah Thailand sebagaimana Thailand mengakui etnis China. Dengan tidak adanya pengakuan etnis Melayu sampai saat ini, membuat masyarakat etnis Melayu meragukan niat tulus pemerintah Thailand untuk hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat Muslim Thailand Selatan. Juga penting untuk mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa resmi wilayah Selatan agar kitab-kitab berbahasa Jawi (Bahasa Melayu yang menggunakan huruf Arab) dapat di gunakan.
4. Pengakuan untuk hukum Islam di wilayah Melayu Islam, khususnya di bidang hukum perdata berdasarkan Islam.
5. Orang-orang di wilayah Thailand Selatan akan memiliki referendum dibawah pengawasan internasional untuk menentukan nasib mereka sendiri apakah mereka ingin menjadi bagian dari Thailand atau mencapai kemerdekaan sendiri.
6. Thailand ingin mengurangi peran dari Pattani United Liberation Organization (PULO) dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) namun pada saat yang sama Thailand memberikan kredit kepada RKK (unit-unit tempur kecil). RKK bukanlah organisasi, namun mereka adalah kelompok kecil bergerak di desa-desa. Namun kelompok ini merupakan bagian dari organisasi pembebasan lainnya di Thailand Selatan. Abu Yasir mengatakan bahwa jika ingin perdamaian terjadi di Thailand Selatan, maka pemerintah

Thailand harus masuk meja perundingan dengan kelompok pembebasan lainnya yang sudah terorganisir.

Setelah mendengarkan pandangan dan komentar dari perwakilan PULO, OKI mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 23-25 Mei 2009 di Damaskus, Suriah, yakni:²²⁷

- Sebelumnya OKI dan pemerintah Thailand telah membentuk kerjasama pada pertemuan mereka padabulan Mei 2007. Pemerintah Thailand berkomitmen untuk membuat langkah-langkah menuju resolusi dalam permasalahan Muslim di Thailand Selatan dengan mengatasi semua aspek dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil alih urusan internal, menikmati kekhasan budaya dan bahasa mereka dan mengelola sumber daya alam mereka sendiri. Namun, OKI mengungkapkan keprihatinannya atas kurangnya kemajuan dalam komitmen yang di bentuk oleh pemerintah Thailand hampir dua tahun setelah kesepakatan keluar.
- Sekretaris Jenderal akan melakukan kontak dengan Pemerintah Thailand, mengundang negara-negara anggota yang memiliki hubungan kuat dengan Thailand untuk membantu negara tersebut mengimplementasikan secara penuh kesepakatan yang telah terbentuk yang akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan perdamaian si Thailand Selatan.

Pada poin terakhir tersebut, negara anggota OKI yang dinilai memiliki kedekatan dengan Thailand terkait konflik di selatan adalah Malaysia. Dengan tidak memungkiri adanya kepentingan nasional yang dimainkan Malaysia sebagai negara berdaulat, dalam konteks ini peran Malaysia adalah sebagai anggota OKI

²²⁷Ibid.,

yang turut terlibat memecahkan persoalan bersama OKI, terutama guna membuka saluran dialog dengan kelompok pemberontak yang lain. Hasil dari proses dengan melibatkan Malaysia ini baru terlihat pada tahun 2013 ketika Thailand akhirnya mau berdialog dengan BRN, salah satu kelompok pemberontak yang didekati oleh Malaysia untuk proses damai.

Realisasi proses damai dengan mengikut sertakan Malaysia ini dimulai pada tanggal 8 Juni 2009 ketika perwakilan Thailand, Abhisit Vejjajiva pertama kali mengunjungi perwakilan Malaysia, Najib Razak di Malaysia untuk meningkatkan kerjasama dalam mengatasi kekhawatiran di wilayah Selatan.²²⁸

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk mencapai perdamaian. Thailand dan Malaysia juga sepakat untuk bekerjasama dibawah naskah yang dikenal dengan naskah tiga E, yakni pendidikan (*education*), pekerjaan (*employment*), dan kewirausahaan (*entrepreneurship*).²²⁹

Pada tahun yang sama, diadakan pertemuan dalam rangka kerjasama antara Thailand dan Malaysia, sekaligus diadakan sidang komite strategi pembangunan daerah perbatasan bersama. Kedua negara juga berusaha keras untuk menciptakan keadaan yang aman, dan menghindari konflik yang akan muncul antara Thailand dan Malaysia.²³⁰

²²⁸ Berita Sore, "Malaysia-Thailand Kerjasama Tangani Thai Selatan," BeritaSore.com, 9 Juni 2009 <http://beritasore.com/2009/06-09-malaysia-thailand-kerja-sama-tangani-thai-selatan/> (Diakses pada 3 Maret 2016).

²²⁹ John Fuston, "Malaysia and Thailand's Southern Conflict: Reconciling Security and Ethnicity," *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 32, No. 2. (2010), 248.

²³⁰ Suara Merdeka, "Thailand-Malaysia Berdamai," SuaraMerdeka.com, 23 November 2005, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/23/int1.htm>, (Diakses pada 3 Maret 2016).

Pada pertemuan lainnya, Malaysia bersedia membantu Thailand untuk mengakhiri konflik yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Thailand, Surapong Tovichakchaikul bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Anifah bin Haji Anam. Kedua petinggi negara tersebut membahas penangan pemberontakan di wilayah perbatasan. Dalam diskusinya tersebut, kedua pihak akan membentuk perjanjian baru yang nantinya dapat memfasilitasi dan mengatasi pergerakan warga di kedua perbatasan. Selanjutnya, Surapong menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah dalam Kerjasama Bersama ke-12 Thailand-Malaysia dan Sidang Ketiga Komite Strategi Pembangunan Daerah Perbatasan Bersama (JDS) dan rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2009.²³¹

4.1.3. Fase III: Pemantauan Dengan Resolusi Berkelanjutan

Untuk mengulangi komitmen terhadap Masyarakat Muslim dan Minoritas Muslim yang berada di non-anggota OKI dan untuk menawarkan bantuan serta berkontribusi terhadap permasalahan negara tersebut, khususnya OKI, sebagai lanjutan atas perundingan sebelumnya, OKI mengeluarkan Resolusi No. 1/37-MM pada tahun 2010. Pada butir 16 hingga 22 resolusi tersebut dinyatakan bahwa OKI:²³²

- Menyambut kontak dan diskusi yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal dengan perwakilan dari pemerintah Thailand untuk mencari penyelesaian

²³¹Southern Border Area News, "Malaysia Cooperates with Thailand on South Issues," Wbns.Oas.Psu.Ac.Th, http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=110030 (Diakses pada 3 Maret 2016).

²³²The Organisation of the Islamic Conference, *Resolution No. 1/37-MM 2010 On Safeguarding the Rights of Muslim Communities and Minorities in Non-OIC Member States*, 37th Session of the Council of Foreign Ministers, Dushanbe, 18-20 Mei 2010.

damai bagi wilayah Selatan; memuji sikap pemerintah baru untuk memberikan prioritas maksimum untuk resolusi damai; serta menekankan unsur-unsur dasar untuk mencapai penyelesaian yang harus mencakup pengakuan budaya, memberikan hormat terhadap tradisi mereka, mendukung pembangunan ekonomi dan sosial untuk wilayah Selatan.

- Menegaskan kembali bahwa tujuan tersebut dapat dicapai melalui proses yang melibatkan perwakilan dari perwakilan Muslim Thailand Selatan dan rencana tersebut harus disertai dengan rekonsiliasi nasional.
- Sekretaris Jenderal meminta untuk melanjutkan hubungan dengan pemerintah Thailand guna mengembangkan hubungan bilateral dan mendesak pemerintah Thailand untuk memperbaiki hubungan dengan Muslim Thailand Selatan dengan mencari akar permasalahan tersebut.
- Menunda pertimbangan resolusi Dewan Menteri Luar Negeri sampai pertemuan antara Sekretaris jenderal dan Pemerintah Thailand bertemu.
- Menghimbau semua pihak yang terlibat konsultasi dengan pemerintah Thailand untuk menempa platform terkoordinasi guna melengkapi upaya mencari perdamaian serta stabilitas di Thailand Selatan.
- Menyambut usulan Sekretaris Jenderal untuk mengadakan lokakarya tentang resolusi konflik di Thailand Selatan dalam konsultasi dengan pemerintah Thailand, serta untuk mempertimbangkan model resolusi konflik yang telah berhasil diterapkan di negara lain untuk Thailand Selatan.
- Menyambut janji Duta Besar Qassim Al-Masri untuk pengelolaan dialog dengan pemerintah Thailand.

Berbagai resolusi dan upaya yang dilakukan oleh OKI serta kerjasama dengan pemerintah Thailand belum sepenuhnya menghilangkan konflik. Pada tahun 2012, ledakan kembali terjadi di wilayah Yala dan Narathiwat yang menyebabkan 7 orang tewas dan lainnya luka-luka. Melihat kejadian ini, OKI kembali menyangkan aksi teror tersebut. Berdasarkan jumpa pers yang pernah dilakukan antara OKI dan Thailand pada 1 Mei 2007, OKI telah melarang keras aksi teror yang mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat yang tidak bersalah, menyebabkan banyak korban, serta kerugian ekonomi. OKI menegaskan kembali akan memperluas kerja sama dengan Thailand yang statusnya adalah negara pengamat OKI guna menciptakan perdamaian dan ketenangan di provinsi perbatasan Thailand Selatan.²³³

Sebagai komitmen OKI dalam menyelesaikan permasalahan Thailand Selatan, Sekretaris Jenderal OKI kembali bertemu dengan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra di Istanbul pada tanggal 6 Juli 2013. Dalam pertemuan tersebut, pejabat tinggi Thailand lainnya juga turut hadir seperti Wakil Perdana Menteri Thailand, Surapong Tovichakchakul, Menteri Luar Negeri dan pejabat senior lainnya.²³⁴

Diskusi yang dilaksanakan di Istanbul ini memfokuskan pada situasi Thailand Selatan dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Perdana menteri Thailand menyatakan kepada Sekretaris Jenderal bahwasanya pemerintah turut terlibat secara positif dengan OKI dalam

²³³The Organisation of the Islamic Conference, "OIC Statement on the Terrorist Attack that Hit Southern Thailand," OIC-OCI.org, http://oic-oci.org/oicv2/topic?t_id=2454ref=1068&lan=en&x_key=thailand, (Diakses pada 1 April 2015).

²³⁴The Organisation of the Islamic Conference, "Secretary General Discusses muslim in Southern Thailand with Thai Prime Minister," OIC-OCI.org, http://www.oic.oci.org/oicv2/topic/?t_id=8249&ref=3328&lan=en&x_key=thailand, (Diakses pada 15 Juni 2015).

konflik Thailand Selatan dan menekankan keinginannya untuk mendamaikan dan menstabilkan kawasan tersebut.

Atas pernyataan Perdana Menteri Thailand ini, OKI mengucapkan terima kasih dan mendorong pemerintah Thailand untuk mempercepat proses yang berkelanjutan dari langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dan untuk mengatasi akar permasalahan melalui pendekatan yang komprehensif berdasarkan pemberdayaan tanggung jawab Muslim Thailand Selatan untuk mengurus dan mengelola sumber daya mereka melalui sistem yang memungkinkan warga untuk mempertahankan kekhasan budaya dan bahasa mereka serta mengelola sumber daya alam dibawah penghormatan konstitusi negara dan keutuhan wilayah.²³⁵

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal OKI menyambut baik langkah-langkah pemerintah Thailand yang bekerjasama dengan Malaysia untuk memulai dialog konstruktif dengan kelompok Barisan Revolusi Nasional (BRN) dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan. OKI berharap bahwa dialog ini akan menjadi luas dan lebih inklusif sehingga kelompok lain dan kelompok yang mewakili muslim akan berpartisipasi dalam permasalahan Thailand Selatan.²³⁶

Selanjutnya, Perdana Menteri menginformasikan bahwa pemerintah sedang melakukan proses pengangkatan darurat hukum di wilayah Selatan. Kemajuan juga telah terjadi di bidang pendidikan dimana pemerintah mendukung pembentukan sekolah dan pusat pendidikan agama Islam awal tahun 2013. Lebih lanjut lagi, Perdana Menteri menegaskan ingin terlibat dalam solusi damai untuk permasalahan Thailand Selatan. Untuk itu pemerintah mengharapkan dukungan

²³⁵Ibid.,

²³⁶Ibid.,

OKI dalam proses damai tersebut. Pemerintah sudah sepakat dengan kelompok pemberontak untuk gencatan senjata selama bulan Ramadhan berlangsung.²³⁷

Atas perkembangan yang dilaporkan oleh Perdana Menteri Thailand ini, OKI menyambut dengan positif sebagai langkah maju dan sekali lagi menyatakan siap untuk membangun kepercayaan, dialog dan pembangunan ekonomi di daerah melalui dukungan dari berbagai instansi seperti Bank Pembangunan Islam (IDB).²³⁸

OKI menegaskan bahwa posisi mereka disini adalah untuk mendukung semua inisiatif damai dalam penjaminan hak asasi warga negara dengan dikembangkannya saling pengertian, dialog dan kerjasama untuk kemajuan seluruh masyarakat Thailand.²³⁹

Setelah pertemuan OKI dengan Perdana Menteri di Istanbul pada 6 Juni 2013 di atas, OKI mengeluarkan Resolusi No. 1/40 MM tahun 2013 pada pertemuan ke-40 Dewan Menteri Luar Negeri di Conakry, Republik Guinea. Dalam butir 14 hingga 16 resolusi tersebut dinyatakan bahwa OKI:²⁴⁰

- Memuji upaya Sekretaris Jenderal, Pemerintah Thailand dan perwakilan dari penduduk Muslim Thailand Selatan dalam upaya terus menerus untuk memperbaiki situasi Thailand Selatan dan memberikan mereka kesempatan untuk mengelola urusan internal mereka, mempertahankan budaya, bahasa, dan agama serta mengelola sumber daya alam tanpa mengabaikan konstitusi dan integritas teritorial negara.

²³⁷Ibid.,

²³⁸Ibid.,

²³⁹Ibid.,

²⁴⁰The Organisation of the Islamic Conference, *Resolution No. 1/40-MM 2013 On Safeguarding the Rights of Muslim Communities and Minorities in Non-OIC Member States*, 40th Session of the Council of Foreign Ministers, Conakry, 9-11 Desember 2010.

- Menyambut penandatanganan Konsensus Umum Proses Dialog Perdamaian antara pemerintah Thailand dan perwakilan dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tanggal 28 Februari 2013. Panggilan dialog ini mewakili Muslim Thailand Selatan berdasarkan program yang jelas untuk memahami semua isu tentang Islam.
- Himbauan kepada pemerintah Thailand untuk melakukan yang terbaik dan memperluas dialog guna mencapai keadilan dan solusi permanen untuk permasalahan ini sesuai dengan siaran pers (*pressrelease*) tahun 2007.

Pada tahun 2013, Malaysia selaku anggota OKI kembali bertindak sebagai fasilitator antara pemerintah Thailand dengan BRN. Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 28 Februari 2013 di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan ini BRN memiliki lima tuntutan kepada pemerintah Thailand, yaitu:²⁴¹

- Pengakuan BRN sebagai perwakilan rakyat Muslim Thailand Selatan.
- Pengangkatan Malaysia sebagai mediator, bukan fasilitator.
- Keterlibatan negara-negara ASEAN, OKI, dan LSM dalam proses perdamaian.
- Pengakuan keberadaan dan kedaulatan bangsa Melayu Pattani.
- Pembebasan semua pejuang Pattani dari penjara.

Upaya OKI untuk mewujudkan kondisi yang lebih stabil di Thailand Selatan terus berlanjut hingga tahun 2015. Pada tahun ini OKI mengeluarkan Resolusi No. 1/42 tahun 2015, yang mana OKI kembali memuji tindakan yang dilakukan antara Sekretaris Jenderal, Pemerintah Thailand, dan perwakilan Muslim Thailand Selatan. Poin Tambahan di resolusi ini terdapat di butir 19, yang menyatakan

²⁴¹Duncan Mc Cargo, *Southern Thailand: From Conflict to Negotiation?* (Sydney: Lowy Institute, 2014), 8.

dukungan OKI untuk kelanjutan proses dialog damai antara Pemerintah Thailand dan perwakilan dari komunitas Muslim di Thailand Selatan dengan Malaysia sebagai fasilitator, dan memanggil kedua belah pihak untuk membangun rasa saling percaya dalam memulai dialog ini.²⁴²

4.2. Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Berdasarkan Model Hourglass

Berdasarkan Model Hourglass, strategi resolusi konflik yang dilakukan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Thailand Selatan sejak 2005-2015 dilakukan dalam bentuk serangkaian tindakan strategis yang disebut *conflict transformation*, *conflict settlement*, dan *conflict containment*. Ketiga tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan pencegahan konflik kekerasan (*preventing violent conflict*).

Dalam pelaksanaannya, *conflict transformation* dilakukan lewat tindakan respons strategis berupa *cultural peacebuilding* dan *structural peacebuilding*. Adapun tujuan dari *conflict transformation* OKI adalah mencegah konflik kekerasan secara mendalam (*deep prevention*). Kemudian, *conflict settlement* dilakukan dalam bentuk respons strategis *elite peacemaking*. Sedangkan *conflict containment* dilakukan dalam bentuk respons strategis *peacekeeping*. Adapun tujuan dari *conflict settlement* dan *conflict containment* OKI adalah mewujudkan pencegahan konflik secara ringan (*light prevention*). Hal ini disimpulkan setelah mengujikan indikator-indikator keseluruhan komponen yang ada di dalam Model

²⁴²The Organisation of the Islamic Conference, *Resolution No. 1/42-MM 2015 On Safeguarding the Rights of Muslim Communities and Minorities in Non-OIC Member States*, 42nd Session of the Council of Foreign Ministers, Kuwait, 27-28 Mei 2015.

Hourglass tersebut sesuai dengan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan OKI sepanjang tahun 2005-2015 yang sudah dipaparkan sebelumnya.

4.2.1. Conflict Transformation

Menurut Ramsbotham dkk., *conflict transformation* merujuk pada transformasi mendalam dalam institusi-institusi dan wacana-wacana yang mereproduksi kekerasan, maupun transformasi mendalam dalam pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri serta hubungannya satu sama lain.²⁴³ Diujikan dengan definisi tersebut, dari data yang diperoleh, peneliti menganalisis bahwa OKI berupaya untuk mengubah atau mentransformasi tiga hal dalam konflik Thailand Selatan: transformasi institusi, transformasi wacana, dan transformasi hubungan pihak yang berkonflik.

1) Transformasi institusi, maksudnya adalah adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OKI untuk menyarankan perubahan di dalam negeri Thailand sebagai sebuah institusi. Sebagai institusi, Thailand diminta oleh OKI untuk memperbaiki beberapa sektor yang dapat memicu terulangnya konflik, seperti keamanan, pendidikan, dan hukum. Untuk sektor keamanan, pada tahun 2005, ketika meninjau langsung kondisi Thailand Selatan, OKI meminta Pemerintah Thailand agar dapat menghentikan tindakan kekerasan aparat keamanan berupa penindasan terhadap masyarakat Muslim.²⁴⁴ Untuk sektor pendidikan, ketika berkunjung pada tahun 2007, Sekretaris Jenderal OKI meminta Pemerintah Thailand agar dapat menyediakan fasilitas pendidikan di daerah Selatan serta

²⁴³ Oliver Ramsbotham., 31-32.

²⁴⁴ The Organization of the Islamic Conference, *OIC Secretary General Dispatches a Good-Offices Mission to Assess Conditions of the Muslims in Southern Thailand*, Press Release.,Jeddah, 1 Juni 2005.

memasukkan mata pelajaran agama Islam dalam kurikulum pendidikan.²⁴⁵ Sementara untuk sektor penerapan hukum, OKI menuntut Thailand agar mengizinkan umat Muslim untuk melaksanakan hukum syariat untuk urusan perdata.²⁴⁶

2) Transformasi wacana, maksudnya adalah OKI mencoba mengubah wacana kekerasan antara pihak yang berkonflik dengan memberikan penekanan bahwa konflik tidak bersumber dari masalah agama, melainkan dari pengabaian terhadap budaya etnis Melayu. Sehingga menurut OKI, Pemerintah Thailand perlu mengizinkan budaya-budaya Melayu ini berkembang.²⁴⁷ Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada Bab II, masyarakat Melayu Muslim di Selatan telah membentuk kelompok pemberontakan yang tidak jarang membawa agama sebagai legitimasi atas tindakan mereka. Akibatnya tidak jarang kekerasan terjadi karena kebencian terhadap kelompok agama lain. Lewat transformasi wacana, OKI menyayangkan setiap pembunuhan terhadap orang tak bersalah tanpa memandang apa keyakinan agama mereka.²⁴⁸

3) Transformasi hubungan pihak yang berkonflik, maksudnya adalah OKI berupaya agar hubungan antara Pemerintah Thailand dengan Kelompok Pemberontak berangsur-angsur membaik. Tidak sekedar mempertemukan pihak yang berkonflik dalam forum damai, tetapi lebih mendalam dari itu, OKI menginginkan hubungan vertikal pemerintah–kelompok etnis ini berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu OKI mendukung etnis Melayu Muslim dan

²⁴⁵ The Organization of the Islamic Conference, *OIC Secretary General Concludes Visit to Thailand*, Press Release.,Jeddah, 3 Mei 2007.

²⁴⁶ Ibid.,

²⁴⁷ Yusuf, *The Southern Thailand Conflict.*, 45.

²⁴⁸ The Organization of the Islamic Conference, *Meeting between Secretary General of OIC and High-Level Thai Delegation on the Situation in the Southern Province of Thailand*, Press Release., Jeddah, 9 Maret 2005.

Kelompok Pemberontak dalam konteks membantu mencari solusi agar mereka dapat mengurus wilayah Pattani secara mandiri, tetapi tetap menghormati integritas Thailand sebagai negara berdaulat.²⁴⁹

Berdasarkan Model Hourglass, *conflict transformation* meliputi *cultural peacebuilding* dan *structural peacebuilding*.²⁵⁰ Sedangkan kedua hal tersebut merupakan bentuk respons strategis yang dilakukan oleh pihak yang melakukan resolusi konflik dalam menanggapi fase konflik, khususnya *difference* dan *contradiction*.²⁵¹ Salah satu bentuk konkret *cultural peacebuilding* untuk merespons *difference* adalah dengan melakukan misi pencarian fakta untuk mencari akar penyebab konflik. Sedangkan bentuk konkret *structural peacebuilding* untuk merespons *contradiction* adalah dengan melakukan pembangunan masyarakat sipil.²⁵² Kedua respons strategis ini, *cultural peacebuilding* dan *structural peacebuilding*, memiliki tujuan yang sama dalam resolusi konflik yaitu untuk mencegah secara mendalam konflik kekerasan (*deep prevention*).

a) Respons Strategis *Cultural Peacebuilding* Untuk Mewujudkan *Deep Prevention*

Respons strategis *cultural peacebuilding* dilakukan oleh OKI dalam bentuk misi pencarian fakta. Berdasarkan data-data yang telah ditemukan, misi pencairan fakta OKI di Thailand Selatan berawal dari pertemuan kedua belah pihak di Kesekretariatan OKI di Jedah pada awal Maret 2005. Terbukanya jalan

²⁴⁹ Ibid.,

²⁵⁰ Ibid., 14.

²⁵¹ Oliver Ramsbotham, et.al., 16.

²⁵² Ibid., 16.

untuk melakukan pencarian fakta bermula dari pernyataan OKI yang menyayangkan terjadinya kekerasan di Thailand pada tahun 2004. Kemudian utusan Thailand yakni Nissai Vejjajiva datang ke Kesekretariatan OKI di Jeddah. Dalam pertemuan ini Thailand membuka ruang bagi OKI untuk melakukan pencarian fakta dengan mengundang mereka datang langsung ke Thailand untuk melihat lebih jelas situasi yang telah terjadi.

Tim pencari fakta berupaya untuk mendalami konflik di Thailand Selatan. Tim tersebut masuk ke Thailand pada bulan Mei 2005 di bawah pimpinan Duta Besar Al-Masri. Tujuannya adalah untuk meninjau dan melihat apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan konflik berkepanjangan di Thailand Selatan. Setelah melakukan identifikasi selama beberapa hari, tim ini menemukan bahwa akar permasalahan dari Thailand Selatan bukanlah berakar dari diskriminasi agama, melainkan berakar dari pengabaian budaya etnis Melayu di wilayah Selatan. Akibat pengabaian yang berlarut-larut dan tidak ada tindakan yang serius dari pemerintah Thailand, mengakibatkan etnis Muslim Melayu di Thailand Selatan menjadi kelompok minoritas yang harus menderita pelanggaran hak asasi manusia, seperti tindakan kekerasan.²⁵³

Tidak hanya melihat konflik dari sisi Thailand, OKI juga berupaya melihat dan menemukan fakta-fakta dari sisi kelompok pemberontak. Inilah bentuk *deep prevention* yang dilakukan oleh OKI pada tahun 2009 dengan mengundang Abu Yasir Fikri, pemimpin PULO, ke Arab Saudi. Dari sana, OKI mendapatkan perspektif PULO bahwa bahwa inti dari permasalahan sebenarnya adalah pemerintah Thailand tidak mengakui keberadaan etnis Melayu Thailand Selatan.

²⁵³ The Organization of the Islamic Conference, *OIC Secretary General Dispatches a Good-Offices Mission to Assess Conditions of the Muslims in Southern Thailand*, Press Release., Jeddah, 1 Juni 2005.

Dalam pertemuan tersebut, Abu Yasir Fikri mengajukan solusi untuk permasalahan tersebut, yakni Thailand harus melakukan pengakuan atas etnis Muslim Melayu dan menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dari Thailand Selatan.²⁵⁴ Hal ini tidak jauh berbeda dengan kesimpulan tim pencari fakta OKI pada tahun 2005 sebelumnya.

OKI melakukan misi pencarian fakta bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang akar konflik. Mengetahui akar konflik sangat penting bagi OKI sebagai preventer agar dapat mewujudkan pencegahan konflik kekerasan secara mendalam (*deep prevention*). Ketika diketahui bahwa salah satu akar konflik adalah pengabaian budaya etnis Melayu di Selatan, hal ini sesuai dengan salah satu faktor penyebab konflik menurut Ramsbotham, et.al., yaitu stratifikasi etnis. Lebih lanjut, agar *deep prevention* tercapai, untuk konflik yang berakar dari stratifikasi etnis, preventer dapat menyarankan kepada pihak yang berkonflik untuk menciptakan kondisi yang setara. Setara yang dimaksud adalah ketika tidak ada pihak atau etnis yang mendominasi pihak atau etnis lain. Hal itu dapat dicapai jika pihak yang berkonflik mau untuk berbagi kekuasaan (*power-sharing*).²⁵⁵

Berbagi kekuasaan yang disarankan OKI terhadap Thailand lewat respons *cultural peacebuilding* adalah saling mengakui keberadaan satu sama lain. Sebagai preventer OKI terus mendorong pemerintah Thailand untuk terus mempromosikan perdamaian dengan memperlakukan masyarakat Thailand Selatan sejajar dengan masyarakat Thailand lainnya. Seajar yang dimaksud

²⁵⁴ Pattani Post.,

²⁵⁵ Ramsbotham., 133

adalah ketika pemerintah Thailand mau mengakui keberadaan etnis Muslim Melayu dengan segenap budaya dan nilai-nilai mereka.

Duta Besar Al-Masri dalam kunjungannya tahun 2005 juga menegaskan bahwa pemerintah Thailand harus mengizinkan masyarakat Muslim Thailand Selatan untuk mengembangkan budaya dan bahasa mereka. Thailand juga disarankan oleh OKI agar mau menyediakan fasilitas pendidikan dengan memasukkan mata pelajaran Islam ke dalam kurikulum. Masyarakat Muslim juga semestinya diizinkan oleh Thailand untuk menetapkan hukum syariat pada persoalan perdata. Dengan begitu dalam kehidupan sosial akan ada pembagian (*sharing*) antara etnis Thai dengan Melayu sehingga stratifikasi dapat dihilangkan. Atas saran dari OKI tersebut, pemerintah memberikan jaminan kepada Sekretaris Jenderal OKI untuk menyelesaikan akar permasalahan konflik Thailand Selatan.²⁵⁶

b) Respons Strategis *Structural Peacebuilding* dalam Mewujudkan *Deep Prevention*

Respons strategis *structural peacebuilding* dilakukan oleh OKI dalam bentuk membantu pembangunan masyarakat sipil di Thailand Selatan. Upaya OKI dalam membantu pembangunan masyarakat di Thailand Selatan dilakukan dengan memperbaiki struktur internal Thailand yang kiranya dapat memperbaiki stratifikasi etnis di tengah masyarakat. Namun, sebagai pihak ketiga dan organisasi internasional yang menghormati kedaulatan sebuah negara, OKI melakukannya sesuai dengan kapasitasnya yaitu lewat saran-saran konstruktif

²⁵⁶ The Organization of the Islamic Conference, *OIC Secretary General Dispatches a Good-Offices Mission to Assess Conditions of the Muslims in Southern Thailand*, Press Release.,Jeddah, 1 Juni 2005.

OKI kepada pemerintah Thailand. Hal ini tidak lepas dari penyebab konflik yang dipahami oleh OKI berdasarkan tim pencari fakta OKI di Thailand.

Dalam pencarian fakta yang dilakukan oleh OKI, telah diketahui ternyata permasalahan utama yang terjadi di wilayah Selatan adalah pengabaian budaya dan bahasa Melayu. Hal ini memicu konflik berkepanjangan antara pemerintah Thailand Selatan dengan masyarakat Pattani. Thailand Selatan menganeksasi dan menghilangkan Kesultanan Pattani yang berbasis Melayu Muslim dan menggantikannya dengan budaya dan sistem pemerintahan Siam yang mayoritas beragama Buddha. Masyarakat Melayu tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam mengelola pemerintahan, khususnya wilayah Selatan. Kemudian, hukum-hukum Islam juga diabaikan dan harus mengikuti hukum-hukum pusat yang telah dibentuk oleh pemerintah Thailand. Hal-hal seperti rupanya menjadikan masyarakat Muslim Melayu menjadi terdiskriminasi hingga penyebab konflik lain pun terjadi, yaitu pelanggaran hak asasi manusia.

Melihat akar-akar permasalahan ini, OKI telah memberikan saran-saran konstruktif kepada Thailand sesuai dengan kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang melakukan *deep prevention*. Dilihat dari upaya OKI untuk membantu pembangunan masyarakat di selatan, ada dua tuntutan dan saran OKI kepada pemerintah Thailand, yaitu: pemberian otonomi khusus kepada Thailand Selatan yang diduduki oleh etnis Muslim Melayu dan pemberian perlindungan dan pengawasan hak asasi manusia di Thailand Selatan.

Dua tuntutan OKI ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ramsbotham, dkk., di suatu negara. Otonomi dapat disarankan atau diberikan ketika konflik dipicu mengenai bentuk tindakan yang dapat diambil oleh

preventer setelah mereka memahami penyebab konflik oleh permasalahan stratifikasi etnis. Dalam hal ini otonomi adalah bentuk lain dari *power-sharing*.²⁵⁷ Namun, berbeda dengan bentuk *power-sharing* yang disarankan OKI pada tahap *cultural peacebuilding* sebelumnya, yang sebatas mendorong pemerintah Thailand mengakui kebudayaan etnis Muslim Melayu, di sini *power-sharing* pada tahap *structural peacebuilding* lebih berbentuk tindakan terstruktur yang terintegrasi dengan struktur pemerintahan di Thailand di mana OKI menyarankan diberikannya otonomi (*autonomy*) kepada wilayah Thailand Selatan.

Dengan begitu secara struktural masyarakat etnis Melayu dapat hidup berdampingan dengan mayoritas masyarakat Buddha tanpa harus menciderai kedaulatan dan integritas Thailand sebagai sebuah negara. Pemberian sebatas otonomi ini tampak pada sikap OKI yang sampai saat ini tidak pernah mendukung kelompok pemberontak untuk membentuk negara sendiri, meskipun pernah disuarakan oleh PULO di hadapan OKI tahun 2009.²⁵⁸

Upaya mendorong pembangunan masyarakat dengan menganjurkan otonomi untuk Thailand Selatan ini sudah dimulai oleh OKI pada tahun 2007. Ketika itu OKI mengancam dan mendesak pemerintah Thailand agar mempercepat proses pemulihan wilayah Selatan dan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat Muslim untuk mengatur dan mengelola wilayah mereka sendiri dalam ruang lingkup konstitusi Thailand. Kecaman ini mendapatkan respon positif dari Thailand, yang mana Thailand berjanji akan memulihkan Dewan Administrasi

²⁵⁷ Ibid., 133

²⁵⁸ The Organization of the Islamic Conference, *Meeting between Secretary General of OIC and High-Level Thai Delegation on the Situation in the Southern Province of Thailand*, Press Release., Jeddah, 9 Maret 2005.

Provinsi Selatan. Thailand juga berjanji akan membangun perdamaian dan kestabilan di wilayah tersebut.²⁵⁹

Namun, karena konflik di Thailand Selatan yang mulanya karena pengabaian etnis menjadi berlanjut dalam bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia, OKI juga mengajak Thailand bekerja sama untuk melakukan perlindungan terhadap umat Muslim yang berada di wilayah Selatan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ramsbotham, dkk., yaitu ketika konflik di suatu negara terjadi salah satunya karena adanya pelanggaran hak asasi manusia (*human rights abuse*), maka bentuk *deep prevention* yang dapat dilakukan oleh *preventer* adalah melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights monitoring/protection*).²⁶⁰

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dilakukan oleh pihak OKI sejak awal mereka masuk ke Thailand tahun 2005. OKI yang datang diundang oleh pemerintah Thailand ketika itu menempati kantor pemerintahan di wilayah Selatan. Salah satu tujuannya adalah untuk meredakan hambatan yang dihadapi untuk melakukan negosiasi yang memungkinkan bagi Muslim di wilayah Selatan untuk menikmati hak-haknya sebagai warga negara. hal ini juga bertujuan untuk menghentikan tindak kekerasan aparat keamanan atas penindasan yang dilakukan mereka kepada masyarakat Muslim. OKI juga menegaskan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan,

²⁵⁹ The Organization of the Islamic Conference, *OIC Secretary General Concludes Visit to Thailand*, Press Release.,Jeddah, 3 Mei 2007.

²⁶⁰ Ramsbotham., 133

memberi kompensasi kepada korban dan mencegah terulangnya pelanggaran tersebut.²⁶¹

Dalam pernyataan Sekretaris Jenderal OKI, OKI selalu menyerukan bahwa penting untuk menghormati hak asasi manusia di Thailand Selatan. Sebagai tanggapan dari pemerintah Thailand, pemerintah meminta maaf atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya dan bersedia menyelidiki orang hilang sejak tahun 2004.²⁶²

Tidak hanya pelanggaran HAM dalam bentuk penggunaan kekerasan yang ingin diselesaikan, OKI juga mendorong Thailand agar menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya seperti dilarangnya mendirikan sekolah-sekolah Islam, dilarangnya belajar agama Islam di sekolah, dan dilarangnya menggunakan hukum Islam untuk urusan perdata.²⁶³ Upaya penghapusan diskriminasi ini mulai terlihat tahun 2013 ketika pemerintah Thailand mendukung pembentukan sekolah dan pusat pendidikan Islam.²⁶⁴

Dari pemaparan di atas semakin diperjelas bahwa OKI memiliki kapasitas untuk melakukan resolusi konflik di Thailand Selatan lewat respons berupa *conflict transformation* yang terdiri dari *cultural peacebuilding* dan *structural peacebuilding* untuk mencegah terulangnya konflik kekerasan (*preventing violent conflict*), terutama pencegahan secara mendalam (*deep prevention*).

²⁶¹ The Organization of the Islamic Conference, *Meeting between Secretary General of OIC and High-Level Thai Delegation on the Situation in the Southern Province of Thailand*, Press Release., Jeddah, 9 Maret 2005.

²⁶² The Organization of the Islamic Conference, *The OI Secretary-General Welcomes the New Tendencies of the Thai Authorities in Dealing with the Situation of Muslims in Southern Thailand*, Press Release., Jeddah, 5 November 2006.

²⁶³ The Organization of the Islamic Conference, *OIC Secretary General Concludes Visit to Thailand*, Press Release., Jeddah, 3 Mei 2007.

²⁶⁴ The Organisation of the Islamic Conference, "Secretary General Discusses muslim in Southern Thailand with Thai Prime Minister," OIC-OCI.org, http://www.oic.oci.org/oicv2/topic/?t_id=8249&ref=3328&lan=en&x_key=thailand, (Diakses pada 15 Juni 2015).

4.2.2. Conflict Settlement

Conflict settlement merujuk pada pencapaian kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat mencegah atau mengakhiri konflik bersenjata.²⁶⁵ *Conflict settlement* dapat disamakan dengan *peacemaking* yang bentuk konkretnya adalah negosiasi atau mediasi pihak-pihak yang berkonflik agar tercapai kesepakatan.²⁶⁶ Dalam Model Hourglass, *peacemaking* adalah respons pihak yang melakukan resolusi konflik ketika memahami *polarization* dalam konflik. *Peacemaking* ini dilakukan dalam bentuk diplomasi seperti pengiriman duta khusus, melakukan mediasi, dan negosiasi.²⁶⁷ Adapun menurut Ramsbotham, dkk., diplomasi resmi seperti mediasi maupun tidak resmi seperti dialog merupakan tindakan yang mesti dilakukan agar pencegahan konflik secara ringan (*light prevention*) dapat diwujudkan.²⁶⁸

Dilihat dari data-data yang ditemukan, OKI telah merespons konflik di Thailand Selatan dengan melakukan *conflict transformation* dalam bentuk *peacemaking*. Dengan begitu dapat dipahami pula bahwa tindakan OKI tersebut dimaksudkan untuk mencegah secara ringan konflik kekerasan di Thailand. OKI melakukan *peacemaking* di Thailand Selatan dengan cara membentuk dan mengirim duta khusus ke Thailand di bawah pimpinan Duta Besar Al-Masri, menjadi mediator dan membuka saluran-saluran diplomasi baik dengan Thailand maupun pemberontak, dan tetap melakukan negosiasi guna tercapainya *light prevention*. Semua upaya tersebut sudah dilakukan oleh OKI sejak awal mereka terlibat dalam upaya perdamaian di selatan yaitu tahun 2005.

²⁶⁵ Oliver Ramsbotham, et.al., 31.

²⁶⁶ Ibid., 14.

²⁶⁷ Ibid., 16.

²⁶⁸ Ibid., 135.

Pertemuan pertama kali terjadi pada Maret 2005, dimana Thailand datang mengunjungi OKI atas inisiatif Thailand terhadap kecaman OKI. Pertemuan awal inilah yang menjadi dasar dari pertemuan-pertemuan selanjutnya.

Pada proses selanjutnya, OKI di undang oleh pemerintah Thailand untuk berkunjung dan melihat situasi yang sebenarnya di Thailand. Dengan pertemuan ini, berarti Thailand menunjukkan sikap keterbukaannya terhadap keikutsertaan OKI dalam menangani permasalahan yang ada di Thailand Selatan. Dan pada saat kunjungan tersebut, Thailand mengizinkan OKI untuk menetap di kantor pemerintahan Thailand Selatan.

Upaya mediasi terus berlanjut, ketika OKI di undang kembali ke Thailand secara resmi untuk membicarakan permasalahan wilayah Selatan pada tahun 2007. Sebagai hasilnya, Thailand menerima OKI secara baik dan berkomitmen untuk memperdalam hubungannya dengan OKI.²⁶⁹ Hal tersebut merupakan perkembangan positif, dimana Thailand yang awalnya menutup kasus ini untuk dunia luar namun saat keterlibatan OKI dalam konflik tersebut, Thailand menerima dan terus melakukan pertemuan dengan OKI untuk membahas konflik yang terjadi di wilayah Selatan.

OKI lewat Sekretaris Jenderalya juga sempat melakukan diplomasi tidak resmi yaitu ketika Sekretaris Jenderal mengunjungi Yayasan Islam Centre of Thailand (FICT) dan berdiskusi dengan perwakilan dari komunitas Muslim di Pattani.²⁷⁰

Pada tahun 2013, OKI kembali bertemu secara resmi dengan Thailand di Istanbul. Dalam pertemuan tersebut, pihak Thailand menegaskan bahwa perdana

²⁶⁹ The Organization of the Islamic Conference, *OIC Secretary General Concludes Visit to Thailand*, Press Release.,Jeddah, 3 Mei 2007.

²⁷⁰The Organisation of Islamic Conference, Press Release, 3 Mei 2007.

menteri ingin terlibat dalam solusi damai untuk permasalahan Selatan dan ingin mendapatkan dukungan dalam proses damai tersebut. Pernyataan dari Perdana Menteri Thailand ini memberikan gambaran positif tentang peran penting OKI dalam penyelesaian konflik wilayah Selatan. Pernyataan ini juga kembali menegaskan bahwa OKI sebagai pihak mediator diterima oleh pihak Thailand. Terakhir, dalam pertemuan tersebut, OKI menegaskan bahwa OKI mendukung semua inisiatif damai dalam penjaminan hak asasi warga negara dengan dikembangkannya saling pengertian, dialog dan kerjasama untuk seluruh kemajuan Thailand.²⁷¹

Peran OKI sebagai mediator disini juga mendapatkan perhatian dari perwakilan kelompok separatis, yakni Abu Yasir Fikri yang merupakan presiden dari PULO. OKI mengundang Abu Yasir Fikri untuk membicarakan permasalahan Thailand Selatan di Kesekretariatan OKI pada tanggal 18-19 April 2009. Undangan OKI ini diterima oleh perwakilan PULO. Dalam pertemuan tersebut, Abu Yasir Fikri menyampaikan akar permasalahan yang terjadi sebenarnya di wilayah Selatan, dan melalui OKI, Abu Yasir Fikri menawarkan solusi damai kepada pemerintah Thailand.²⁷² Dengan berhasilnya OKI mengadakan pertemuan dengan perwakilan PULO, OKI berperan sebagai penghubung antara kedua pihak. Namun, peran OKI sebagai mediator pada tahap tersebut masih bersifat pasif karena belum berhasil mendudukkan pemerintah Thailand dengan pemberontak dalam satu meja perundingan.

²⁷¹ The Organisation of the Islamic Conference, "Secretary General Discusses muslim in Southern Thailand with Thai Prime Minister," OIC-OCI.org, http://www.oic.oci.org/oicv2/topic/?t_id=8249&ref-3328&lan=en&x_key=thailand, (Diakses pada 15 Juni 2015).

²⁷² Pattani Post.,

Untuk mengatasi kendala tersebut, sebagai mediator OKI mendorong negara-negara anggotanya yang terdekat dengan Thailand agar turut terlibat dalam proses perdamaian. Hal ini direspons dengan baik oleh Malaysia. Terlepas dari kepentingan politik yang dimainkan oleh Malaysia yang memang memiliki hubungan baik dengan Thailand, tampaknya Malaysia telah menjadi fasilitator perdamaian sebagai negara anggota OKI.

Pendekatan Malaysia terhadap Thailand telah dimulai pada tahun 2009 dengan mengadakan pertemuan-pertemuan bilateral. Hasilnya terlihat pada tahun 2013 ketika Malaysia berhasil memfasilitasi pertemuan Thailand dengan salah satu kelompok pemberontak, yaitu BRN. Ini merupakan dialog damai pertama yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok separatis. Dialog ini mewakili Muslim Thailand Selatan untuk memahami semua tentang Islam.²⁷³

Keberhasilan ini bukan sesuatu yang mengejutkan mengingat kedekatan BRN dengan Malaysia. Dengan begitu, terbukanya saluran dialog secara langsung antara pihak yang berkonflik ini telah menjadi suatu pencapaian tersendiri bagi OKI selaku inisiator perdamaian kedua belah pihak. Karena dalam sikapnya, OKI mendukung apa saja bentuk upaya perdamaian kedua belah pihak, sehingga tidak menjadi masalah ketika menggunakan Malaysia sebagai fasilitator perdamaian. BRN yang dekat dengan Malaysia sempat meminta agar Malaysia dinaikkan statusnya dari fasilitator menjadi mediator. Namun, hal tersebut tidak digubris oleh OKI.²⁷⁴

²⁷³ The Organisation of the Islamic Conference, "Secretary General Discusses muslim in Southern Thailand with Thai Prime Minister," OIC-OCI.org, http://www.oic.oci.org/oicv2/topic/?t_id=8249&ref=3328&lan=en&x_key=thailand, (Diakses pada 15 Juni 2015).

²⁷⁴ Duncan Mc Cargo., 8.

Dilihat dari perkembangan sejak tahun 2005, yang mana OKI satu per satu berhasil membuka saluran-saluran mediasi dengan pihak yang berkonflik, maka dapat dikatakan tujuan *peacemaking* yang dilakukan oleh OKI sudah tercapai yaitu pencegahan konflik secara ringan (*light prevention*). Disini, bisa dilihat bahwa, pertemuan-pertemuan yang terus berlangsung antara OKI dan Thailand mendapatkan respons positif dari pihak Thailand yang mempercayai OKI sebagai pihak mediator. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok separatis, yang saat itu pertemuannya diwakilkan oleh PULO. Pertemuan ini menunjukkan adanya upaya dan keinginan untuk penyelesaian, baik dari pihak Thailand, maupun pihak kelompok separatis. Awalnya OKI bertindak sebagai mediator pasif, dimana OKI hanya bertemu pihak yang satu dan pada waktu yang lain OKI juga bertemu dengan pihak lain. Namun, saat OKI menggunakan Malaysia sebagai fasilitator untuk permasalahan di Thailand Selatan, perubahan positif mulai terjadi.

4.2.3. Conflict Containment

Conflict containment menurut Ramsbotham, dkk., meliputi *peacekeeping* dan *war limitation*. Namun, karena konflik di Thailand Selatan belum mencapai tahap perang, maka *conflict containment* lebih merujuk kepada *peacekeeping*. Secara tradisional dipahami bahwa *peacekeeping* dilakukan dengan memisahkan pihak yang berkonflik dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Namun, sering kali saat ini *peacekeeping* dilakukan dengan tugas-tugas sipil seperti memonitor dan menjaga ketertiban.²⁷⁵ Dengan begitu dipahami bahwa *peacekeeping* tidak

²⁷⁵Ramsbotham, et al., 30.

harus berbentuk pengerahan pasukan perdamaian seperti yang sering dilakukan oleh PBB. Tetapi juga bisa dilakukan melalui pengawasan tanpa senjata.

Dari data yang ditemukan, OKI tidak memiliki pasukan bersenjata yang dapat ditempatkan di Thailand Selatan. Namun, untuk melakukan tugas-tugas sipil seperti memonitor dan menjaga ketertiban di Thailand Selatan, OKI memiliki kemampuan tersebut. Hal ini tetap sesuai dengan Model Hourglass, karena menurut Ramsbotham sendiri ketika konflik berada pada tahap kekerasan, *peacekeeping* yang dilakukan lebih dalam bentuk manajemen dan pengurangan krisis (*crisis management and containment*).²⁷⁶ Sasaran dari dilakukannya manajemen krisis ini adalah pencegahan ringan konflik kekerasan (*light prevention*)²⁷⁷

OKI terus-menerus memonitor konflik yang terjadi dan berusaha menahan gejala yang terjadi antara masyarakat Muslim Thailand Selatan dengan pemerintah Thailand. OKI rutin mengeluarkan resolusi yang merupakan hasil pemantauan mereka terhadap perkembangan konflik di Selatan. Resolusi tersebut telah dikeluarkan pada tahun 2010, 2013, dan 2015. Namun, jika dilihat dari substansinya, *peacekeeping* OKI dalam bentuk monitoring, sebetulnya telah dimulai sejak tahun 2005.

Ketika itu OKI menjaga agar kerusuhan tidak terjadi kembali dan mengancam akan melakukan hukuman terhadap pihak yang memperkeruh suasana. Kemudian, dalam setiap pernyataannya, OKI selalu menekankan bahwa Thailand harus memberikan kebebasan kepada masyarakat Thailand Selatan untuk mengelola budaya dan bahasa mereka sendiri. Disamping itu, OKI juga

²⁷⁶ Ibid., 16 dan 147.

²⁷⁷ Ibid., 125.

mendukung setiap tindakan yang dilakukan Thailand dalam mengupayakan perdamaian. Disinilah strategi OKI untuk menjaga agar konflik tidak meluas. Dengan dukungan OKI terhadap tuntutan masyarakat Muslim Melayu dan dukungan OKI terhadap upaya pemerintah Thailand dalam perdamaian menjadikan situasi yang awalnya memanas mulai mereda.

Peranan OKI sebagai pihak ketiga ini selalu mengupayakan pertemuan agar OKI mengetahui perkembangan konflik. Baik itu dari pemerintah Thailand maupun dari kelompok separatis, walaupun yang sering mengadakan pertemuan adalah OKI dan pemerintah Thailand. Hal ini dilakukan OKI agar arus konflik terus mereda dan mengurung konflik agar tidak terus menerus meluas. Monitoring juga terus dilakukan OKI, bahkan pada saat Malaysia bertindak sebagai fasilitator pertemuan Thailand dengan BRN. OKI menyambut dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Thailand dan BRN ini agar terus berlangsung dalam dialog damai.

Insiden-insiden kecil masih mewarnai Thailand Selatan. Namun, fase konflik sejak tahun 2004 menunjukkan penurunan hingga sekarang. Meskipun begitu, OKI masih terus melakukan pemantauan bahkan hingga saat ini. Sehingga dapat dikatakan sejauh ini, *conflict containment* yang dilakukan OKI di Thailand Selatan lewat tindakan *peacekeeping* tengah berupaya mewujudkan *light prevention* berupa manajemen krisis.

BAB V

PENUTUP

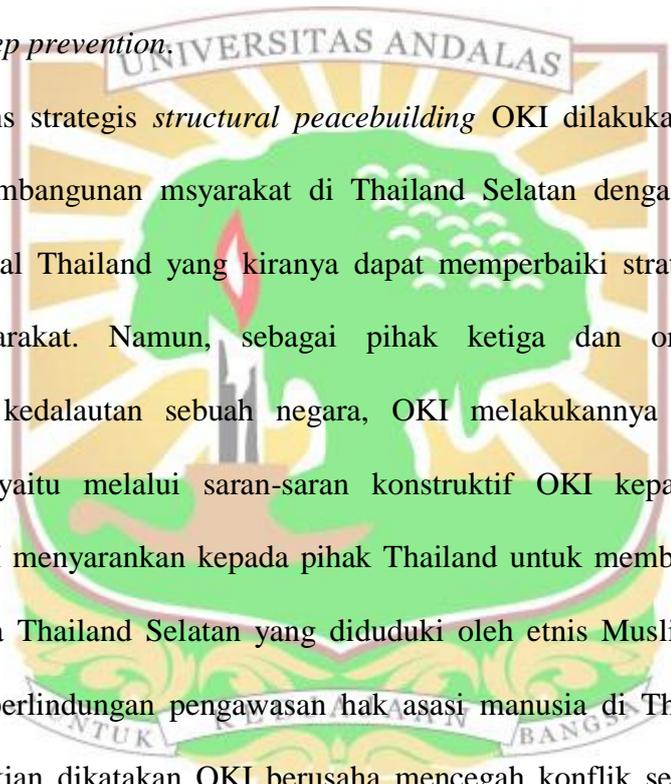
5.1. Kesimpulan

Pada tahun 2004 terjadi konflik kekerasan di wilayah Thailand Selatan antara pemerintah Thailand dengan masyarakat Muslim Melayu. Secara historis, akar konflik dimulai ketika Kesultanan Pattani dijadikan wilayah Kerajaan Siam melalui Traktat Anglo-Siam tahun 1902. Perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama masyarakat yang berbeda ini menjadi alasan konflik hingga saat ini. Melihat kejadian tahun 2004 di Thailand Selatan yang banyak menelan korban jiwa dengan daya rusak yang masif, OKI sebagai organisasi internasional yang mewadahi negara-negara Islam yang juga berfokus kepada permasalahan minoritas Muslim di wilayah non-anggota menaruh perhatian lebih kepada konflik tersebut. Keterlibatan awal OKI di Thailand Selatan dimulai pada tahun 2005, dimana OKI pertama kali mengancam tindak kekerasan yang diderita oleh masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan. Disini, OKI hadir sebagai pihak yang melaksanakan resolusi konflik.

Dilihat dengan menggunakan Model Hourglass, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi resolusi konflik yang dilakukan OKI di Thailand Selatan adalah: 1) *conflict transformation*, 2) *conflict settlement*, dan 3) *conflict containment*. Tujuannya adalah mencegah agar konflik kekerasan tidak terulang kembali (*preventing violent conflict*) baik itu mencegah secara mendalam (*deep prevention*) maupun secara ringan (*light prevention*).

1) Dalam menjalankan *conflict transformation*, OKI merespons secara strategis konflik dengan *cultural peacebuilding* dan *structural peacebuilding*.

Respons strategis *cultural peacebuilding* dilakukan dengan misi pencarian fakta untuk mencari akar konflik dari tahun 2005. Dari hasil pencarian akar konflik, ternyata ditemukan permasalahan utama konflik Thailand Selatan disini adalah persoalan etnis yang kemudian meluas menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Atas temuan ini OKI menyarankan kepada Pemerintah Thailand agar melakukan power-sharing secara kultural dengan mengakui keberadaan etnis Muslim Melayu dengan segenap budaya dan nilai-nilai mereka. Dengan begitu OKI bermaksud melakukan *deep prevention*.



Respons strategis *structural peacebuilding* OKI dilakukan dengan turut membantu pembangunan masyarakat di Thailand Selatan dengan memperbaiki struktur internal Thailand yang kiranya dapat memperbaiki stratifikasi etnis di tengah masyarakat. Namun, sebagai pihak ketiga dan organisasi yang menghormati kedaulatan sebuah negara, OKI melakukannya sesuai dengan kapasitasnya yaitu melalui saran-saran konstruktif OKI kepada pemerintah Thailand. OKI menyarankan kepada pihak Thailand untuk memberikan otonomi khusus kepada Thailand Selatan yang diduduki oleh etnis Muslim Melayu dan memberikan perlindungan pengawasan hak asasi manusia di Thailand Selatan. Dengan demikian dikatakan OKI berusaha mencegah konflik secara mendalam (*deep prevention*).

2) Dalam menjalankan *conflict settlement*, OKI melakukan respons strategis *peacemaking* dengan mengirimkan duta khusus ke Thailand Selatan, membuka saluran diplomasi, menjadi mediator Pemerintah Thailand dengan Kelompok Pemberontak, serta melakukan negosiasi dengan kedua belah pihak. Tujuan OKI

melakukan hal tersebut, jika dilihat dari resolusi konflik adalah untuk mencegah konflik kekerasan secara ringan (*light prevention*).

3) Dalam menjalankan *conflict containment*, OKI melakukan respons strategis *peacekeeping* dengan terus-menerus memonitor konflik yang terjadi dan berusaha untuk menahan gejolak yang terjadi antara masyarakat Muslim Thailand Selatan dengan pemerintah Thailand lewat resolusi yang dikeluarkan tahun 2010, 2013, dan 2015. Tujunya adalah untuk mencegah konflik kekerasan secara ringan (*light prevention*).

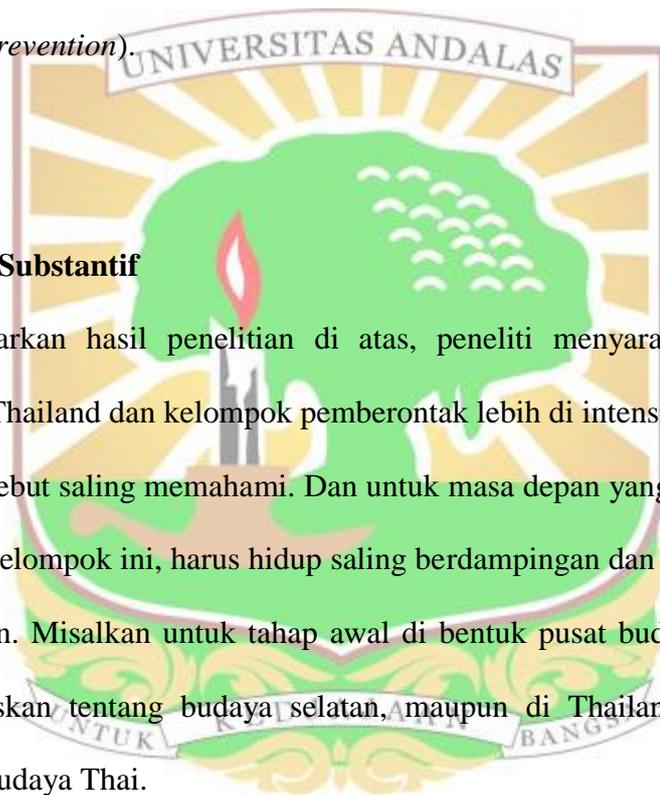
5.2 Saran

a. Saran Substantif

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan sebaiknya dialog antara Thailand dan kelompok pemberontak lebih di intensifkan agar kedua kelompok tersebut saling memahami. Dan untuk masa depan yang lebih baik lagi, antara kedua kelompok ini, harus hidup saling berdampingan dan menghargai satu sama yang lain. Misalkan untuk tahap awal di bentuk pusat budaya di Thailand yang menjelaskan tentang budaya selatan, maupun di Thailand Selatan yang menjelaskan budaya Thai.

b. Saran Metodologis

Untuk peneliti lainnya yang tertarik dengan Resolusi Konflik, model *hourglass* dapat digunakan untuk melihat resolusi konflik. Namun, karena penelitian ini hanya menggunakan *preventing violent conflict*, maka peneliti lain dapat mencobakan komponen lain yang terdapat dalam model *hourglass* baik dalam konflik Thailand Selatan, maupun dalam konflik lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Auni bin Haji. *Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu.*

Kuala Lumpur: DarulFikir Sdn.Bhd, 2001.

Abuza, Zachri. *The Ongoing Insurgency in Southern Thailand: Trends in*

Violence, Counterinsurgency Operations, and the Impact of International

Politics. Washington, D.C.: National defense University Press, 2011.

Chalk, Peter. "Militant Islamic Separatism in Southern Thailand," dalam *Islam in*

Asia: Changing Political Realities, disunting oleh Jason F. Isaacson dan

Colin Rubenstein, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002.

Christie, Clive J.A *Modern History of Southeast Asia: Decolonization,*

Nationalism and Separatism. London: Tauris Academic Studies and

Singapore, 1996.

Dulyakasem, Uthai. "Muslim-Malay Separatism in Southern Thailand Factors

Underlying the Political Revolt," dalam *Armed Separatism in Southeast*

Asia, edited by Joo-Lock, Lim and Vani S. Singapore: ISEAS, 1984,

dikutip dalam Baiq L.S. Wardhani "Iredentisme Islamis di Asia Tenggara

Pasca 9/11: Identifikasi, Karakteristik dan respon pemerintah."

Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, 2008.

Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam.* Dialihbahasakan oleh Eva

Y.N. dkk., Vol. 6. Bandung: Mizan, 1995.

Forbes, D. W. *The Muslim of Thailand*, Vol. 2. Bihar: Centre for Southeast Asian

Studies, 1989.

- Fox, Jonathan. *Ethnoreligious Conflict in The Late Twentieth Century: A General Theory*. Lanham: Lexington Books, 2002.
- Fuston, John. *Thailand's Southern Fires: The Malaysian Factor*, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS). Canberra: Australian National University, 2006.
- Gross, Max L.A. *Muslim Archipelago: Islam and Politics in Southeast Asia*. Washington DC: National Defense Intelligence College, 2007.
- Hashmat, Shahis Ahmad. *The OIC's Potential, Capabilities and Constraints for International Conflict Resolution*. Islamabad: Institute of Strategic Studies Islamabad, 2014.
- Hendrarso, Emy Susanti. "Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar." in *Metode Penelitian Sosial*, edited by Bagong Suyanto and Sutinah. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006: 165-175.
- International Crisis Group, *Southern Thailand: Moving Towards Political Solutions?* Bangkok: International Crisis Group, 2009.
- Isaacson, Jason F., dan Colin Rubenstein, eds., *Islam in Asia: Changing Political Realities*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002.
- Kadayifci-Orellana, S. Ayse. "Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution," in *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, edited by Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, and Ira William Zartman. London: SAGE Publishing, 2009: 264-280.
- Mas' oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3E, 2008.

Melvin, Neil J. *Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency*. Bromma: CM Gruppen, 2007.

Muzani, Saiful. *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka LP3S, 1993.

Oetomo, Dede. "Penelitian Kualitatif: Aliran dan Tema" in *Metode Penelitian Sosial*, edited by Bagong Suyanto and Sutinah. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006: 177-190.

Peace Brigades International. *Peacebuilding and Peace Education: Key Terms of Reference*. 2008.

Pitsuawan, Surin. *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse, and Hugh Miall. *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. Cambridge: Polity Press, 2011.

Shadili, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*, Edisi khusus. Vol. 6. Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984.

Suganasil, Wattana. *Dinamic Diversity in Southern Thailand*. Chiang Mai; Silkworm Books, 2005.

Taylor, Steven J. and Robert Bogdan. *Introduction to Qualitative Research: Research Methods: the Search for Meaning*. New York: Wiley & Sons Inc., 1984.

Teeuw, Andries, dan David K. Wyatt. *Hikayat Pattani The Story of Pattani: Bibliotheca Indonesica*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1970.

Wehr, Paul. *Conflict Regulation*. Boulder: Westview Press, 1979.

Wyatt, David K. *Thailand a Short History*. Chiang Mai: Silkworm Books, 1984.

Yusuf, Imtiyaz. *Ethnoreligious and Political Dimensions of the Southern Thailand Conflict*. Washington DC: Stimson, 2009.

Jurnal Ilmiah

Davis, Anthony. "Thailand Confronts Separatist Violence in its Muslim South," *Jane's Intelligence Review* Maret 2004

Ibrahim, Malik. "Seputar Gerakan Islam di Thailand: Suatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal." *Sosio-Religia* Vol. 10, No. 1 (2012): 133-154.

Koch, Margaret L. "Pattani and Development of a Thai State." *Journal the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 50, No. 2 (1997):69-88.

Melvin, Neil J. "Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence, and the State in the Patani Insurgency." *SIPRI Policy Paper* No. 20 (September 2007): 1-39.

Sharqieh, Ibrahim. "Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflict?" *Peace and Conflict Studies*, Vol. 19, No. 2, (Fall: 2012): 162-179.

Sihbudi, Reza. "Problema minoritas Muslim di Asia Tenggara Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya." *Seri Penelitian PPW-LIPI*, No. 06 (2000):

Yuniarto, P. Rudolf. "Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 7, No. 1.(2005): 89-118.

Tesis, Skripsi, Paper

Aphornsuvan, Thanet. "History and Politics of the Muslim in Thailand." Paper, Thammasat University, 2003.

Arisandy, Desy. "Diplomasi Thailand-Malaysia dalam Mengatasi Gerakan Separatis di Thailand Selatan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012.

Maftukhah, Laili. "Gerakan Pembebasan Pattani di Thailand Selatan pada Tahun 1973-1982." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Aurabaya, 2011.

Yazid, Yasril. "Konflik Minoritas Melayu dan Militer Thailand: Analisis terhadap Krisis Politik di Selatan Thailand." Paper, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2009.

Yuniarto, P. Rudolf. "Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atau Dominasi "Nasional" Thailand." Paper, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004.

Waesahme, Paoyee. "The Organization of the Islamic Cooperation and the Conflict in Southern Thailand." MIR thesis., Victoria university of Wellington, 2012.

Dokumen Resmi

Organisation of the Islamic Conference. "Charter of the Organisation of the Islamic Conference."

Dokumen Online

Futaqi, Afif. "Identitas Promordial: Konflik Thailand-Pattani, 2009." <https://www.scribd.com/doc/24286426/Identitas-Primordial-Konflik-Thailand-Patani> (Diakses pada 8 April 2015).

Kementerian Luar Negeri. “Organisasi Kerjasama Islam (OKI).”[http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=Multilateral Cooperation&IDP=4&P=Multilateral&l=id](http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=4&P=Multilateral&l=id), (Diakses 18 Agustus 2015).

Wardhani, Baiq L.S.. “Kajian Etnis dalam Kajian Politik Global.” Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga. https://www.academia.edu/902452/Konflik_Etnis_dalam_Kajian_Politik_Global(Diakses 18 Mei 2015).

----- “Iredentisme Islamis di Asia Tenggara Pasca 9/11: Identifikasi, Karakteristik dan respon pemerintah.” Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, 2008. http://baiq-wardhani-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-64327-Umum-Iredentisme%20Islamis%20di%20Asia%20Tenggra.html (Diakses 19 Mei 2015).

Sumber Elektronik

BBC. “Ledakan Bom di Thailand Selatan, Lima Orang Tewas.” BBC. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/03/120331_thailand.shtml. (Diakses pada 12 Maret 2016).

Detik News. “Konflik Sektarian Thailand Renggut 5 Nyawa, termasuk Anak Kecil dan Biksu.” Detik. February 12, 2014. <http://news.detik.com/read/2014/02/13/131001/2495927/1148/konflik-sektarian-thailand-renggut-5-nyawa-termasuk-anak-kecil-dan-biksu> (Diakses pada 17 Mei 2015).

Find the Data. “Thailand.” Find The Data. <http://country-facts.findthedata.com/1/134/Thailand> (Diakses pada 8 Februari 2016).

Pattani Post. “Kerajaan Thai Meloby Negara OIC.” PattaniPost, April 20, 2010.
<http://patanipost.net/2010/04/20/kerajaan-thail-meloby-negara-oic/>,
(Diakses pada 29 Mei 2015).

-----“OIC Mahu Supaya Pihak Terlibat Mengadakan Perbincangan.”
PattaniPost, Mei 24, 2010.<http://patanipost.net/2010/05/24/oic-mahu-sepaya-pihak-terlibat-mengadakan-perbincangan/> (Diakses pada 4 November 4, 2015).

-----“OIC resolution about South Thailand.” PattaniPost, June 16, 2015.
<http://patanipost.net/2015/06/16/oic-resolution-abouth-southern-thailand/> (Diakses November 4, 2015).

-----, “OIC Harap Dapat Main Peranan Dalam Proses Perdamaian di Selatan Thailand,” PataniPost, <http://patanipost.net/2016/01/14/oic-harap-dapat-main-peranan-dalam-%E2%80%A8proses-erdamaian-di-selatan-thailand/> (Diakses pada 3 Februari 2016).

Reuters. “Six Killed and 11 Injured in Thailand’s Violence-hit South.” Reuters, July 11, 2015. <http://www.reuters.com/article/2015/07/11/us-thailand-blast-idUSKCN0PL0G420150711#Cgmzdf5Uw0rLpxpk.97> , (Diakses pada 4 November 2015).

VOA Islam. “Muslim Patani Ditangkap, Dibunuh, Dirampas, dan Diperkosa.”
Voa-Islam <http://www.voa-islam.com/read/international-jihad/2011/12/10/16981/kabar-terkini-muslim-patani-ditangkap-dibunuh-dirampas-diperkosa/#sthash.HAmGfZt6.dpbs> (diakses pada 11 Februari 2016).

Wibirama, Sunu. “Geliat Islam di Thailand,” Wibirama
<http://wibirama.com/2009/02/23/sunu-wibirama-geliat-islam-di-thailand/>(diakses pada 18 Mei 2012).

Wikipedia. “Provinsi Pattani.” Wikipedia Indonesia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani (diakses pada 24 Januari 2016).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Yurisa Irawan

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/22 Juni 1994

Alamat : Asrama Polres Blok C no. 54 Bukittinggi

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Email/Telepon : yurisa.irawan2206@gmail.com/085761770226

Pendidikan Terakhir : SMAN 2 Bukittinggi

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Kuntum Mekar, Bukittinggi, Tahun 1998-2000
2. SDN 04 Birugo, Bukittinggi, Tahun 2000-2006
3. SMPN 1 Bukittinggi, Tahun 2006-2009
4. SMAN 2 Bukittinggi, Tahun 2009-2012

